

**PENGEMBANGAN EKOWISATA BERKELANJUTAN
KAWASAN PANTAI SELATAN DI KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister**



Oleh:

MOH. INDRA GUNAWAN

NIM. 166020102111007

**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2020



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsurunsur plagiasi, saya bersedia tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 10 Januari 2020

Yang menyatakan,



Moh. Indra Gunawan
NIM. 166020102111007

ABSTRAK

Moh. Indra Gunawan. 166020102111007. *Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.* Tesis. Program Magister Ilmu Ekonomi. Universitas Brawijaya Malang. Pembimbing I: Prof. Dr. M. Pudjihardjo, SE., MS. Pembimbing II: Prof. Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D.

Ekowisata merupakan suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan tujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Ekowisata (*ecotourism*) adalah suatu bentuk wisata berbasis alam yang berupaya melestarikannya secara ekologis, sosial budaya, dan ekonomi dengan menyediakan kesempatan penghargaan dan pembelajaran tentang lingkungan alami atau unsur-unsur lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status keberlanjutan dan tingkat sensitivitas atribut-atribut sebagai faktor pengungkit masing-masing dimensi serta menyusun strategi dalam meningkatkan status pengembangan ekowisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan positivistik kuantitatif dengan mengambil lokasi pada kawasan pantai masing-masing adalah pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang yang berada di Kabupaten Malang. Pengukuran terhadap pengembangan ekowisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang dilakukan dengan menetapkan 5 (lima) dimensi ekowisata berkelanjutan beserta atribut yang menyertainya. Dimensi-dimensi tersebut masing-masing adalah Dimensi Lingkungan, Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial & Budaya, Dimensi Aksesibilitas & Utilitas, dan Dimensi Kelembagaan. Pengumpulan data menggunakan teknik kuisioner yang didistribusikan kepada pakar (*judgment expert*) yang berjumlah 25 orang. Kuisioner didistribusikan pada 5 orang pakar untuk masing-masing dimensi sesuai kompetensi yang dimiliki. Metode analisis data menggunakan metode *Multi Dimensional Scaling (MDS)* pendekatan *Rap-EcoBeach (Modifikasi RAPFISH)*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status pengembangan ekowisata berkelanjutan secara multidimensi menunjukkan bahwa Pantai Ngliyep memiliki status kurang berkelanjutan, sedangkan Pantai Balaikambang dan Pantai Ungapan masing-masing memiliki status cukup berkelanjutan. Sementara itu, status pengembangan ekowisata berkelanjutan untuk masing-masing dimensi adalah sebagai berikut: (1) Dimensi lingkungan menunjukkan bahwa Pantai Ngliyep dan Pantai Ungapan cukup berkelanjutan, sedangkan Pantai Balaikambang berkelanjutan; (2) Dimensi ekonomi menunjukkan bahwa Pantai Ngliyep dan Pantai Ungapan memiliki status kurang berkelanjutan, sedangkan Pantai Balaikambang cukup berkelanjutan; (3) Dimensi sosial dan budaya, menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketiga lokasi baik Pantai Ngliyep, Pantai Balaikambang, dan Pantai Ungapan cukup berkelanjutan; (4) Dimensi aksesibilitas dan utilitas, menunjukkan bahwa Pantai Ngliyep memiliki status kurang berkelanjutan, sedangkan Pantai Balaikambang dan Pantai Ungapan cukup berkelanjutan; dan (5) Dimensi kelembagaan, menunjukkan bahwa Pantai Ngliyep memiliki status kurang berkelanjutan, sedangkan Pantai Balaikambang dan Pantai Ungapan cukup berkelanjutan. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa atribut-



atribut sensitif masing-masing dimensi sebagai faktor penguangkit status keberlanjutan pengembangan ekowisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: (1) Atribut-atribut sensitif dimensi lingkungan, yakni: kemiringan pantai, lebar pantai, biota berbahaya, dan kecepatan arus; (2) Atribut-atribut sensitif dimensi ekonomi, yakni: pengembangan produk lokal, pengembangan jasa wisata lain, diversifikasi usaha, dan peluang pekerjaan; (3) Atribut-atribut sensitif dimensi sosial dan budaya, yakni: kebersihan lingkungan, muatan edukasi, dan penerapan sains dan teknologi; (4) Atribut-atribut sensitif dimensi aksesibilitas dan utilitas, yakni: air bersih, akses komunikasi, fasilitas kesehatan, akses informasi, pemasaran wisata, dan akses transportasi; dan (5) Atribut-atribut sensitif dimensi kelembagaan, yakni: PERDA Kabupaten, peran LITBANG, regulasi pemerintah pusat, PERDA Provinsi, peran institusi pemerintah, dan peran pihak swasta. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan terhadap atribut-atribut sensitif dari masing-masing dimensi.

Kata Kunci : *Ekowisata, Pantai, Keberlanjutan, Rap-EcoBeach, Dimensi, Atribut, Status, dan Sensitif.*



ABSTRACT

Gunawan, Mohammad Indra. Master Program in Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya. **The Development of Sustainable Ecotourism in Southern Beach Regions in Malang Regency of East Java**. Head of Advisory Commission: Prof. Dr. M. Pudjihardjo, SE., MS. Member Advisory Commission II: Prof. Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D.

Ecotourism is a concept of sustainable tourism development for supporting environmental (natural and cultural) environment preservation efforts and increasing people's participation in the management so that economic benefits are provided for the local communities. The natural-based tourism strives to preserve the nature in terms of ecology, social and culture, and economy by providing opportunities for awards and learning about natural environments or other elements. The objective of this study is to analyze the sustainability status and the sensitivity level of its attributes as the leveraging factors of each dimension and to design a strategy to improve the status of ecotourism development in Ngliyep, Ungapan, and Balaikambang beaches in Malang regency.

This analytical descriptive research uses quantitative positivistic approach conducted in beach regions of Ngliyep, Ungapan, and Balaikambang in Malang regency. The measurement of the ecotourism development of Ngliyep, Ungapan, and Balaikambang beaches was conducted by using the five dimensions of sustainable ecotourism along with their accompanying attributes. The dimensions are environment, economy, social and culture, accessibility and utility, and institution. The data was collected from questionnaires distributed to 25 judgment experts; each of the five dimensions is represented by five experts, selected based on their competencies. The data was analyzed using Multi-Dimensional Scaling (MDS) with Rap-EcoBeach (modified RAPFISH) approach.

The results of the analysis conclude that, multidimensionally, the sustainable ecotourism development statuses of the beaches are poor for Ngliyep and fair for Balaikambang and Ungapan. Further, (1) the environmental sustainability is fair for Ngliyep and Ungapan and good for Balaikambang; (2) the economic sustainability is poor for Ngliyep and Ungapan and fair for Balaikambang; (3) the social and cultural sustainability is fair for all beaches; (4) the accessibility and utility sustainability is poor for Ngliyep and fair for Balaikambang and Ungapan; and (5) the institutional sustainability is poor for Ngliyep and fair for Balaikambang and Ungapan. The results also indicate the sensitive attributes of each dimension as the leveraging factors for the sustainable ecotourism development statuses of the Ngliyep, Ungapan, and Balaikambang beaches of Malang regency as follows. (1) The sensitive attributes of environmental dimension are beach land inclination, coastline length, dangerous biota, and wave velocity. (2) The sensitive attributes of economic dimension are local product development, other tourism services development, business diversification, and job opportunities. (3) The sensitive attributes of socio-cultural dimension are environmental cleanliness, educational content, and science and technology application. (4) The sensitive attributes of

accessibility and utility dimension are clean water, communication access, health facilities, information access, tourism marketing, and transportation access. (5) The sensitive attributes of institutional dimension are regency government regulation, the role of research and development, central government regulation, provincial government regulation, the role of government institution, and the role of private sector. Furthermore, the status of the sustainable ecotourism development in southern beach regions of Malang regency can be improved by enhancing the sensitive attributes of each dimension.

Keywords: ecotourism, beach, sustainability, Rap-EcoBeach, dimensions, attributes, statuses, sensitive



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Pustaka	
2.1.1 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi	10
2.1.2 Teori Pengembangan Wilayah	14
2.1.3 Teori Perencanaan	18
2.1.4 Teori Pengelolaan	22
2.1.5 Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	24
2.1.5.1 Pengertian Pembangunan Berkelanjutan	24
2.1.5.2 Sasaran Pembangunan Berkelanjutan	30
2.1.5.3 Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan	32
2.1.6 Pariwisata	34
2.1.6.1 Pengertian Pariwisata	34
2.1.6.2 Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	38
2.1.7 Ekowisata	43





2.1.7.1	Pengertian Ekowisata	43
2.1.7.2	Prinsip Dasar Ekowisata	46
2.1.7.3	Ekowisata Bahari	57
2.1.7.4	Wisata Rekreasi Pantai	59
2.2	Tinjauan Penelitian Terdahulu	60
BAB III KERANGKA KONSEP PENELITIAN		65
BAB IV METODE PENELITIAN		
4.1	Jenis Penelitian	76
4.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	76
4.3	Ruang Lingkup Penelitian	77
4.4	Jenis dan Sumber Data	78
4.5	Metode Pengumpulan Data	79
4.6	Definisitas Operasional Variabel	80
4.7	Metode Analisis Data	
4.7.1	Metode <i>Multi Dimensional Scaling</i> (MDS) pendekatan <i>Rap-EcoBeach</i> (Modifikasi <i>RAPFISH</i>)	87
4.7.2	Analisis <i>Leverage</i> (Analisis Sensitivitas)	93
4.7.3	Metode Penyusunan Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang	94
BAB V GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		
5.1	Gambaran Umum Kabupaten Malang	96
5.1.1	Letak Geografis dan Administrasi	96
5.1.2	Keadaan Topografi dan Klimatologi	97
5.1.3	Keadaan Geologi dan Hidrologi	98
5.2	Profil Objek Wisata	99
5.2.1	Objek Wisata Pantai Ngliyep	100
5.2.2	Objek Wisata Pantai Balaikambang	102
5.2.3	Objek Wisata Pantai Ungapan	104
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
6.1	Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang	106

6.1.1	Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Lingkungan	106
6.1.2	Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Ekonomi	110
6.1.3	Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Sosial dan Budaya	112
6.1.4	Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas	115
6.1.5	Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Kelembagaan	118
6.1.6	Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Multidimensi	120
6.2	Atribut Sensitif Dimensi-dimensi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang	123
6.2.1	Atribut-atribut Sensitif Dimensi Lingkungan	123
6.2.2	Atribut-atribut Sensitif Dimensi Ekonomi	125
6.2.3	Atribut-atribut Sensitif Dimensi Sosial dan Budaya	127
6.2.4	Atribut-atribut Sensitif Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas	129
6.2.5	Atribut-atribut Sensitif Dimensi Kelembagaan	131
6.3	Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang	134
6.3.1	Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Lingkungan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang	135
6.3.2	Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Ekonomi Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang	139
6.3.3	Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Sosial dan Budaya Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang	146
6.3.4	Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang	150



6.3.5 Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan
Dimensi Kelembagaan Kawasan Pantai Selatan di
Kabupaten Malang 156

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan 161
7.2 Saran 163

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Indikator-indikator Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	31
4.1. Atribut-atribut dan Kriteria Penilaian Dimensi Lingkungan dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang	81
4.2. Atribut-atribut dan Kriteria Penilaian Dimensi Ekonomi dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang	82
4.3. Atribut-atribut dan Kriteria Penilaian Dimensi Sosial-Budaya dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang	83
4.4. Atribut-atribut dan Kriteria Penilaian Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang	85
4.5. Atribut-atribut dan Kriteria Penilaian Dimensi Kelembagaan dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang	86
4.6. Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang	91
6.1. Indeks dan Status Keberlanjutan Dimensi Lingkungan	107
6.2. Perbandingan Indeks Keberlanjutan MDS dan <i>Monte Carlo</i> (MC) Dimensi Lingkungan	108
6.3. Indeks dan Status Keberlanjutan Dimensi Ekonomi	111
6.4. Perbandingan Indeks Keberlanjutan MDS dan <i>Monte Carlo</i> (MC) Dimensi Ekonomi	111
6.5. Indeks dan Status Keberlanjutan Dimensi Sosial dan Budaya	113
6.6. Perbandingan Indeks Keberlanjutan MDS dan <i>Monte Carlo</i> (MC) Dimensi Sosial dan Budaya	114
6.7. Indeks dan Status Keberlanjutan Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas	116
6.8. Perbandingan Indeks Keberlanjutan MDS dan <i>Monte Carlo</i> (MC) Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas	117
6.9. Indeks dan Status Keberlanjutan Dimensi Kelembagaan	119

6.10 Perbandingan Indeks Keberlanjutan MDS dan (MC) Dimensi Kelembagaan.....	120
6.10 Indeks dan Status Keberlanjutan Multidimensi	121
6.11 Indeks dan Status Keberlanjutan Multidimensi	121
6.12 Perbandingan Indeks Keberlanjutan MDS dan Monte Carlo (MC) Multidimensi	122
6.13 Nilai <i>Root Mean Square (RMS)</i> dan Tingkat Sensitivitas Atribut - Atribut Dimensi Lingkungan	125
6.14 Nilai <i>Root Mean Square (RMS)</i> dan Tingkat Sensitivitas Atribut - Atribut Dimensi Ekonomi	127
6.15 Nilai <i>Root Mean Square (RMS)</i> dan Tingkat Sensitivitas Atribut - Atribut Dimensi Sosial dan Budaya	129
6.16 Nilai <i>Root Mean Square (RMS)</i> dan Tingkat Sensitivitas Atribut - Atribut Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas	131
6.17 Nilai <i>Root Mean Square (RMS)</i> dan Tingkat Sensitivitas Atribut - Atribut Dimensi Kelembagaan	133



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1.1. Proses Manajemen Strategis	21
2.2. Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan	27
3.1. Kerangka Konsep Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang	67
4.1.1. Peta Lokasi Wisata Rekreasi Pantai Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang	77
4.2.1. Posisi Titik Keberlanjutan dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang	92
6.1.1. Ordinas <i>MDS</i> dan <i>Monte Carlo</i> Dimensi Lingkungan	107
6.2.1. Ordinas <i>MDS</i> dan <i>Monte Carlo</i> Dimensi Ekonomi	110
6.3.1. Ordinas <i>MDS</i> dan <i>Monte Carlo</i> Dimensi Sosial dan Budaya	113
6.4.1. Ordinas <i>MDS</i> dan <i>Monte Carlo</i> Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas	116
6.5.1. Ordinas <i>MDS</i> dan <i>Monte Carlo</i> Dimensi Kelembagaan	118
6.6.1. Ordinas <i>MDS</i> dan <i>Monte Carlo</i> Multidimensi	121
6.7.1. Nilai <i>Root Mean Square (RMS)</i> Dimensi Lingkungan	124
6.8.1. Nilai <i>Root Mean Square (RMS)</i> Dimensi Ekonomi	126
6.9.1. Nilai <i>Root Mean Square (RMS)</i> Dimensi Sosial dan Budaya	128
6.10.1. Nilai <i>Root Mean Square (RMS)</i> Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas	130
6.11.1. Nilai <i>Root Mean Square (RMS)</i> Dimensi Kelembagaan	132

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuisisioner Penelitian : Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
2. Daftar Nama Responden Pakar (*Judgment Expert*) dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang
3. Distribusi Skor Kuisisioner Dimensi Lingkungan dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang
4. Distribusi Skor Kuisisioner Dimensi Ekonomi dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang
5. Distribusi Skor Kuisisioner Dimensi Sosial dan Budaya dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang
6. Distribusi Skor Kuisisioner Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang
7. Distribusi Skor Kuisisioner Dimensi Kelembagaan dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang
8. Hasil Olahan *Rap-EcoBeach*: Indeks Keberlanjutan Dimensi Lingkungan
9. Hasil Olahan *Rap-EcoBeach*: *Root Mean Square (RMS)* Atribut Dimensi Lingkungan
10. Hasil Olahan *Rap-EcoBeach*: Indeks Keberlanjutan Dimensi Ekonomi
11. Hasil Olahan *Rap-EcoBeach*: *Root Mean Square (RMS)* Atribut Dimensi Ekonomi
12. Hasil Olahan *Rap-EcoBeach*: Indeks Keberlanjutan Dimensi Sosial dan Budaya
13. Hasil Olahan *Rap-EcoBeach*: *Root Mean Square (RMS)* Atribut Dimensi Sosial dan Budaya
14. Hasil Olahan *Rap-EcoBeach*: Indeks Keberlanjutan Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas
15. Hasil Olahan *Rap-EcoBeach*: *Root Mean Square (RMS)* Atribut Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas
16. Hasil Olahan *Rap-EcoBeach*: Indeks Keberlanjutan Dimensi Kelembagaan

- 17. Hasil Olahan *Rap-EcoBeach*: Root Mean Square (RMS) Atribut Dimensi Kelembagaan
- 18. Hasil Olahan *Rap-EcoBeach*: Indeks dan Status Keberlanjutan Multidimensi



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu upaya sadar dan terus menerus yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia Indonesia, baik secara material maupun spiritual. Kegiatan pembangunan merupakan kegiatan yang tidak dapat dihentikan guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, mengingat pembangunan itu sendiri merupakan upaya penggabungan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, maka hampir dapat dipastikan bahwa proses pembangunan ini akan berdampak pada terganggunya keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup menjadi satu-satunya pilihan dalam upaya menekan dampak negatif proses pembangunan itu sendiri.

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan kebijaksanaan pembangunan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan dengan memadukan sumberdaya alam ke dalam proses pembangunan guna menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup masa kini dan generasi masa depan.

Adapun pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pembangunan berwawasan lingkungan hidup sering dikemukakan sebagai pembangunan berkelanjutan (Sugandhy, *et al.*, 2009).

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) didefinisikan sebagai pembangunan dari kesepakatan multidimensional untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik untuk semua orang dimana pembangunan ekonomi,

sosial dan proteksi lingkungan saling memperkuat dalam pembangunan (Bond *et al.*, 2001). pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Inti dari definisi ini adalah fokus pada sebuah pembangunan bagi generasi masa kini dan masa mendatang (Atkitson, *et al.*, 2007; Sugandhy, *et al.*, 2009).

Pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dengan pemanfaatan ruang wilayah beserta potensi sumberdaya yang ada bagi tujuan pembangunan manusia atau masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang dititikberatkan pada segi kebutuhan kualitas hidup manusia dalam pemanfaatan ruang wilayah, meliputi masalah pemenuhan kebutuhan dasar, pengentasan kemiskinan; perubahan pola konsumsi termasuk energi dinamika kependudukan dan pertumbuhan wilayah; pengelolaan dan peningkatan kesehatan; serta pengembangan perumahan dan permukiman. Salah satu wujud bentuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai bagian dari pengembangan wilayah adalah pariwisata berkelanjutan.

Kelahiran pariwisata berkelanjutan diawali dengan pemikiran bahwa pariwisata tidak hanya berorientasi terhadap pendapatan devisa atau kesempatan peluang kerja yang besar akan tetapi dapat menghadirkan sesuatu yang baru baik bagi wisatawan, masyarakat dan terutama terhadap alam. Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata telah memunculkan dampak-dampak negatif atau dampak-dampak yang tidak diharapkan. Dampak-dampak tersebut antara lain berupa dampak sosial budaya seperti degradasi kesenian, konflik sosial, solidaritas sosial, konsumerisme, peniruan, kriminalitas dan sebagainya.

Agenda 21 Sektorl Agenda Pariwisata untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan menerangkan pengertian pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan wilayah yang

didatangi wisatawan (destinasi wisata) pada saat ini, sekaligus melindungi dan meningkatkan kesempatan di masa depan. Pengertian tersebut mengarah pada pengelolaan seluruh sumberdaya sedemikian sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika dapat terpenuhi sekaligus memelihara integritas kultural, berbagai proses ekologi yang esensial, keanekaragaman hayati dan berbagai sistem pendukung kehidupan (KLH, 2000).

United Nation World Tourism Organization menyebutkan 4 (empat) prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan, yaitu: keberlanjutan secara ekonomi, ekologi, budaya, dan keberlanjutan masyarakat lokal. Keberlanjutan secara ekonomi memberikan pemahaman pemenuhan manfaat ekonomi untuk kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Keberlanjutan secara ekologi, pembangunan yang mendukung keberadaan keragaman hayati, pemenuhan akan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam lestari. Keberlanjutan budaya, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat bertanggungjawab penuh terhadap hidupnya melalui penguatan identitas lokal. Selanjutnya, keberlanjutan masyarakat lokal, penguatan terhadap keberadaan masyarakat lokal dengan keterlibatan secara aktif dalam usaha pengembangan pariwisata (McKercher, 2003). Salah satu konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah ekowisata.

Ekowisata (*ecotourism*) adalah suatu bentuk wisata berbasis alam yang berupaya melestarikannya secara ekologis, sosial budaya, dan ekonomi dengan menyediakan kesempatan penghargaan dan pembelajaran tentang lingkungan alami atau unsur-unsur spesifik lainnya (Weaver, 2001). Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Kegiatan ekowisata lebih mengutamakan pada usaha-usaha dalam skala kecil dan menekankan pada kepentingan pelestarian lingkungan dan

sosial masyarakat setempat (Yulianda, 2007). Ekowisata adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan jasa lingkungan, baik itu keindahan dan keunikan alam, ataupun budaya, cara hidup, struktur sosial dalam masyarakat dan unsur-unsur konservasi, edukasi serta pemberdayaan masyarakat setempat (Fandeli *et al.* (2000).

Green Tourism Association mendefinisikan ekowisata sebagai suatu pembangunan pariwisata yang memiliki empat pilar atau atribut, yaitu: (1) *environmental responsibility*; mengandung pengertian proteksi, konservasi atau perluasan sumberdaya alam dan lingkungan fisik untuk menjamin kehidupan jangka panjang dan keberlanjutan ekosistem; (2) *local economic vitality*; mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal, bisnis dan komunitas untuk menjamin kekuatan ekonomi berkelanjutan (sustainability); (3) *cultural sensitivity*; mendorong timbulnya penghormatan dan apresiasi terhadap adat istiadat dan keragaman budaya; dan (4) *experiential richness*, yakni menciptakan atraksi yang dapat memperkaya dan meningkatkan pengalaman memuaskan melalui partisipasi aktif dalam keterlibatan dengan alam, manusia, tempat dan/atau budaya (Yoeti, 2006).

Penjelasan-penjelasan terkait ekowisata tersebut memberikan pemahaman bahwa secara konseptual ekowisata merupakan suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan tujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Jika ditinjau dari segi pengelolaan, ekowisata dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam dan secara ekonomi berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya

pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) menjelaskan bahwa terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Dari visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional yang meliputi pengembangan: (1) Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat; (2) Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisnus dan wisman; (3) Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan (4) Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan (RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021).

Kabupaten Malang merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi (Provinsi Jawa Barat). Berada di tengah sebelah selatan Provinsi Jawa Timur dengan luas 3.534,86 km², terbagi atas 2.977,05 km² daratan dan 557,81 km² lautan. Hal ini menjadikan Kabupaten Malang memiliki bentangan laut terluas di Jawa Timur yakni garis pantai sepanjang 102,62 km. Hal ini menjadikan Kabupaten Malang memiliki potensi pantai yang berlimpah, sampai tahun 2018 terdapat 44 Pantai di Kabupaten Malang, diantaranya pantai Ungapan, Pantai Ngliyep, Pantai Balekambang, Pantai

Sendangbiru, Pantai Jembatan Panjang, Pantai Nganteb, Pantai Bajul Mati, Pantai Licin, Pantai Kondak Merak, Pantai Tamban, Pantai Jonggring Saloko, Pantai Goa Cina, Pantai Modangan, Pantai Sipelot, Pantai Lenggoksono dan lain sebagainya (RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021).

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu program andalan pemerintah Kabupaten Malang. Adanya pembangunan jalan lintas selatan (JLS) diharapkan akan memudahkan wisatawan mengunjungi daerah wisata serta imbasnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malang memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan ekowisata berupa wisata alam pantai yang nantinya diharapkan akan mampu menopang perekonomian menuju kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa konsepsi pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang tidak bisa dengan serta merta mudah untuk diwujudkan. Banyak keterbatasan-keterbatasan yang ada, tidak saja keterbatasan sumberdaya manusia, namun juga sarana dana prasarana pendukung yang akan menopang terwujudnya konsepsi ekowisata. Halmana juga terjadi saat pemerintah Kabupaten Malang sebagai regulator yang berperan strategis belum mampu mengupayakan kesempatan yang luas bagi *stakeholder* untuk berpartisipasi penuh dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan kajian terhadap beberapa objek wisata pantai di Kabupaten Malang dengan mendasarkan pada konsepsi ekowisata.

Terkait hal ini maka selanjutnya akan dilakukan kajian pada beberapa objek destinasi wisata pantai selatan di Kabupaten Malang berdasarkan konsepsi pengembangan ekowisata berkelanjutan. Beberapa objek wisata pantai selatan tersebut adalah pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang yang dianggap mampu mewakili kondisi pantai selatan secara umum di Kabupaten Malang. Kajian terhadap pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang ini mengacu pada konsepsi pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan penetapan 5 (lima) dimensi, yakni: Dimensi Lingkungan, Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial dan Budaya, Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas; serta Dimensi Kelembagaan.

1.2 Perumusan Masalah

Pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang sudah semestinya didasarkan pada konsepsi pariwisata berkelanjutan dalam hal ini adalah ekowisata (*ecotourism*). Hal ini dimaksudkan agar pengembangan ekowisata ini mampu memberikan nilai manfaat di masa sekarang dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya yang ada demi kepentingan manfaat pada masa yang akan datang. Atas dasar pemahaman ini maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status keberlanjutan dalam pengembangan ekowisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang?
2. Bagaimanakah tingkat sensitivitas atribut-atribut dalam pengembangan ekowisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang?

3. Bagaimanakah strategi dalam meningkatkan status pengembangan ekowisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis status keberlanjutan pengembangan ekowisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang.
2. Mengetahui dan menganalisis tingkat sensitivitas atribut-atribut sebagai faktor pengungkit status keberlanjutan dalam pengembangan ekowisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang.
3. Menyusun strategi untuk meningkatkan status pengembangan ekowisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat bagi berbagai pihak sebagaimana berikut ini.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya perbendaharaan pengetahuan bidang kajian pengembangan ekowisata berkelanjutan. Penelitian ini sekaligus juga dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian sejenis sehingga akan lebih memperkaya kajian empiris sebagai bagian dari pengembangan keilmuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi sumbangan pemikiran maupun rekomendasi bagi para stakeholders dalam upaya pengembangan ekowisata berkelanjutan dan pelestarian sumberdaya alam.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan suatu negara harus mampu mengatasi tiga persoalan mendasar yaitu masalah kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Sehingga pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu proses multidimensi yang mencerminkan perubahan struktur masyarakat secara keseluruhan baik itu struktur nasional, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional. Perubahan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan dan memberantas kemiskinan sehingga diharapkan terwujudnya kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual (Todaro and Stephen, 2006:21).

Goulet dan tokoh-tokoh lainnya (Todaro and Stephen, 2006:27) menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen atau nilai inti yang dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami arti pembangunan yang hakiki, yaitu:

- 1) Kecukupan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan. Apabila dari kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka akan muncul "keterbelakangan absolute". Fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi, pada hakikatnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin masyarakat yang dilengkapi perangkat dan bekal guna menghindari segala kesengsaraan dan ke tidak berdayaan akibat kekurangan kebutuhan dasar tersebut. Atas dasar itulah, kita bisa menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi merupakan prasarat bagi membaiknya kualitas kehidupan.

- 2) Harga diri, komponen dari kehidupan yang lebih baik adalah adanya dorongan diri sendiri untuk merasa pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu dan seterusnya.
- 3) Kebebasan dari sikap menghambat kemampuan untuk memilih.

Todaro and Stephen (2006) menjelaskan bahwa proses pembangunan harus memiliki 3 (tiga) tujuan inti, yakni:

- 1) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan, kesehatan, perlindungan dan keamanan).
- 2) Peningkatan standar kehidupan yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan. Namun juga meliputi penambahan penyediaan, lapangan pekerjaan, perbaikan, kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Dimana semuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil melainkan juga untuk menumbuhkan jati diri pribadi bangsa yang bersangkutan.
- 3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi tiap individu dan bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari sikap ketergantungan.

Sementara itu, Bachrawi (2004) menyatakan bahwa pembangunan harus memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Potensi yang diawali oleh suatu daerah, baik dalam arti kekayaan alam maupun sumber daya insani.
- 2) Kemampuan daerah untuk membangun dirinya dalam kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan.
- 3) Keselarasan antara pembangunan daerah dan pembangunan sektoral.
- 4) Keselarasan pembangunan antar seluruh daerah tujuan dari pembangunan.
- 5) Keselarasan pembangunan ekonomi dalam suatu daerah.

Pengertian pembangunan ekonomi yang paling banyak diterima adalah definisi dari Meir dalam Richardson (2001) yang mendefinisikan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses dimana suatu negara/wilayah mampu meningkatkan pendapatan perkapita penduduk selama kurun waktu yang panjang

dengan melihat bahwa jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan absolute tidak meningkat serta distribusi pendapatan tidak makin timpang (Meir dalam Richardson, 2001).

Rostow dalam Arsyad (2010:49) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan-perubahan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat misalnya perubahan keadaan sistem politik, stuktur sosial dan sistem ekonomi. Jika perubahan itu terjadi maka proses pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan suatu masyarakat yang sudah mencapai proses pertumbuhan yang sifatnya demikian. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk menaikkan taraf hidup suatu bangsa yang sering diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Tujuan pembangunan ekonomi untuk menaikkan pendapatan nasional riil dan untuk meningkatkan produktivitas. Peningkatan pendapatan perkapita dalam waktu yang relatif lama yang disertai dengan:

- 1) Terjadinya tranformasi dalam struktur produksi, struktur perdagangan internasional dan transformasi bidang demografi dalam arti yang luas.
- 2) Makin berkurangnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.
- 3) Terjadinya distribusi/pembagian pendapatan secara relatif tanpa menjadi tambah buruk.
- 4) Terciptanya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tetap terpelihara.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi dan non ekonomi. Oleh karena itu sasaran pembangunan yang minimal dan pasti ada menurut Todaro and Stephen (2006) adalah:

- 1) Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.

- 2) Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu atau nasional.
- 3) Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan tidak hanya hubungan dengan orang lain dan Negara lain tetapi dari sumber sumber kebodohan dan penderitaan.

Tujuan pembangunan ekonomi dibagi menjadi tujuan utama dan tujuan sampingan. Tujuan utama adalah menaikkan atau memperbesar output nasional dan pendapatan masyarakat. Tujuan ini adalah dalam rangka menunjang tercapainya tujuan pembangunan secara keseluruhan. Sedangkan tujuan sampingan adalah mengusahakan distribusi pendapatan yang merata, tingkat ekonomi yang, memerangi kemiskinan serta mengurangi tingkat pengangguran (Meier and Baldwin, 2012).

Todaro and Stephen (2006) menyebutkan bahwa dalam tujuan suatu pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang di upayakan cara-caranya oleh masyarakat melalui suatu kombinasi berbagai proses sosial ekonomi dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ada empat model pembangunan yaitu model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan pekerjaan, penghapusan kemiskinan, dan model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Berdasarkan atas model diatas pembangunan tersebut semuanya bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan barang-barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja yang baru dengan upah yang layak, dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua rumah tangga yang kemudian sampai batas maksimal.

2.1.2 Teori Pengembangan Wilayah

Dalam banyak kepustakaan tentang pembangunan, terdapat beberapa pendekatan dan teori. Menyebut beberapa diantaranya adalah *growth theory*, *rural development theory*, *agro first theory*, *basic needs theory*, dan lain sebagainya.

Teori-teori pembangunan itu memuat berbagai pendekatan ilmu sosial yang berusaha menangani masalah keterbelakangan. Teori pembangunan benar-benar lepas landas hanya setelah diketahui bahwa persoalan pembangunan di Dunia Ketiga bersifat khusus dan secara kualitatif berbeda dari "*transisi orisinal*".

Sepanjang evolusinya, teori pembangunan menjadi semakin kompleks dan nondisipliner. Dengan demikian, tidak akan ada definisi baku dan final mengenai pembangunan, yang ada hanyalah usulan mengenai apa yang seharusnya diimplikasikan oleh pembangunan dalam konteks tertentu (Hettne, 2001).

Salah satu teori pembangunan wilayah adalah teori pertumbuhan tak berimbang (*unbalanced growth*) yang dikembangkan oleh Hirschman dan Myrdal.

Pengembangan wilayah merupakan proses perumusan dan pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan dalam skala supra urban. Pembangunan wilayah pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal, yaitu berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah.

Teori pertumbuhan tak berimbang memandang bahwa suatu wilayah tidak dapat berkembang bila ada keseimbangan, sehingga harus terjadi ketidakseimbangan. Penanaman investasi tidak mungkin dilakukan pada setiap sektor di suatu wilayah secara merata, tetapi harus dilakukan pada sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat menarik kemajuan sektor lainnya. Sektor yang diunggulkan tersebut dinamakan sebagai *leading sektor*.

Sesungguhnya teori pembangunan terkait erat dengan strategi pembangunan, yakni perubahan struktur ekonomi dan pranata sosial yang

diupayakan untuk menemukan solusi yang konsisten dan langgeng bagi persoalan yang dihadapi. Berbagai pendekatan menyangkut tema-tema kajian tentang pembangunan. Satu diantaranya adalah mengenai isu pembangunan wilayah. Secara luas, pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Perencanaan pembangunan wilayah semakin relevan dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi dalam aspek kewilayahan. Hoover dan Giarratani dalam Nugroho dan Dahuri (2004), menyimpulkan tiga pilar penting dalam proses pembangunan wilayah, yaitu:

- 1) Keunggulan komparatif (*imperfect mobility of factor*). Pilar ini berhubungan dengan keadaan ditemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara fisik relatif sulit atau memiliki hambatan untuk digerakkan antar wilayah. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lokal (bersifat khas atau endemik, misalnya iklim dan budaya) yang mengikat mekanisme produksi sumber daya tersebut sehingga wilayah memiliki komparatif. Sejauh ini karakteristik tersebut senantiasa berhubungan dengan produksi komoditas dari sumber daya alam, antara lain pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan, dan kelompok usaha sektor primer lainnya.
- 2) Aglomerasi (*imperfect divisibility*). Pilar aglomerasi merupakan fenomena eksternal yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnya keuntungan ekonomi secara spasial. Hal ini terjadi karena berkurangnya biaya-biaya produksi akibat penurunan jarak dalam pengangkutan bahan baku dan distribusi produk.
- 3) Biaya transpor (*imperfect mobility of good and service*). Pilar ini adalah yang paling kasat mata mempengaruhi aktivitas perekonomian. Implikasinya adalah biaya yang terkait dengan jarak dan lokasi tidak dapat lagi diabaikan dalam proses produksi dan pembangunan wilayah.

Perkembangan wilayah senantiasa disertai oleh adanya perubahan struktural. Wilayah tumbuh dan berkembang dapat didekati melalui teori sektor (*sektor theory*) dan teori tahapan perkembangan (*development stages theory*).

Teori sektor diadopsi dari Fisher dan Clark yang mengemukakan bahwa berkembangnya wilayah, atau perekonomian nasional, dihubungkan dengan transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama, yakni sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan), serta sektor tertier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa). Perkembangan ini ditandai oleh penggunaan sumber daya dan manfaatnya, yang menurun di sektor primer, meningkat di sektor tertier, dan meningkat hingga pada suatu tingkat tertentu di sektor sekunder (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Sedangkan teori tahapan perkembangan dikemukakan oleh para pakar seperti Rostow, Fisher, Hoover, Thompson dan lain-lain. Teori ini dianggap lebih mengadopsi unsur spasial dan sekaligus menjembatani kelemahan teori sektor.

Pertumbuhan dan perkembangan wilayah dapat digambarkan melalui lima tahapan.

- 1) Wilayah dicirikan oleh adanya industri yang dominan.

Pertumbuhan wilayah sangat bergantung pada produk yang dihasilkan oleh industri tersebut, antara lain minyak, hasil perkebunan dan pertanian, dan produk-produk primer lainnya. Industri demikian dimiliki oleh banyak negara dalam awal pertumbuhannya.

- 2) Tahapan ekspor kompleks.

Tahapan ini menggambarkan bahwa wilayah telah mampu mengekspor selain komoditas dominan juga komoditas kaitannya. Misalnya, komoditas dominan yang diekspor sebelumnya adalah minyak bumi mentah, maka dalam tahapan kedua wilayah juga mengekspor industri (metode) teknologi penambangan (kaitan ke belakang) dan produk-produk turunan dari minyak bumi (kaitan ke depan) misalnya premium, solar dan bahan baku plastik.

3) Tahapan kematangan ekonomi.

Tahapan ketiga ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi wilayah telah terdiversifikasi dengan munculnya industri substitusi impor, yakni industri yang memproduksi barang dan jasa yang sebelumnya harus diimpor dari luar wilayah. Tahapan ketiga ini juga memberikan tanda kemandirian wilayah dibandingkan wilayah lainnya.

4) Tahapan pembentukan metropolis (*regional metropolis*).

Tahapan ini memperlihatkan bahwa wilayah telah menjadi pusat kegiatan ekonomi untuk mempengaruhi dan melayani kebutuhan barang dan jasa wilayah pinggiran. Dalam tahapan ini pengertian wilayah fungsional dapat diartikan bahwa aktivitas ekonomi wilayah lokal berfungsi sebagai pengikat dan pengendali kota-kota lain. Selain itu, volume aktivitas ekonomi ekspor sangat besar yang diiringi dengan kenaikan impor yang sangat signifikan.

5) Tahapan kemajuan teknis dan profesional (*technical professional virtuosity*).

Tahapan ini memperlihatkan bahwa wilayah telah memberikan peran yang sangat nyata terhadap perekonomian nasional. Dalam wilayah berkembang produk dan proses-proses produksi yang relatif canggih, baru, efisien dan terspesialisasi. Aktivitas ekonomi telah mengandalkan inovasi, modifikasi, dan imitasi yang mengarah kepada pemenuhan kepuasan individual dibanding kepentingan masyarakat. Sistem ekonomi wilayah menjadi kompleks (*economic reciprocating system*), mengaitkan satu aktivitas dengan aktivitas ekonomi lainnya (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Dalam kerangka pengembangan wilayah, perlu dibatasi pengertian "wilayah" yakni ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Dalam kerangka pembangunan nasional, perencanaan pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil perbedaan pertumbuhan kemakmuran antar wilayah atau antar daerah. Di samping itu, diusahakan untuk memperkecil perbedaan kemakmuran antara perkotaan dan pedesaan (UU No. 26 Tahun 2007).

2.1.3 Teori Perencanaan

Perencanaan merupakan dasar fundamental manajemen yang terlebih dahulu dibuat dan direncanakan untuk masa akan datang, agar resiko yang ditanggung relatif kecil. Robbins dan Coulter (2010) mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Sebelum manajer dapat mengorganisasi, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, manajer memutuskan “apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.”

Perencanaan menurut Newman adalah “*planning is deciding in advance what is to be done.*” Jadi, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan (Manullang, 2008). Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Hasibuan, 2011).

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa perencanaan adalah gambaran tentang apa-apa yang akan dilakukan mulai dari penetapan tujuan, strategi untuk mencapai tujuan hingga sistem perencanaan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tujuan bisa tercapai. Hal ini sekaligus menjawab juga apa saja yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan siapa yang akan melakukannya.

Yoeti (2006) menyebutkan bahwa ada beberapa alasan mengapa perencanaan sangat diperlukan, yaitu:

1) Memberikan Pengarahan

Dengan adanya perencanaan para pelaksana dalam suatu organisasi atau tim dapat mengetahui apa yang akan dilakukan, ke arah mana akan dituju dan apa yang akan dicapai.

2) Membimbing Kerjasama

Perencanaan dapat membimbing para petugas atau pelaksana untuk tidak berkerja menurut kemauannya sendiri. Dengan adanya perencanaan, para petugas dan pelaksana merasa sebagai bagian dari sebuah tim, dan bergantung pada tugas lainnya.

3) Menciptakan koordinasi

Dalam suatu organisasi atau proyek banyak keahlian dibutuhkan, apabila masing-masing keahlian berjalan terpisah kemungkinan tujuan dari organisasi atau proyek tersebut tidak akan tercapai, oleh karena itu sangat diperlukan adanya koordinasi antara beberapa keahlian dan kegiatan yang akan dilakukan.

4) Menjamin tercapainya kemajuan

Perencanaan pada umumnya mengariskan suatu program yang hendak dilakukan meliputi tugas yang dikerjakan dan tanggung jawab tiap individu atau tim dalam suatu organisasi atau proyek. Apabila terdapat penyimpangan antara yang direncanakan dengan pelaksanaannya hal tersebut dapat dihindarkan dengan melakukan koreksi, sehingga akan mempercepat penyelesaian suatu proyek atau kegiatan.

5) Memperkecil Resiko

Perencanaan meliputi pengumpulan data yang relevan (baik yang tersedia maupun yang tidak tersedia) dan secara hati-hati, menelaah segala kemungkinan yang terjadi sebelum mengambil suatu keputusan. Suatu keputusan yang diambil atas dasar intuisi tanpa melakukan penelitian pasar atau tanpa melakukan perhitungan *rates of return on invesment*, sangat memungkinkan akan menghadapi resiko besar. Oleh karena itu perencanaan dapat memperkecil resiko yang akan timbul di kemudian hari.

6) Mendorong pelaksanaan

Perencanaan dilakukan agar suatu organisasi dapat memperoleh kemajuan secara sistematis dalam mencapai hasil yang diinginkan melalui

inisiatif sendiri. Disamping hal tersebut dalam suatu perencanaan diperlukan suatu kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian untuk mengetahui data yang perlu dikumpulkan, memerlukan tujuan yang hendak dicapai terlebih dahulu, sedangkan untuk mencapai suatu tujuan (*objectives*) diperlukan suatu pemikiran (*thought*) yang khusus.

Salah satu bagian atau kegiatan dalam perencanaan adalah menentukan strategi yang akan digunakan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Umar (2012) menyatakan bahwa pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga level atau tingkatan strategi sebagai berikut.

1) Strategi Korporasi atau Strategi Perusahaan

Strategi korporasi atau strategi perusahaan adalah strategi yang menggambarkan arah perusahaan atau organisasi secara keseluruhan, mengenai sikap perusahaan terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk maupun jasa untuk mencapai keseimbangan portofolio.

2) Strategi Bisnis atau Strategi Bersaing

Strategi bisnis atau strategi bersaing biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan atau organisasi dalam industri khusus atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut.

3) Strategi Fungsional

Strategi fungsional adalah strategi yang menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktivitas, strategi fungsional dikembangkan untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi guna memperbaiki kinerja perusahaan atau organisasi.

Hunger dan Wheelen (2003) menyebutkan bahwa proses manajemen strategis meliputi empat elemen dasar sebagai berikut.

1) Pengamatan Lingkungan (*Environmental Scanning*)

Pengamatan dilakukan terhadap lingkungan eksternal untuk melihat kesempatan dan ancaman, serta lingkungan internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan. Faktor-faktor yang paling penting untuk masa depan perusahaan disebut faktor-faktor strategis.

2) Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen yang efektif dari peluang dan ancaman lingkungan yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi penentuan misi perusahaan, tujuan yang akan dicapai, pengembangan strategi dan menetapkan pedoman kebijakan.

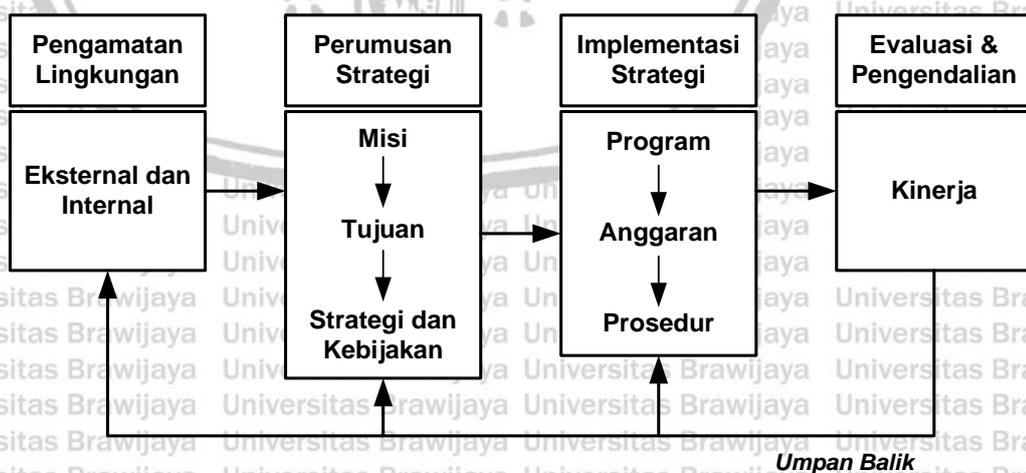
3) Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Proses tersebut meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan.

4) Evaluasi dan pengendalian

Evaluasi dan pengendalian adalah proses monitor dan perbandingan kinerja antara kinerja yang sesungguhnya dengan kinerja yang diinginkan. Informasi hasil perbandingan tersebut dapat digunakan dalam melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah, selain itu evaluasi dan pengendalian juga dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong perbaikan strategi.

Alur proses manajemen strategis sebagaimana penjelasan tersebut ditampilkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1.

Proses Manajemen Strategis (Hunger dan Wheelen, 2003)

2.1.4 Teori Pengelolaan

Istilah pengelolaan erat hubungannya dengan manajemen. Manajemen merupakan bentuk terjemahan dari kata *management* yang berasal dari Bahasa Inggris yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti pengelolaan. Terry (2013) menyatakan bahwa manajemen meliputi empat proses yaitu *planning* atau perencanaan, *organizing* atau pengorganisasian, *actuating* atau pelaksanaan dan *controlling* atau pengendalian. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengelolaan diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan secara berkelanjutan.

Terry (2013) menjelaskan pengertian pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari penjelasan beberapa definisi pengelolaan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah serangkaian kebijakan yang diambil atau dilakukan yang memuat mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk menghasilkan tujuan tertentu yang sudah ditetapkan. Unsur-unsur pengelolaan menurut Terry (2013) adalah:

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana hal tersebut menyangkut tempat, oleh siapa atau siapa yang melaksanakan dan bagaimana tata cara mencapai hal tersebut. Perencanaan merupakan suatu proses yang dilakukan terus menerus setiap kali timbul sesuatu yang baru, untuk mempersiapkan serangkaian keputusan dalam melakukan tindakan untuk mencapai tujuan dalam organisasi, dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Sebuah perencanaan yang baik

adalah yang dilakukan secara rasional, sistematis dan analitis serta dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah-langkah selanjutnya.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam suatu organisasi diperlukan adanya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan dalam organisasi orang-orang yang dipilih harus memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melakukan tugas atau posisi tertentu. Oleh karena itu perlu dalam pengorganisasian yang perlu diperhatikan adalah proses perekrutan, penempatan, pemberian pelatihan dan pengembangan anggota-anggota dalam sebuah organisasi.

3) Pelaksanaan atau Pengarahan (*Actuating*)

Pelaksanaan atau pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginan yang telah ditentukan dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan secara efektif demi kepentingan jangka Panjang perusahaan, termasuk didalamnya memberitahukan kepada orang apa yang harus dilakukan dengan tujuan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan atau pengarahan juga berarti bahwa pimpinan atau manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer atau pimpinan tidak melakukan semua kegiatan sendiri melainkan menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain, dan menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan dengan baik. Fungsi pengarahan dan pelaksanaan adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi.

4) Pengendalian (*Controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur kegiatan yang sedang atau sudah dilakukan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah semua kegiatan telah dapat

dilaksanakan dan berjalan sesuai rencana, apa hambatan dalam pelaksanaan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi.

Dengan demikian, perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaanya sangat diperlukan dalam memberikan arah dan patokan dalam suatu kegiatan. Pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap selanjutnya adalah pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

2.1.5 Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

2.1.5.1 Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan pada awalnya muncul karena perhatian kepada lingkungan. Terutama sumberdaya alam yang tidak bisa diperbaharui sedangkan eksploitasi dilakukan terus menerus. Di sisi lain, konsep pembangunan berkelanjutan lahir didasarkan kepada kenyataan bahwa kebutuhan manusia terus meningkat. Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan baru yang menyepakati suatu pendekatan yang terintegrasi/terpadu terhadap pembangunan yang menggabungkan sekaligus pilar pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup. Konsep pembangunan berkelanjutan menuntut tanggungjawab moral untuk memberikan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, perlu adanya perlakuan secara khusus dalam memanfaatkan sumberdaya alam dengan pengalokasian sumberdaya secara adil sepanjang waktu untuk menjamin kesejahteraan generasi berikutnya.

Istilah pembangunan berkelanjutan telah memasuki perbendaharaan kata para ahli serta masyarakat setelah diterbitkannya laporan mengenai pembangunan dan lingkungan serta sumberdaya alam. Laporan ini diterbitkan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan - PBB (*UN World Commission on Environment and Development - WCED*) yang diketuai oleh Harlem Brundtland, dalam laporan tersebut didefinisikan istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya (Siregar, 2004).

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan dari kesepakatan multidimensional untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik untuk semua orang dimana pembangunan ekonomi, sosial dan proteksi lingkungan saling memperkuat dalam pembangunan. Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Inti dari definisi ini adalah fokus pada sebuah pembangunan bagi generasi masa kini dan masa mendatang (Bond *et al*, 2001).

Pembangunan berkelanjutan mengandung 2 (dua) gagasan penting yaitu pertama, gagasan kebutuhan yaitu kebutuhan esensial yang memberlanjutkan kehidupan manusia. Kedua, gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan. setiap elemen pembangunan berkelanjutan diuraikan menjadi empat hal yaitu: pemerataan dan keadilan sosial, keanekaragaman, integratif dan perspektif jangka panjang (Djajadiningrat dan Famiola, 2004).

The 2002 World Summit on Sustainable Development atau KTT Pembangunan Berkelanjutan, menandai perluasan lebih lanjut dari definisi standar

dengan menggunakan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yang telah banyak digunakan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Deklarasi Johannesburg menciptakan tanggung jawab kolektif untuk meningkatkan dan memperkuat saling ketergantungan dan pilar pembangunan berkelanjutan yang saling memperkuat yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan, pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Dengan demikian, KTT Pembangunan Berkelanjutan lebih menekankan kepada batasan-batasan kerangka kerja dari lingkungan dan pembangunan, dimana pembangunan secara luas dilihat sebagai pembangunan ekonomi. Bagi yang berada dibawah payung pembangunan berkelanjutan, seperti definisi yang lebih sempit dikaburkan oleh keprihatinan mereka untuk pembangunan manusia, kesetaraan, dan keadilan sosial (WSSD, 2002).

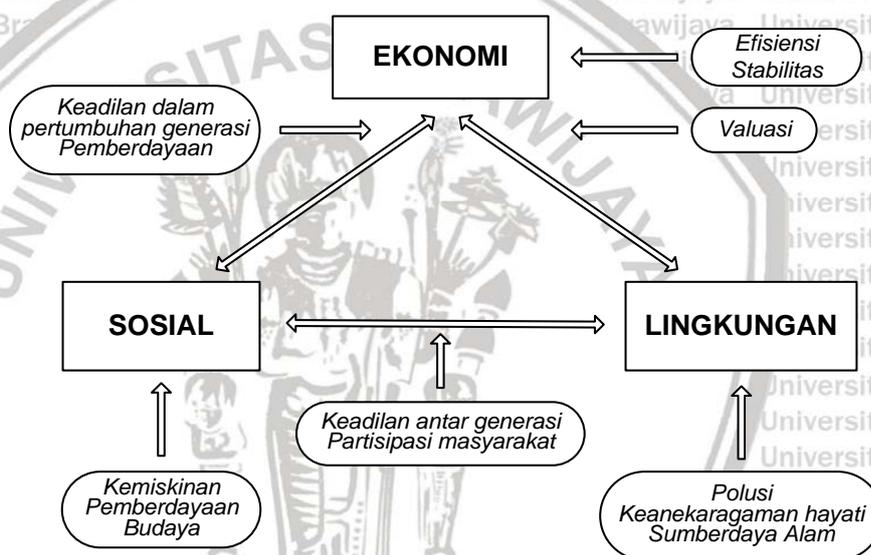
Pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dengan pemanfaatan ruang wilayah beserta potensi sumberdaya yang ada bagi tujuan pembangunan manusia atau masyarakat itu sendiri. Untuk itu, hal yang berkaitan dengan upaya pelayanan kepada masyarakat dalam optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah harus dianalisis secara dinamis. Pembangunan yang dititikberatkan pada segi kebutuhan kualitas hidup manusia dalam pemanfaatan ruang wilayah, meliputi masalah pemenuhan kebutuhan dasar, pengentasan kemiskinan; perubahan pola konsumsi termasuk energi dinamika kependudukan dan pertumbuhan wilayah; pengelolaan dan peningkatan kesehatan; serta pengembangan perumahan dan permukiman. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, dan masyarakat) yang berprinsip "*memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan*" (Sugandhy, et al., 2009).

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan; Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga

lingkup kebijakan, yaitu : 1) pembangunan ekonomi; 2) pembangunan sosial; dan 3) perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan (UNESCO, 2001).

Pengertian ini dapat dipahami bahwa konsep pembangunan berkelanjutan didirikan atau didukung oleh 3 (tiga) pilar, yaitu: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Ketiga pendekatan tersebut bukanlah pendekatan yang berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Secara skematis, keterkaitan dimaksud dapat digambarkan sebagaimana berikut ini.



Sumber : UNESCO (2001)

Gambar 2.2.

Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Fauzi dan Anna (2005) menyatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan sumberdaya yang berkelanjutan mengandung aspek:

- 1) *Ecological sustainability* (keberlanjutan ekologi). Dalam pandangan ini pemanfaatan sumberdaya alam hendaknya tidak melewati batas daya dukungnya. Peningkatan kapasitas dan kualitas ekosistem menjadi hal yang utama

2) *Socioeconomic sustainability* (keberlanjutan sosio-ekonomi). Konsep ini mengandung makna bahwa pembangunan sumberdaya perlu memperhatikan keberlanjutan dari kesejahteraan, pemanfaatan sumberdaya pada tingkat individu.

3) *Community sustainability*; mengandung makna bahwa keberlanjutan kesejahteraan dari sisi komunitas atau masyarakat perlu menjadi perhatian pembangunan sumberdaya yang berkelanjutan

4) *Institusional sustainability* (keberlanjutan kelembagaan). Dalam kerangka ini keberlanjutan kelembagaan yang menyangkut memelihara aspek finansial dan administrasi yang sehat merupakan prasyarat dari ketiga pembangunan berkelanjutan di atas.

Siregar (2004) menjelaskan ada 3 (tiga) aset dalam pembangunan berkelanjutan yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan infrastruktur.

1) Sumberdaya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

2) Sumberdaya manusia adalah semua potensi yang terdapat pada manusia seperti akal pikiran, seni, dan keterampilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya.

3) Sedangkan infrastruktur adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan semaksimalnya, baik untuk saat ini maupun keberlanjutannya di masa yang akan datang.

Siregar (2004) menjelaskan ada 3 (tiga) aset dalam pembangunan berkelanjutan yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan infrastruktur.

Sumberdaya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumberdaya manusia adalah semua potensi yang terdapat pada manusia seperti akal pikiran, seni, dan keterampilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya. Sedangkan infrastruktur adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumberdaya

alam dan sumberdaya manusia dengan semaksimalnya, baik untuk saat ini maupun keberlanjutannya di masa yang akan datang.

Budimanta (2005) menyatakan bahwa untuk proses pembangunan berkelanjutan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Cara berpikir yang integratif. Dalam konteks ini, pembangunan haruslah melihat keterkaitan fungsional dari kompleksitas antara sistem alam, sistem sosial dan manusia di dalam merencanakan, mengorganisasikan maupun melaksanakan pembangunan tersebut.
- 2) Pembangunan berkelanjutan harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Hingga saat ini yang banyak mendominasi pemikiran para pengambil keputusan dalam pembangunan adalah kerangkapik jangka pendek, yang ingin cepat mendapatkan hasil dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Kondisi ini sering kali membuat keputusan yang tidak memperhitungkan akibat dan implikasi pada jangka panjang.
- 3) Mempertimbangkan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa sumberdaya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang. Yang tak kalah pentingnya adalah juga pengakuan dan perawatan keanekaragaman budaya yang akan mendorong perlakuan yang merata terhadap berbagai tradisi masyarakat sehingga dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.
- 4) Distribusi keadilan sosial ekonomi. Dalam konteks ini dapat dikatakan pembangunan berkelanjutan menjamin adanya pemerataan dan keadilan sosial yang ditandai dengan meratanya sumberdaya lahan dan faktor produksi yang lain, lebih meratanya akses peran dan kesempatan kepada setiap warga masyarakat, serta lebih adilnya distribusi kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi.

Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang harus mempertimbangkan lima prinsip, yaitu: (1) abiotik lingkungan, (2) biotik lingkungan, (3) nilai-nilai budaya, (4) sosiologi, dan (5) ekonomi. (Bosshard, 2000). Kesepakatan *Indonesian Summit on Sustainable Development* (ISSD) di Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 2004, meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang merupakan satu kesatuan dan bersifat saling ketergantungan dan saling memperkuat (Adiez, 2008).

2.1.5.2 Sasaran Pembangunan Berkelanjutan

Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup upaya untuk mewujudkan terjadinya :

- 1) Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumberdaya alam yang *unreplaceable*.
- 2) *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- 3) Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- 4) Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).
- 5) Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- 6) Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan ini perlu adanya perencanaan dan perancangan yang bersifat ekologis dengan melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan-kawasan di kota tersebut, proses-proses yang terjadi di dalam masyarakat dan lingkungannya. Sistem pengelolaan lingkungan juga harus memerlukan indikator kinerja (*performance indicator*). Indikator kinerja pembangunan berkelanjutan telah dilakukan di berbagai negara di dunia ini. PBB divisi pembangunan berkelanjutan (UN, 2001) telah menyusun indikator pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Indikator-indikator Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

No.	Kategori Indikator	Parameter
Indikator Sosial		
1.	Kemiskinan	- Jumlah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan - Indeks gini ketidakadilan pendapatan - Tingkat pengangguran
2.	Kesehatan	- Status gizi anak-anak - Tingkat kematian anak-anak di bawah 5 tahun - Tingkat harapan hidup - Persentase penduduk yang memiliki saluran pembuangan limbah (MCK) - Immunisasi - Tingkat pemakaian alat kontrasepsi
3.	Tingkat Pendidikan	- Tamat SD - Tamat SMP - Angka buta huruf
4.	Kondisi rumah tempat tinggal	- Luas rumah/jiwa
5.	Kriminalitas	- Jumlah kriminalitas per 100.000 penduduk
6.	Kependudukan	- Tingkat pertumbuhan penduduk. - Pemukiman penduduk formal dan informal di perkotaan
Indikator Lingkungan		
1.	Perubahan Iklim	Emisi gas rumah kaca
2.	Berlubangnya lapisan ozon	Tingkat konsumsi zat yang merusak lapisan ozon
3.	Kualitas Air	Konsentrasi pencemaran air ambien di perkotaan.
4.	Pertanian	- Peruntukan lahan pertanian. - Penggunaan pupuk. - Penggunaan pestisida untuk pertanian.
5.	Kehutanan	- Persentase lahan untuk hutan. - Intensitas pengambilan kayu.
6.	Pengurangan	- Lahan yang menjadi gurun.
7.	Perkotaan	- Pemukiman penduduk formal dan informal di perkotaan.
8.	Pesisir	- Konsentrasi algae di laut. - Persentase dari total penduduk menetap di pesisir.
9.	Kuantitas Air Bersih	- Persentase air yang diambil dari ABT dan APU dari air yang tersedia setiap tahun.
10.	Kualitas Air Bersih	- BOD di badan air. - Konsentrasi Bakteri Coli pada air bersih
11.	Spesies	Kelimpahan spesies terpilih

No.	Kategori Indikator	Parameter
Indikator Ekonomi		
1.	Kinerja ekonomi	GDP perkapita
2.	Perdagangan	Keseimbangan perdagangan barang dan jasa.
3.	Status keuangan	GNP
4.	Konsumsi material	Intensitas penggunaan material
5.	Penggunaan Energi	- Konsumsi penggunaan energy per kapita/tahun. - Intensitas penggunaan energi. - Pembagian konsumsi sumberdaya energy yang dapat diperbaharui.
6.	Manajemen Sampah	- Sampah industri dan sampah padat. - Limbah B3. - Sampah Radioaktif. - Penggunaan kembali dan recycle sampah.
Indikator Kelembagaan		
1.	Implementasi strategi pembangunan berkelanjutan	Pembangunan Berkelanjutan Nasional.
2.	Kerjasama Internasional	Implementasi dari ratifikasi perjanjian global
3.	Akses Informasi	Jumlah internet yang terdaftar per 1000 penduduk.
4.	Komunikasi	Jumlah nomor telepon per 1000 penduduk.
5.	Infrastruktur	
6.	Sains dan teknologi	Persentase biaya litbang dibandingkan dengan GDP.
7.	Persiapan dan tanggung jawab terhadap bencana	Kerugian manusia akibat bencana.

Sumber: UN (2001)

2.1.5.3 Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan didasarkan pada 4 (empat) empat prinsip dasar (Angelevska-Najdeska & Rakicevik, 2012), yaitu:

- 1) Prinsip pelestarian lingkungan, dimana dalam pengembangan agar disesuaikan pemeliharaan ekologi, sumberdaya keanekaragaman hayati dan biologi.
- 2) Prinsip keberlanjutan sosial, merupakan pengembangan yang disesuaikan dengan nilai-nilai tradisional dan penguatan identitas dari masyarakat.
- 3) Prinsip keberlanjutan budaya, menyediakan pengembangan budaya yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya komunitas masyarakat.

- 4) Prinsip keberlanjutan ekonomi, pengembangan ekonomi dengan menggunakan biaya dan sumberdaya yang efektif untuk dikelola dengan tujuan generasi saat ini dan generasi yang akan datang.

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan menurut Mitchell, *et al.* (2000) adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip lingkungan/ekologi, meliputi: (a) melindungi sistem penunjang kehidupan; (b) melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik, (c) memelihara dan meningkatkan integritas ekosistem, serta mengembangkan dan menetapkan ukuran-ukuran rehabilitasi untuk ekosistem yang sangat rusak, (d) mengembangkan dan menerapkan strategi yang preventif dan adaptif untuk menanggapi ancaman perubahan lingkungan global.
- 2) Prinsip Sosio-Politik, meliputi : (a) mempertahankan skala fisik dari kegiatan manusia di bawah daya dukung biosfer, (b) mengenali biaya lingkungan dari kegiatan manusia; mengembangkan metode untuk meminimalkan pemakaian energi dan material per unit kegiatan ekonomi; menurunkan emisi gas beracun; merehabilitasi ekosistem yang rusak; (c) meyakinkan adanya kesamaan sosio-politik dan ekonomi dalam transisi menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan; (d) menjadikan perhatian-perhatian lingkungan lebih langsung dan menerus pada proses pembuatan keputusan secara politis; (e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, interpretasi, dan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan; dan menjalin kegiatan politik lebih langsung pada pengalaman lingkungan serta aktual melalui alokasi kekuatan politik yang secara lingkungan lebih bermakna keadilan (Mitchell, *et al.*, 2000).

Implikasi positif dari prinsip tersebut dalam implementasi pembangunan berkelanjutan, ialah: 1) Mengarus-utamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan; 2) Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah; 3) Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan kebijakan lingkungan dan implementasinya secara konsisten; 4) Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan; 5) Meningkatkan kapasitas lembaga

pengelola lingkungan hidup baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana; 6) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; 7) Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana (Hardjasoemantri, 2005).

2.1.6 Pariwisata

2.1.6.1 Pengertian Pariwisata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mendefinisikan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Komponen-komponen penting untuk diperhatikan dalam pengembangan destinasi pariwisata (*tourism product designing*) adalah sebagai berikut (Sunaryo, 2013):

1) Atraksi dan Daya Tarik Wisata

Atraksi dan daya tarik wisata seringkali diklasifikasikan berdasarkan pada jenis dan temanya, yaitu biasanya dibagi menjadi tiga jenis tema daya tarik wisata sebagai berikut: daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata minat khusus. Berbagai jenis atraksi dan daya tarik wisata tadi mempunyai kedudukan yang sangat

penting pada sisi produk wisata, terutama dalam rangka menarik kunjungan wisatawan ke destinasi.

a) Daya tarik wisata alam;

Daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada *anugrah* keindahan dan keunikan yang telah tersedia di alam, seperti: Pantai dengan keindahan pasir putihnya, deburan gelombang ombak serta akses pandangnya terhadap matahari terbit atau tenggelam, Laut dengan aneka kekayaan terumbu karang maupun ikanya, Danau dengan keindahan panoramanya, Gunung dengan daya tarik *vulcano* nya, maupun Hutan dan Sabana dengan keaslian *flora* dan *faunanya*, Sungai dengan kejernihan air dan kedasyatan arusnya, Air terjun dengan panorama kecuramannya, dan lain sebagainya.

b) Daya tarik wisata budaya;

Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada hasil karya dan hasil cipta manusia, baik yang berupa peninggalan budaya (*situs/heritage*) maupun yang nilai budaya yang masih hidup (*the living culture*) dalam kehidupan di suatu masyarakat, yang dapat berupa: upacara/ritual, adat-istiadat, seni-pertunjukan, seni-kriya, seni-sastra maupun seni-rupa dan keunikan kehidupan sehari-hari yang dipunyai oleh suatu masyarakat. Beberapa contoh daya tarik wisata budaya di Indonesia yang banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah: *Situs* (warisan budaya yang berupa: benda, bangunan, kawasan, struktur dsb), Museum, Desa tradisional, Kawasan *Kota lama*, Monumen Nasional, Sanggar Seni, Pertunjukan, Event, Festival, Seni kriya, Adat istiadat maupun karya karya teknologi modern.

c) Daya tarik wisata minat khusus;

Daya tarik wisata *minat khusus* (*special interest*) adalah daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada aktivitas untuk pemenuhan keinginan wisatawan secara spesifik, seperti: pengamatan satwa tertentu (*birds watching*), memancing (*fishing*), berbelanja (*shopping*), kesehatan dan penyegaran badan (*spa and rejuvenation*), arung jeram, Golf (*sports*), *wisata agro*, *Gambling/casino*, menghadiri pertemuan, rapat, perjalanan *incentive*

dan pameran atau yang dikenal sebagai wisata MICE (*meeting, incentive, conference and exhibition*) dan aktivitas-aktivitas wisata minat khusus lainnya yang biasanya terkait dengan hobi atau kegemaran seseorang wisatawan.

2) Amenitas atau Akomodasi

Komponen produk berikutnya yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah fasilitas amenities. Yang dimaksud dengan fasilitas amenities atau akomodasi dalam pengertian ini adalah berbagai jenis fasilitas dan kelengkapannya yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk beristirahat dan bersantai dengan nyaman serta *menginap* selama melakukan kunjungan ke suatu destinasi.

Fasilitas akomodasi pariwisata ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas komplementernya seperti restoran, kolam renang, bar maupun fasilitas *entertainment* yang lain dan dibedakan kedalam berbagai jenis dan tingkatan yang merentang mulai dari: *home stay*, penginapan/hotel *non bintang (melati)*, hotel berbintang, yang biasanya dibedakan berdasarkan tingkatannya mulai dari hotel bintang 1 (satu) sampai dengan hotel berbintang 5, maupun jenis-jenis akomodasi khusus seperti: resort, *rumah panggung* di hutan ataupun *rumah tenda (caravan)* untuk kebutuhan berkemah (*camping*) maupun *home stay*.

3) Aksesibilitas dan Transportasi

Aksesibilitas dan transportasi dalam pengertian ini adalah segenap fasilitas dan *moda angkutan* yang memungkinkan dan memudahkan serta membuat nyaman wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Beberapa jenis aksesibilitas dan fasilitas transportasi tadi biasanya dibedakan ke dalam berbagai *matra* yang meliputi: *Matra transportasi darat* termasuk kereta api dan angkutan penyeberangan; *Matra transportasi laut* termasuk kapal pesiarnya dan *Matra transportasi udara* dengan penerbangan komersial maupun penerbangan charter (*charter flight*), yang semuanya berfungsi sebagai sarana dan fasilitas pendukung bagi pergerakan wisatawan dari satu tempat ke tempat lainnya.

4) Infrastruktur Pendukung

Keseluruhan jenis fasilitas umum yang berupa prasarana fisik seperti: komponen pendukung perhubungan seperti pelabuhan (*seaport*), bandara (*airport*), stasiun kereta api dan jaringan telekomunikasi serta beberapa

fasilitas fisik yang lain seperti jaringan listrik, air minum, toilet dan sebagainya.

5) Fasilitas Pendukung Wisata Lainnya

Fasilitas pendukung wisata lainnya merupakan berbagai jenis fasilitas pendukung kepariwisataan yang berfungsi memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan selama melakukan kunjungan di suatu destinasi, seperti: keamanan, rumah makan, biro perjalanan, toko cinderamata, pusat informasi wisata, rambu wisata, fasilitas perbelanjaan, hiburan malam, fasilitas perbankan, dan beberapa skema kebijakan khusus yang diadakan untuk mendukung kenyamanan bagi wisatawan dalam kunjungannya di destinasi.

6) Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Pariwisata

Kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata adalah keseluruhan unsur organisasi atau institusi pengelola kepariwisataan dan termasuk sumberdaya manusia pendukungnya, yang terkait dengan manajemen pengelolaan kepariwisataan di suatu destinasi, baik dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Kelembagaan dan SDM pariwisata yang memegang peranan penting dalam manajemen pengelolaan kepariwisataan di Indonesia antara lain Dinas Pariwisata beserta keseluruhan Unit Pelaksana Teknisnya, Asosiasi Industri Perjalanan Wisata (ASITA), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Jasa Pemanduan Wisata, Kelompok Sadar Wisata maupun Masyarakat Pariwisata yang terkait dengan kepariwisataan, baik sebagai tenaga kerja, pelaku usaha maupun sebagai *tuan rumah (host)* dalam suatu destinasi.

Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar-putar, berulang-ulang atau berkali-kali yang dilakukan baik secara individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

2.1.6.2 Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Perkembangan pengelolaan wisata menimbulkan banyak pemikiran, termasuk pemikiran pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang diawali dengan pemikiran kesalahan di masa lalu dan menciptakan kesadaran untuk kondisi masa depan. Pariwisata tidak hanya berorientasi terhadap pendapatan devisa atau kesempatan peluang kerja yang besar akan tetapi dapat menghadirkan sesuatu yang baru baik bagi wisatawan, masyarakat dan terutama terhadap alam. Pariwisata akan menguntungkan dan berdaya guna apabila semua komponen mengembangkan sikap untuk menghargai lingkungan dan sosial budaya sesuai dengan konsep *sustainable development* yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial budaya dan lingkungan.

Ide pembangunan pariwisata berkelanjutan pertama kali dicetuskan *International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN 1980)* dengan *World Conservation Strategi*-nya. Pembangunan pariwisata berkelanjutan mempertemukan kebutuhan wisatawan dan daerah penerima hari ini sekaligus mempertahankan dan meningkatkan peluang untuk masa depan.

Semua ini dipertimbangkan sebagai pengarah untuk mengelola semua sumber-sumber sedemikian rupa agar kebutuhan ekonomi, social, budaya, dan nilai estetika terpenuhi sembari mempertahankan integritas budaya, proses ekologi pokok, keanekaragaman biologi dan sistem pendukung hidup (IUCN, 2005).

Pariwisata berkelanjutan adalah keberlanjutan pariwisata terkait erat dengan kebutuhan wisata saat ini yang tidak boleh mengorbankan dan mengurangi hak dan kebutuhan generasi yang akan datang. Isu pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan terpampung di dalam kesepakatan bangsa-bangsa di dunia pada KTT Bumi yang diselenggarakan oleh UNCED (*United Nation Conference on Environment and Development*) yang lebih dikenal sebagai Rio Summit. Berbagai kesepakatan dalam Rio Summit tahun 1992 dievaluasi

dalam konferensi Johannesberg tahun 2002 yang mempertegas implementasi pembangunan berkelanjutan di segala bidang. KTT Bumi menghasilkan 5 (lima) butir kesepakatan yang erat kaitannya dengan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan yang mencakup : Deklarasi Rio, Konservasi Perubahan Iklim, Konservasi Keanekaragaman Hayati, Prinsip-prinsip Kehutanan dan Agenda 21. Prinsip-prinsip dan sasaran-sasaran dari piagam tersebut adalah: (UNCED, 1992)

- 1) Pembangunan pariwisata harus berdasarkan kriteria keberlanjutan dapat didukung secara ekologis dalam waktu yang lama, layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial bagi masyarakat setempat;
- 2) Pariwisata harus berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya dan manusia;
- 3) Pemerintah dan otoritas yang kompeten dengan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dengan masyarakat setempat harus mengambil tindakan untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata sebagai kontribusi kepada pembangunan berkelanjutan;
- 4) Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan dan memperkuat bantuan, langsung atau tidak langsung kepada proyek-proyek pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kualitas lingkungan;
- 5) Ruang-ruang dengan lingkungan dan budaya yang rentan saat ini maupun di masa depan harus diberi prioritas khusus dalam hal kerja sama teknis dan bantuan keuangan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan. Promosi atau dukungan terhadap berbagai bentuk alternatif pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
- 6) Pemerintah harus mendukung dan berpartisipasi dalam penciptaan jaringan untuk penelitian, diseminasi informasi dan transfer pengetahuan tentang pariwisata dan teknologi pariwisata berkelanjutan;
- 7) Penetapan kebijakan pariwisata berkelanjutan memerlukan dukungan dan sistem pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, studi kelayakan untuk transformasi sektor dan pelaksanaan berbagai proyek percontohan dan pengembangan program kerjasama internasional.

Berkaitan dengan upaya menemukan keterkaitan antara aktifitas pariwisata dan konsep pembangunan berkelanjutan Cronin (Sharpley,

2009) mengkonsepkan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai pembangunan yang terfokus pada dua hal, keberlanjutan pariwisata sebagai aktivitas ekonomi di satu sisi dan lainnya mempertimbangkan pariwisata sebagai elemen kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Stabler dan Goodall dalam Sharpley (2009) menyatakan pembangunan pariwisata berkelanjutan harus konsisten dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sharpley (2009) menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah hubungan triangulasi yang seimbang antara daerah tujuan wisata (*host areas*) dengan habitat dan manusianya, pembuatan paket liburan (wisata), dan industri pariwisata, dimana tidak ada satupun stakeholder dapat merusak keseimbangan. Kebijakan konsep pariwisata berkelanjutan difokuskan pada peningkatan kualitas 4 (empat) empat pilar, diantaranya yaitu: ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya)

- 1) Memanfaatkan secara optimal sumberdaya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata. Kemudian senantiasa mempertahankan pentingnya proses ekologi dan membantu melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati.
- 2) Menghormati keaslian budaya (otentisitas) masyarakat setempat. Sekaligus juga berusaha melestarikan bentuk-bentuk bangunan asli masyarakat setempat (*heritage*) baik rumah tinggal atau apapun itu. Melestarikan warisan budaya asli dan nilai-nilai tradisional.
- 3) Menjaga toleransi masyarakat setempat dan juga memberikan kontribusi untuk pemahaman toleransi antar budaya.
- 4) Memastikan kelayakan secara ekonomi dalam jangka waktu yang panjang (*long term*), memberikan manfaat sosial ekonomi bagi semua pemangku kepentingan yang terdistribusi dengan baik, termasuk pekerjaan yang stabil (tetap). Di samping itu menumbuhkan peluang pendapatan atau sumber mata pencaharian dari pariwisata, pelayanan sosial bagi masyarakat lokal serta membantu mengurangi kemiskinan (UNWTO, 2011).

Keempat pilar tersebut harus dapat berjalan secara berdampingan dan saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Bila salah satu dari keempat pilar tersebut tidak berjalan dengan baik, atau salah satu pilar saja yang ditonjolkan, maka akan terjadi ketidakseimbangan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang tidak jarang menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan atau *Sustainable Tourism Development* menurut Yaman dan Mohd (2004:584) ditandai dengan 4 kondisi, yaitu :

- 1) Anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunan pariwisata.
- 2) Pendidikan bagi tuan rumah, pelaku industri dan pengunjung/wisatawan.
- 3) Kualitas habitat kehidupan liar, penggunaan energi dan iklim mikro harus dimengerti dan didukung.
- 4) Investasi pada bentuk-bentuk transportasi alternative.

Lebih lanjut Yaman dan Mohd (2004) menyatakan bahwa indikator yang dikembangkan pemerintah RI tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan (Agenda 21 sektoral, 2000) adalah:

- 1) Kesadaran tentang tanggung jawab terhadap lingkungan, bahwa strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan harus menempatkan pariwisata sebagai *green industry* (industri yang ramah lingkungan), yang menjadi tanggungjawab pemerintah, industri pariwisata, masyarakat dan wisatawan.
- 2) Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata.
- 3) Kemantaban/keberdayaan industri pariwisata yaitu mampu menciptakan produk pariwisata yang bisa bersaing secara internasional, dan mensejahterakan masyarakat di tempat tujuan wisata.
- 4) Kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang bertujuan meminimalisir perbedaan tingkat kesejahteraan wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan wisata untuk menghindari konflik dan dominasi satu sama lain. Hal ini juga didukung dengan memberi perhatian/pengembangan usaha skala kecil oleh masyarakat lokal.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh *World Commission for Environmental and Development (WCED)* (2002:36) sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Sejalan dengan konsep tersebut, *Agenda 21 for the travel tourism industry; toward sustainable development* menjabarkan konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, sebagai pemenuhan kebutuhan wisatawan dan daerah penerima pada saat ini, sambil melindungi dan mendorong kesempatan untuk waktu yang akan datang. Mengarah pada pengelolaan seluruh sumberdaya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika dapat terpenuhi sambil memelihara integritas kultural, proses ekologi esensial, keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan. Produk pariwisata berkelanjutan yang dioperasikan secara harmonis dengan lingkungan lokal, masyarakat, dan budaya, sehingga mereka menjadi penerima keuntungan yang permanen dan bukan korban pembangunan kepariwisataan (KLH, 2001).

Makna pariwisata yang berkelanjutan memperlihatkan sebuah konsep yang memaduserasikan dan mengintegrasikan antara nilai-nilai sosial-budaya, ekologi dan ekonomi dalam konteks pembangunan dimana ekowisata merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan tersebut sesuai dengan pernyataan *the Quebec Declaration on Ecotourism* yang menyatakan bahwa ekowisata "*embraces the principles of sustainable tourism... and the following principles which distinguish it from the wider concept of sustainable tourism*". Karenanya ekowisata dijadikan *benchmark* bagi pembangunan karena dapat memberikan keuntungan ekonomis, ekologis dan sosial yang besar, dan tidak merusak alam bila dibandingkan dengan industri lainnya (Quebec Declaration, 2002).

2.1.7 Ekowisata

2.1.7.1 Pengertian Ekowisata

Salah satu bagian pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai turunan dari konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan adalah konsep pengembangan ekowisata (*ecotourism*). Ekowisata lebih dari sekedar kelompok pecinta alam yang berdedikasi, sebagai gabungan berbagai kepentingan yang muncul dari kepedulian terhadap masalah sosial, ekonomi dan lingkungan. Bagaimana membuat devisa masuk kembali sehingga konservasi alam dapat membiayai dirinya sendiri merupakan inti dari cabang baru ilmu ekonomi hijau pembangunan berkelanjutan ini.

Istilah ekowisata baru muncul dan mulai banyak diperbincangkan oleh para pelaku wisata berdasarkan refleksi kegiatan perjalanan masa lalu, seperti Darwin ke Galapagos, Humbolt, Bates, Wallace. Perjalanan Marcopolo, Tomi Pires, Weber, Junghuhn dan Van Steenis yang bersifat antar pulau dan antar benua yang penuh dengan tantangan untuk mempelajari kondisi alam secara makro, akan tetapi perjalanan tersebut masih saja dikategorikan sebagai *adventure tourism* serta umum dilakukan oleh peneliti dan para petualang lainnya, sehingga sama dengan istilah lainnya seperti *nature based tourism*, *cultural tourism*, *back to nature tourism*, tanpa adanya nilai-nilai konservasi, penghargaan kepada alam, spesies langka (Fandeli dan Nurdin, 2005).

Ekowisata merupakan sebuah terminologi baru yang masih mencari jati diri, sebagai sebuah konsep pariwisata yang berkelanjutan, ekowisata telah merubah paradigma berwisata secara gradual di berbagai belahan dunia dan telah menjadi mode baru dalam pengembangan pariwisata (Epplerwood, 2004; UNEP, 2002). Ekowisata adalah suatu bentuk wisata berbasis alam yang berupaya melestarikannya secara ekologis, sosial budaya, dan ekonomi dengan

menyediakan kesempatan penghargaan dan pembelajaran tentang lingkungan alami atau unsur-unsur spesifik lainnya (Weaver, 2001:105).

Ekowisata merupakan wisata berorientasi pada lingkungan untuk menjembatani kepentingan perlindungan sumberdaya alam dan industri kepariwisataan (META, 2002). Ekowisata adalah bentuk wisata yang mengedepankan pengalaman pembelajaran dan penghargaan terhadap lingkungan alami, atau beberapa komponennya, dalam konteks budaya yang berkaitan dengannya. Ekowisata memiliki keunggulan (dalam praktek terbaiknya) dalam kelestarian lingkungan dan sosial budaya, terutama dalam meningkatkan basis sumberdaya alam dan budaya dari destinasi dan mempromosikan pertumbuhan (Dowling dan Fennell 2003:3).

The International Ecotourism Society mendefinisikan ekowisata sebagai suatu bentuk perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke kawasan alami yang dilakukan dengan tujuan menkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Ekowisata memperlihatkan kesatuan konsep yang terintegratif secara konseptual tentang keseimbangan antara menikmati keindahan alam, sosial budaya, dan lingkungannya serta upaya mempertahankannya sehingga pengertian ekowisata dapat dilihat sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, ekowisata merupakan konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Green Tourism Association mendefinisikan ekowisata sebagai suatu pembangunan pariwisata yang memiliki empat pilar atau atribut, yaitu: (Yoeti, 2006:26)

- 1) *Environmental responsibility*; mengandung pengertian proteksi, konservasi atau perluasan sumberdaya alam dan lingkungan fisik untuk menjamin kehidupan jangka panjang dan keberlanjutan ekosistem;
- 2) *Local economic vitality*; mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi lokal, bisnis dan komunitas untuk menjamin kekuatan ekonomi dan keberlanjutan (sustainability) misalnya dampak dari pembangunan lokasi wisata biasanya akan diikuti oleh maraknya kegiatan ekonomi lokal;
- 3) *Cultural sensitivity*; mendorong timbulnya penghormatan dan apresiasi terhadap adat istiadat dan keragaman budaya untuk menjamin kelangsungan budaya lokal yang baik misalnya melalui wisata budaya, maka orang akan mengenal budaya daerah atau negara lain dan menimbulkan penghormatan atas kekayaan budaya tersebut;
- 4) *Experiential richness*; menciptakan atraksi yang dapat memperkaya dan meningkatkan pengalaman yang lebih memuaskan, melalui partisipasi aktif dalam memahami personal dan keterlibatan dengan alam, manusia, tempat dan/atau budaya (Yoeti, 2006:26)

Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (2009), menerangkan bahwa ekowisata dapat diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah, di mana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam. Para pelaku dan pakar di bidang ekowisata sepakat untuk menekankan bahwa pola ekowisata sebaiknya meminimalkan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan budaya setempat dan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat dan nilai konservasi. Beberapa aspek kunci dalam ekowisata adalah (1) Jumlah pengunjung terbatas atau diatur supaya sesuai dengan daya dukung; (2) lingkungan dan sosial-budaya masyarakat; (3) Pola wisata ramah lingkungan (nilai

konservasi); (4) Pola wisata ramah budaya dan adat setempat (nilai edukasi dan wisata); (5) Membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal (nilai ekonomi); dan (6) Modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur tidak besar (nilai partisipasi masyarakat dan ekonomi).

Sumberdaya ekowisata terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dapat diintegrasikan menjadi komponen terpadu bagi pemanfaatan wisata. Berdasarkan konsep pemanfaatan, wisata dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu: (Fandeli, 2009; META, 2002; dan Yulianda, 2007)

- 1) Wisata alam (*nature tourism*), merupakan aktivitas wisata yang ditujukan pada pengalaman terhadap kondisi alam atau daya tarik panoramanya.
- 2) Wisata budaya (*cultural tourism*), merupakan wisata dengan kekayaan budaya sebagai obyek wisata dengan penekanan pada aspek pendidikan.
- 3) Ekowisata (*ecotourism, green tourism* atau *alternative tourism*), merupakan wisata berorientasi pada lingkungan untuk menjembatani kepentingan perlindungan sumberdaya alam/lingkungan dan industri kepariwisataan.

Ekowisata menawarkan kesatuan nilai berwisata yang terintegrasi antara keseimbangan menikmati keindahan alam dan upaya melestarikannya.

Ekowisata ini dapat berperan aktif di dalam memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi dalam pengembangan kawasan pariwisata. Fokus utama dari pengembangan model ekowisata tersebut didasarkan atas potensi dasar kepariwisataan dimana kelestarian alam dan budaya dikedepankan (Dirawan, 2008:139)

2.1.7.2 Prinsip Dasar Ekowisata

Prinsip dasar pembangunan pariwisata berkelanjutan menurut Sharpley (2000:9-11) yang mengacu pada prinsip dasar pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan yang holistik sangat penting untuk diterapkan secara umum, pada sistem pariwisata itu sendiri dan khusus pada individu di daerah tujuan wisata atau sektor industri. Selama ini meskipun pariwisata diterima dan terintegrasi dalam

strategi pembangunan nasional dan lokal, namun fokus utama pembangunan pariwisata berkelanjutan masih ke arah produk center. Tidak heran jika pada tingkat operasional sulit mengatur penerimaan yang kompleks, fragmentasi, pembagian multisektor dari keuntungan pariwisata secara alamiah.

Sharpley (2000:9) menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan dalam prakteknya cenderung terfokus eksklusif setempat, proyek pembangunan relatif berskala kecil, jangkauannya jarang melebihi wilayah/lingkungan lokal atau regional, atau sebagai sektor industri yang spesifik/khusus. Pada saat yang bersamaan, sektor yang berbeda dari industri pariwisata mengalami perkembangan dalam berbagai tingkat, mengadopsi kebijakan lingkungan dan meski kecil telah menunjukkan filosofi bisnis dan pembangunan yang mengarah pada prinsip-prinsip keberlanjutan antar industri. Menurut Sharpley peningkatan kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan sangat tergantung pada variasi faktor politik ekonomi yang dapat menghalangi diterapkannya pembangunan pariwisata berkelanjutan.

United Nation World Tourism Organization dalam McKercher (2003) menerangkan ada 4 (empat) prinsip dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, yaitu:

- 1) Keberlanjutan secara ekonomi, pemenuhan manfaat ekonomi untuk kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang;
- 2) Keberlanjutan secara ekologi, pembangunan yang mendukung keberadaan keragaman hayati, pemenuhan akan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang lestari.
- 3) Keberlanjutan budaya, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat bertanggung jawab penuh terhadap hidupnya dengan melalui penguatan identitas lokal;
- 4) Keberlanjutan masyarakat lokal, penguatan terhadap keberadaan masyarakat lokal dengan keterlibatan secara aktif dalam usaha pengembangan pariwisata.

Berbagai *workshop* dan diskusi yang diselenggarakan pada tahun tersebut di berbagai daerah di Indonesia baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, dirumuskan 5 (lima) prinsip dasar pengembangan ekowisata di Indonesia yaitu: (Zalukhu dan Meyers, 2009)

1) Pelestarian

Prinsip kelestarian pada ekowisata adalah kegiatan ekowisata yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan budaya setempat. Salah satu cara menerapkan prinsip ini adalah dengan cara menggunakan sumberdaya local yang hemat energi dan dikelola oleh masyarakat sekitar. Tak hanya masyarakat, tapi wisatawan juga harus menghormati dan turut serta dalam pelestarian alam dan budaya pada daerah yang dikunjunginya.

2) Pendidikan

Kegiatan pariwisata yang dilakukan sebaiknya memberikan unsur pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain dengan memberikan informasi menarik seperti nama dan manfaat tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar daerah wisata, dedaunan yang dipergunakan untuk obat atau dalam kehidupan sehari-hari, atau kepercayaan dan adat istiadat masyarakat lokal. Kegiatan pendidikan bagi wisatawan ini akan mendorong upaya pelestarian alam maupun budaya. Kegiatan ini dapat didukung oleh alat bantu seperti brosur, buklet atau papan informasi.

3) Pariwisata

Pariwisata adalah aktivitas yang mengandung unsur kesenangan dengan berbagai motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu lokasi. Ekowisata juga harus mengandung unsur ini. Oleh karena itu, produk dan, jasa pariwisata yang ada di daerah kita juga harus memberikan unsur kesenangan agar layak jual dan diterima oleh pasar.

4) Perekonomian

Ekowisata juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat terlebih lagi apabila perjalanan wisata yang dilakukan menggunakan sumberdaya lokal seperti transportasi, akomodasi dan jasa pemandu. Ekowisata yang dijalankan harus memberikan pendapatan dan keuntungan bagi penduduk sekitar sehingga dapat terus berkelanjutan.

5) Partisipasi masyarakat setempat

Partisipasi masyarakat akan timbul, ketika alam/budaya itu memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat. Agar bisa memberikan manfaat maka alam/budaya itu harus dikelola dan dijaga.

Begitulah hubungan timbal balik antara atraksi wisata-pengelolaan manfaat yang diperoleh dari ekowisata dan partisipasi.

Konsep wisata yang berbasis ekologi atau yang lebih dikenal dengan ekowisata dilatarbelakangi dengan perubahan pasar global yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada negara-negara asal wisatawan. Ekowisata memiliki ekspektasi lebih mendalam dan lebih berkualitas dalam melakukan perjalanan wisata dan konsep wisata ini disebut wisata minat khusus (Fandeli, 2009).

Ekowisata merupakan suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sehingga memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Secara konseptual ekowisata menekankan pada prinsip dasar sebagai berikut yang terintegrasi:

1) Prinsip konservasi

Pengembangan ekowisata harus mampu memelihara, melindungi dan atau berkontribusi untuk memperbaiki sumberdaya alam. Memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhdap pelestarian lingkungan alam dan budaya, melaksanakan kaidah-kaidah usaha yang bertanggung jawab dan ekonomi berkelanjutan.

a) Prinsip Konservasi Alam

Memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian alam serta pembangunan harus mengikuti kaidah ekologis.

Kriteria Konservasi Alam antara lain

- Memperhatikan kualitas daya dukung lingkungan kawasan tujuan, melalui permintakatan (zonasi).
- Mengelola jumlah pengunjung, sarana dan fasilitas sesuai dengan daya dukung lingkungan daerah tujuan.
- Meningkatkan kesadaran dan apresiasi para pelaku terhadap lingkungan alam dan budaya.

- Memanfaatkan sumberdaya secara lestari dalam penyelenggaraan kegiatan ekowisata.

- Meminimumkan dampak negatif yang ditimbulkan, dan bersifat ramah lingkungan.

- Mengelola usaha secara sehat.

b) Prinsip Konservasi Budaya

Peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat. Kriteria konservasi budaya antara lain :

- Menerapkan kode etik ekowisata bagi wisatawan, pengelola dan pelaku usaha ekowisata.

- Melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak lainnya (multi stakeholders dalam penyusunan kode etik wisatawan, pengelola dan pelaku usaha ekowisata.

- Melakukan pendekatan, meminta saran-saran dan mencari masukan dari tokoh/pemuka masyarakat setempat pada tingkat paling awal sebelum memulai langkah-langkah dalam proses pengembangan ekowisata.

- Melakukan penelitian dan pengenalan aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat sebagai bagian terpadu dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata.

2) Prinsip partisipasi masyarakat

Pengembangan harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat serta peka dan menghormati nilai-nilai social budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat setempat di sekitar kawasan. Kriteria :

a) Melakukan penelitian dan perencanaan terpadu dalam pengembangan ekowisata.

b) Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata.

c) Menggugah prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat untuk pengembangan ekowisata.

d) Memberi kebebasan kepada masyarakat untuk bias menerima atau menolak pengembangan ekowisata.

e) Menginformasikan secara jelas dan benar konsep dan tujuan pengembangan ekowisata.

f) Membuka kesempatan untuk melakukan dialog dengan seluruh pihak yang terlibat (multi-stakeholders) dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata.

g) Membentuk kerjasama dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dilanggarnya peraturan yang berlaku.

3) Prinsip ekonomi

Pengembangan ekowisata harus mampu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya untuk memastikan bahwa daerah yang masih alami dapat mengembangkan pembangunan yang berimbang (*balance development*) antara kebutuhan pelestarian lingkungan dan kepentingan semua pihak. Pengembangan Ekowisata juga harus mampu memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat setempat dan berkelanjutan.

Kriteria :

a) Membuka kesempatan kepada masyarakat setempat untuk membuka usaha ekowisata dan menjadi pelaku-pelaku ekonomi kegiatan ekowisata baik secara aktif maupun pasif.

b) Memberdayakan masyarakat dalam upaya peningkatan usaha ekowisata untuk kesejahteraan penduduk setempat.

c) Meningkatkan ketrampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang berkaitan dan menunjang pengembangan ekowisata.

d) Menekan tingkat kebocoran pendapatan (*leakage*) serendah-rendahnya.

e) Meningkatkan pendapatan masyarakat.

4) Prinsip edukasi

Pengembangan ekowisata harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah sikap atau perilaku seseorang menjadi memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Pengembangan ekowisata juga harus meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya, serta memberikan nilai tambah dan pengetahuan bagi pengunjung, masyarakat dan para pihak yang terkait. Kriteria pengembangan dan produk ekowisata harus :

- a) Mengoptimalkan keunikan dan kekhasan daerah sebagai daya tarik wisata.
- b) Memanfaatkan dan mengoptimalkan pengetahuan tradisional berbasis pelestarian alam dan budaya serta nilai-nilai yang dikandung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai nilai tambah.
- c) Mengoptimalkan peran masyarakat sebagai interpreter lokal dari produk ekowisata.
- d) Memberikan pengalaman yang berkualitas dan bernilai bagi pengunjung.
- e) Dikemas ke dalam bentuk dan teknik penyampaian yang komunikatif dan inovatif.

5) Prinsip wisata

Pengembangan ekowisata harus dapat memberikan kepuasan pengalaman kepada pengunjung untuk memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan. Selain itu pengembangan ekowisata juga harus mampu menciptakan rasa aman, nyaman dan memberikan kepuasan serta menambah pengalaman bagi pengunjung. Kriteria :

- a) Mengoptimalkan keunikan dan kekhasan daerah sebagai daya tarik wisata.
- b) Membuat Standar Prosedur Operasi (SPO) untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- c) Menyediakan fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan pengunjung, kondisi setempat dan mengoptimalkan kandungan material lokal.
- d) Memprioritaskan kebersihan dan kesehatan dalam segala bentuk pelayanan, baik fasilitas maupun jasa.
- e) Memberikan kemudahan pelayanan jasa dan informasi yang benar.
- f) Memprioritaskan keramahan dalam setiap pelayanan.

J. Stephen *et al* (2000) meringkas konsep dasar ekowisata menjadi lima prinsip inti, yakni berbasis alam, berkelanjutan secara ekologis, lingkungan edukatif, dan lokal wisatawan bermanfaat dan menghasilkan kepuasan.

1) Nature based (Berbasis alam)

Pengembangan ekowisata *ecotourism* didasarkan pada lingkungan alam dengan fokus pada lingkungan biologi, fisik dan budaya.

2) *Ecologically sustainable (Berkelanjutan secara ekologis)*

Ecotourism dapat memberikan acuan terhadap pariwisata secara keseluruhan dan dapat membuat ekologi yang berkesinambungan.

3) *Environmentally educative (Pendidikan Lingkungan)*

Pengembangan ekowisata harus mengandung unsur pendidikan atau perilaku seseorang menjadi memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan.

4) *Locally beneficial (Manfaat bagi Masyarakat Lokal)*

Pengembangan *ecotourism* harus dapat menciptakan keuntungan yang nyata bagi masyarakat sekitar. Pengembangan harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat serta peka dan menghormati nilai-nilai social budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat di sekitar kawasan.

5) *Generates tourist satisfaction (Menghasilkan kepuasan wisatawan)*

Pengembangan ekowisata harus mampu memberikan kepuasan pengalaman kepada pengunjung untuk memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan.

Selain lima prinsip di atas dalam penerapan pengembangan ekowisata, juga diharuskan para pengelola dan pengembang untuk memperhatikan aspek legalitas di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, serta mengembangkan pola kemitraan antar pihak (J. Stephen *et al*, 2000).

1) Aspek Legalitas

Memperhatikan perjanjian, peraturan, perundang-undangan khususnya di tingkat lokal, regional dan nasional, maupun internasional. Kriteria memperhatikan :

- a) Peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat setempat maupun peraturan adat.
- b) Peraturan-peraturan tentang tata ruang di tingkat daerah, propinsi dan nasional.
- c) Peraturan-peraturan/undang-undang kepariwisataan yang berlaku di tingkat Daerah, Propinsi dan Nasional.
- d) GBHN Pariwisata
- e) Peraturan-peraturan/undang-undang lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam.

- f) Dokumen-dokumen internasional yang mengikat (Agenda 21, Habitat Agenda, *Sustainable Tourism*, dsb).
- g) Sanksi atas pelanggaran dan secara konsekuen melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Kemitraan

Konsep ekowisata pada dasarnya mendorong adanya kerjasama antara pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu pola-pola kemitraan antara pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat perlu terus ditingkatkan. Kerjasama yang lebih sinergi, adaptif antara pelaku ekowisata merupakan hal yang esensial untuk mendorong keberhasilan pengembangan ekowisata di Indonesia.

Wiranatha (2006) menjelaskan ada 9 (sembilan) prinsip ekowisata dalam lokakarya Pelatihan Ekowisata Nasional di Bali 25-26 Agustus 2006. Kesembilan prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat. Prinsip ini menetapkan kriteria-kriteria sebagai berikut :
 - a) Sistem pengelolaan yang serasi dan seimbang sesuai dengan konsep masyarakat setempat.
 - b) Pembangunan dan operasional disesuaikan dengan tata krama, norma setempat dan kearifan lokal.
 - c) Keberadaan dan kegiatan objek ekowisata tidak mengganggu aktivitas keagamaan masyarakat setempat.
- 2) Memiliki kepedulian, komitmen dan tanggung jawab terhadap konservasi alam dan warisan budaya. Prinsip ini menetapkan kriteria-kriteria sebagai berikut :
 - a) Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan.
 - b) Penggunaan teknologi ramah lingkungan.
 - c) Pemanfaatan areal warisan budaya sebagai objek ekowisata disesuaikan dengan peruntukkan dan fungsinya.
 - d) Melestarikan keanekaragaman hayati dan cagar budaya sesuai dengan daya dukung setempat.
 - e) Memperhatikan keberadaan endemisitas.
- 3) Menyediakan interpretasi yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam dan meningkatkan kecintaanya terhadap alam.

- a) Menyediakan pramuwisata profesional dan berlisensi.
 - b) Menyediakan fasilitas pendukung dan informasi yang memadai terkait dengan objek ekowisata.
 - c) Melibatkan lembaga adat setempat.
- 4) Edukasi; ada proses pembelajaran dialogis antara masyarakat dengan wisatawan.
- a) Melibatkan unsur akademis, pemerhati lingkungan, serta lembaga terkait (langsung atau tidak langsung).
 - b) Memberikan pemahaman mengenai keanekaragaman hayati, cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal.
 - c) Menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap alam dan budaya.
- 5) Pengembangannya harus didasarkan atas persetujuan masyarakat setempat melalui musyawarah.
- a) Perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pengawasannya perlu mendapat persetujuan masyarakat setempat.
 - b) Melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat dalam setiap tahap pengembangannya.
 - c) Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat, lingkungan, dan perusahaan.
- 6) Memberdayakan dan mengoptimalkan partisipasi serta sekaligus memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat setempat.
- a) Memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja lokal sesuai dengan keahlian.
 - b) Memprioritaskan pemanfaatan produk lokal untuk operasional objek ekowisata.
 - c) Melibatkan lembaga adat/tradisional serta tokoh masyarakat setempat.
- 7) Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- a) Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Mentaati dan menghormati kearifan lokal yang dianut masyarakat setempat.
- 8) Konsisten memberikan kepuasan kepada konsumen.
- a) Memberikan pelayanan informasi yang akurat kepada konsumen.

- b) Menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan prima kepada konsumen.
 - c) Memanfaatkan masyarakat setempat sebagai local guide.
 - d) Menyediakan fasilitas dan media untuk memperoleh umpan balik dari konsumen.
- 9) Dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur dan akurat sehingga sesuai dengan harapan pemasaran yang bertanggung jawab.
- a) Materi pemasaran harus akurat, jelas, berkualitas, dan sesuai dengan kenyataan.
 - b) Materi pemasaran harus melalui media promosi yang dipilih sesuai dengan target market

Ekowisata dinyatakan sebagai perjalanan yang bertanggung jawab secara ekologis, mengunjungi wilayah yang masih asli, untuk menikmati dan menghargai keindahan alam (termasuk kebudayaan lokal) dan mempromosikan konservasi, memiliki efek negatif paling minimum dan menyediakan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata. Tentu saja bahwa tidak setiap daerah yang dikembangkan sebagai obyek wisata lokal dapat dijadikan sebagai wisata massal. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan dari daya dukung lingkungan, ada pembatasan daerah yang perlu dikunjungi dan memiliki tipologi tidak cocok dikembangkan untuk wisata masal.

Weaver (2001) menunjukkan hubungan saling menguntungkan antara ekowisata, wisata masal, dan kawasan lindung untuk menguatkan bahwa wisata massal tidak bertentangan dengan ekowisata, seperti penjelasan berikut ini.

- 1) Terdapat hubungan yang menguntungkan antara wisata massal terhadap ekowisata, apabila:
- wisata massal mampu menyumbangkan wisatawan dalam jumlah besar
 - membawa manfaat ekonomi yang dapat digunakan untuk penerapan pariwisata berkelanjutan
 - mampu memberikan kontribusi bagi competitor yang memanfaatkan sumberdaya alam yang cenderung merusak.

2) Terdapat hubungan yang menguntungkan antara ekowisata terhadap wisata massal, apabila:

- memberikan kontribusi pada diversifikasi dari produk wisata massal
- aktif dalam meningkatkan pasar wisata berlabel "green tourism".
- lebih jauh mengekspos prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan ekowisata untuk program wisata berkelanjutan yang paling utama perlu diperhatikan adalah kesadaran masing-masing komponen yang terkait dalam ekowisata tersebut, mulai dari wisatawan, tour operatornya, pengelola kawasan wisata tersebut, termasuk masyarakat sekitar. Yang tidak kalah penting adalah pemerintah agar mempunyai kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang ekowisata berkelanjutan. Pariwisata akan berkembang, kadang-kadang sangat cepat, seperti saat ini baru sepersepuluh penduduk dunia berwisata. Tugas kita adalah tidak untuk membatasi meningkatnya wisatawan tapi bagaimana mengelola keberadaan wisatawan, lingkungan daerah tujuan wisata dan masyarakat penerima wisatawan. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa ekowisata sebagai bentuk pariwisata masa depan akan dapat berjalan, walaupun akan banyak masalah yang timbul, untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan, sosial budaya dan ekonomi di daerah tujuan wisata.

2.1.7.3 Ekowisata Bahari

Ekowisata bahari memiliki konsep bahwa pengelolaan suatu kawasan yang ditujukan untuk tujuan dan fungsi wisata alam dengan memasukkan konsep pendidikan, penelitian, konservasi, dan wisata menjadi satu fungsi bersama.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pengertian Wisata Bahari atau Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. Undang-undang tersebut juga menjelaskan mengenai kawasan pesisir dan

kawasan bahari. Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. Kawasan bahari adalah jenis pariwisata alternatif yang berkaitan dengan kelautan, baik di atas permukaan laut maupun kegiatan yang dilakukan di bawah permukaan laut.

Ekowisata bahari merupakan jenis wisata minat khusus yang memiliki aktivitas yang berkaitan dengan kelautan, baik yang dilakukan di bawah laut maupun di atas permukaan laut. Secara umum, ekowisata bahari mencakup tiga kawasan, yaitu di permukaan laut, di bawah laut dan di pesisir pantai. Ekowisata bahari merupakan wisata lingkungan (*eco-tourism*) yang berlandaskan daya tarik bahari di lokasi atau kawasan yang didominasi perairan atau kelautan. Ekowisata Bahari, menyajikan ekosistem alam khas laut berupa hutan mangrove, taman laut, serta berbagai fauna, baik fauna di laut maupun sekitar pantai (Yulius *et al.*, 2018).

Ekowisata bahari merupakan pengembangan dari kegiatan wisata bahari yang menjual daya tarik alami yang ada di suatu wilayah pesisir dan lautan baik secara langsung atau tidak langsung. Adapun kegiatan wisata bahari yang dapat dinikmati secara langsung, meliputi kegiatan *diving*, *snorkeling*, berenang, berperahu, dan lain sebagainya. Sementara kegiatan wisata bahari yang dinikmati secara tidak langsung, seperti olah raga pantai dan piknik dengan menikmati pemandangan pesisir dan lautan (Nurisyah, 2001).

Yulius, *et al.* (2018) menyebutkan bahwa ada tiga prinsip dasar dalam pengelolaan Kawasan Ekowisata Bahari. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- 1) Prinsip *Co-ownership*, yaitu bahwa kawasan ekowisata bahari adalah milik bersama untuk itu ada hak-hak masyarakat di dalamnya yang harus diakui namun juga perlindungan yang harus dilakukan bersama.
- 2) Prinsip *Co operation atau co management*, yaitu kepemilikan bersama mengharuskan, pengelolaan pesisir untuk dilakukan bersama-sama seluruh komponen masyarakat (*stakeholder*) yang terdiri atas

pemerintah, masyarakat dan organisasi swadaya masyarakat (LSM) yang harus bekerja sama termasuk pihak swasta yang terlibat.

- 3) Prinsip *Co responsibility*, yaitu keberadaan kawasan ekowisata bahari menjadi tanggung jawab bersama karena pengelolaan kawasan ekowisata bahari merupakan tujuan bersama.

Konsep ekowisata bahari sangat menghargai potensi sumberdaya lokal dan mencegah terjadinya perubahan dalam kepemilikan wilayah, tatanan sosial, serta budaya dalam masyarakat lokal karena masyarakat sangat berperan sebagai pelaku dan juga penerima manfaat secara langsung dan juga mendukung berkembangnya kondisi ekonomi secara berkelanjutan karena terciptanya lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.7.4 Wisata Rekreasi Pantai

Wisata rekreasi pantai merupakan wisata yang dilakukan pengunjung dengan pantai sebagai objek utama wisata. Aktivitas yang dilakukan pengunjung pada wisata rekreasi pantai umumnya bersantai, bermain air, atau berenang di tepi pantai (Hidayat, 2011), serta menikmati pemandangan dan panorama alam, seperti matahari terbit (*sunrise*) ataupun matahari terbenam (*sunset*) (Sanam dan Adikampana, 2014). Kesesuaian wisata pantai kategori rekreasi mempertimbangkan 10 parameter dengan empat klasifikasi penilaian. Parameter kesesuaian wisata pantai kategori rekreasi, yaitu kedalaman perairan, tipe pantai, lebar pantai, material dasar perairan, kecepatan arus, kemiringan pantai, penutupan lahan pantai, biota berbahaya, dan ketersediaan air tawar (Yulius, et al, 2018).

Wisata rekreasi pantai memerlukan kedalaman perairan yang relatif dangkal dengan arus yang cenderung tenang yang aman bagi pengunjung untuk bersantai ataupun bermain di tepi pantai. Tipe pantai yang cocok untuk wisata rekreasi pantai, umumnya pantai pasir putih karena tipe pantai ini lebih bernilai

estetika. Pantai yang cukup lebar cocok untuk wisata rekreasi pantai karena menyediakan ruang yang cukup luas bagi pengunjung untuk bersantai. Material dasar perairan berupa pasir lebih disukai pengunjung dibanding berkarang atau berlumpur. Kemiringan pantai yang landai lebih aman bagi pengunjung dibanding pantai yang curam. Penutupan lahan pantai yang lebih terbuka dengan pohon kelapa memberi nilai estetika yang lebih tinggi untuk wisata pantai dibanding dengan semak belukar, pemukiman atau pelabuhan. Pantai yang memiliki biota berbahaya kurang cocok sebagai pantai wisata karena berbahaya bagi pengunjung. Ketersediaan air tawar diperhitungkan dalam kriteria wisata rekreasi pantai karena merupakan kebutuhan bagi pengunjung (Yulius, *et al*, 2018).

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya serta memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Kajian terhadap penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai penjelasan awal untuk melakukan penelusuran dan pengujian empiris terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini. Selebihnya, penelitian terdahulu akan dipergunakan sebagai salah satu referensi sekaligus masukan dalam penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut selanjutnya dijelaskan berikut ini.

1. **Andronicus et al., (2016)** dengan penelitian berjudul "**Kajian Keberlanjutan Pengelolaan Ekowisata Berbasis Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Pesisir Desa Bahoi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara**".

Tujuan penelitian ini adalah menilai keberlanjutan pengelolaan wisata di Pesisir Desa Bahoi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara melalui penyusunan indeks keberlanjutan pengelolaan wisata dari setiap indikator-indikator dimensi pengelolaan sebagai rekomendasi kebijakan pengelolaan wisata.

Pengumpulan data 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi ekologi, dimensi sosial dan budaya, serta dimensi pengelolaan dilakukan wawancara dengan menggunakan kuisisioner kepada *stakeholder*. Metode analisis data menggunakan metode *Multidimensional Scaling* (MDS) pendekatan RAPFISH.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan pesisir Desa Bahoi termasuk kategori cukup berkelanjutan. Untuk meningkatkan keberlanjutan peneglolaan perlu dibuat beberapa kebijakan dan sosialisasi yang dapat meningkatkan upaya pengelolaan pesisir Desa Bahoi. Kebijakan bisa berupa pembuatan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran aturan-aturan desa terhadap pengelolaan pesisir. Sosialisasi dapat berupa pengenalan pentingnya menjaga lingkungan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya melakukan pengawasan menjadi salah satu cara. Masyarakat menjadi kunci dari pengelolaan, dimana komponen sosial menjadi faktor penunjang bagi keberlangsungan ekologi. Kebijakan yang berlaku di masyarakat dapat diperkuat dengan menjadikan pengelolaan pesisir kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dengan memasukan regulasi pengelolaan pesisir kedalam RPJMDes menjadikan peneglolaan yang sudah berlangsung menjadi lebih kuat ditingkat masyarakat. Dan sebagai acuan ketinggian pemerintah di atasnya.

2. Suddin, Simon (2017), dengan penelitian berjudul “Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis potensi sumberdaya pengembangan ekowisata; (2) mengkaji status pengembangan ekowisata berkelanjutan; dan (3) menyusun strategi pengembangan ekowisata berkelanjutan di Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan. Metode pengumpulan data untuk tujuan penelitian kedua dilakukan dengan

melibatkan partisipasi pakar (*judgment expert*) sebanyak 25 orang dengan distribusi masing-masing dimensi 5 orang sesuai kompetensi pakar. Metode pengumpulan data untuk tujuan ketiga melibatkan para *stakeholder* sebanyak 15 orang. Metode analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif pada tujuan penelitian pertama, metode MDS pendekatan *Rap-EcoBoti* (modifikasi RAPFISH) untuk tujuan penelitian kedua, dan Metode Analisis Prospektif Partisipatif (*Participatory Prospective Analysis*) untuk tujuan penelitian ketiga. *Rap-EcoBoti* dipergunakan untuk menilai status dimensi-dimensi dan multidimensi ekowisata, yakni (1) Dimensi Lingkungan, (2) Dimensi Ekonomi, (3) Dimensi Sosial-Budaya, (4) Dimensi Aksesibilitas, Infrastruktur, dan Utilitas, serta (5) Dimensi Kelembagaan. Metode Analisis Prospektif Partisipatif (*Participatory Prospective Analysis*) dipergunakan untuk menyusun strategi pengembangan ekowisata berkelanjutan di Suku Boti.

Hasil-hasil penelitian dengan menyimpulkan bahwa Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) secara multidimensi memiliki status kurang berkelanjutan. Sementara itu untuk masing-masing dimensi, sebagai berikut:

- a. Dimensi Lingkungan memiliki status cukup berkelanjutan dengan faktor-faktor pengungkit berupa: (1) keanekaragaman fauna, (2) zonasi kawasan wisata, (3) sumber mata air, (4) iklim, (5) curah hujan, (6) kelembaban udara.
- b. Dimensi Ekonomi memiliki status kurang berkelanjutan dengan faktor-faktor pengungkit berupa: (1) peluang pekerjaan, (2) pengembangan jasa wisata lain, dan (3) diversifikasi usaha.
- c. Dimensi Sosial-Budaya memiliki status cukup berkelanjutan dengan faktor-faktor pengungkit berupa: (1) atraksi wisata budaya, (2) situs sejarah, (3) perlindungan warisan budaya, (4) muatan edukasi, (5) pendidikan dan pelatihan pariwisata, (6) penerapan sains dan teknologi, dan (7) konservasi budaya.
- d. Dimensi aksesibilitas, infrastuktur, dan utilitas memiliki status tidak berkelanjutan dengan faktor-faktor pengungkit berupa: (1) sarana dan

prasarana wisata, (2) akses transportasi, (3) akomodasi, (4) air bersih, dan (5) fasilitas kesehatan.

- e. Dimensi Kelembagaan status kurang berkelanjutan dengan faktor-faktor pengungkit berupa: (1) regulasi pemerintah, (2) hukum adat, (3) peran lembaga adat, (4) peran sektor swasta, dan (5) lembaga swadaya masyarakat.

Staregi pengembangan ekowisata berkelanjutan di Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) adalah (1) Penguatan Norma/Hukum Adat, (2) Implementasi Peraturan/Regulasi Ekowisata, (3) Penetapan Zonasi Kawasan Ekowisata, (4) Konservasi, (5) Pembangunan Infrastruktur, (6) Perbaikan Aksesibilitas, (7) Penggalan Sumber Pendanaan, (8) Pemberdayaan Masyarakat, (9) Riset Pengembangan Ekowisata, (10) Peran Lembaga Adat/Masyarakat, (11) Peran Pemerintah, (12) Peran Swasta, dan (13) Penerapan Bauran Pemasaran Ekowisata.

3. **Muhsoni, et al., (2017) dengan penelitian berjudul “Coral Reefs Ecotourism Sustainability Management in The Gili Labak Island Using Rapfish Method”.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur status keberlanjutan dalam pengelolaan Pulau Gili Labak dengan mempertimbangkan faktor-faktor multidimensi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuisiner dengan melibatkan partisipasi pakar (*judgment expert*) sebanyak 15 orang, masing-masing dimensi sebanyak 3 orang sesuai kompetensi masing-masing. Metode analisis data menggunakan MDS pendekatan RAPFISH untuk menilai status keberlanjutan dimensi ekologi, sumberdaya, ekonomi, sosial, serta hukum dan kelembagaan.

Hasil analisis RAPFISH menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan pulau Gili Labak, untuk dimensi ekologis menunjukkan indeks 62,3

(cukup berkelanjutan), dimensi sumberdaya menunjukkan indeks 63,07 (cukup berkelanjutan), dimensi ekonomi dengan indeks 10,15 (tidak berkelanjutan), dimensi sosial dengan indeks 17,8 (tidak berkelanjutan) serta dimensi hukum dan kelembagaan dengan indeks 5,36 (tidak berkelanjutan). Status multidimensi menunjukkan indeks 34,24 (kurang berkelanjutan). Rekomendasi disampaikan kepada para stakeholder untuk melakukan perbaikan atribut-atribut pada masing-masing yang bernilai rendah, khususnya atribut pada dimensi hukum dan kelembagaan, dimensi ekonomi dan dimensi sosial.



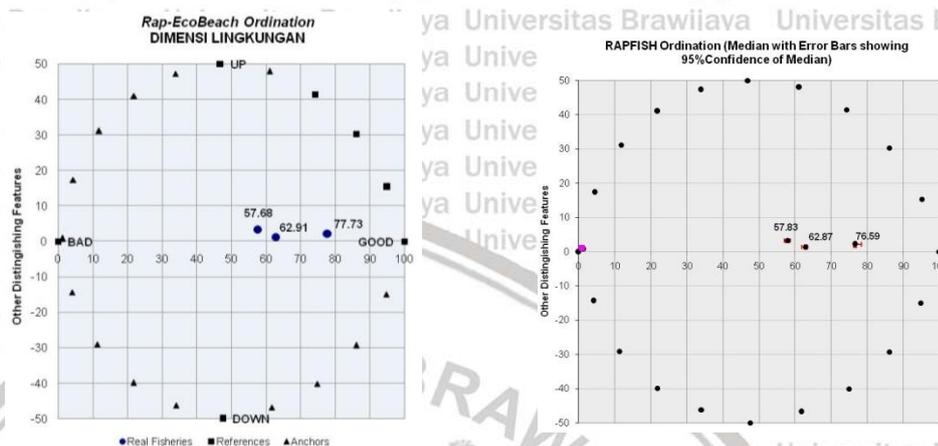
BAB VI**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****6.1 Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang**

Pengukuran terhadap indeks dan status pengembangan ekowisata berkelanjutan pada ketiga lokasi, yakni pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan dimensi-dimensi keberlanjutan berikut atribut-atributnya untuk kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode *Multidimensional Scaling* (MDS) pendekatan *Rap-EcoBeach* (Modifikasi RAPPFISH). Dimensi dan atribut keberlanjutan itu sendiri adalah sebagai berikut: (1) Dimensi Lingkungan, jumlah atribut 10 buah; (2) Dimensi Ekonomi, jumlah atribut 8 buah; (3) Dimensi Sosial dan Budaya, jumlah atribut 10 buah; (4) Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas, jumlah atribut 10 buah; dan (5) Dimensi Kelembagaan jumlah atribut 8 buah.

6.1.1 Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Lingkungan

Dimensi lingkungan merujuk pada pemahaman bahwa keberlanjutan sumberdaya kawasan pantai selatan yang dalam hal ini adalah pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang dengan potensi wisata rekreasi pantai atau perluasan sumberdaya alam berikut lingkungan fisik diarahkan untuk menjamin kehidupan jangka panjang dan keberlanjutan sumberdaya lingkungan pantai itu sendiri. Atribut-atribut dimensi ini adalah sebagai berikut: (1) Kedalaman perairan; (2) Tipe pantai; (3) Lebar pantai; (4) Material dasar perairan; (5) Kecepatan arus; (6) Kemiringan pantai; (7) Kecerahan perairan; (8) Penutupan lahan pantai (vegetasi); (9) Biota berbahaya; dan (10) Ketersediaan air tawar.

Hasil pengukuran indeks dan status keberlanjutan dimensi lingkungan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* dapat digambarkan dalam bentuk ordinasinya sebagaimana Gambar 6.1.



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.1. Ordinasinya MDS dan Monte Carlo Dimensi Lingkungan

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* Dimensi Lingkungan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang untuk masing-masing kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada

Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Indeks dan Status Keberlanjutan Dimensi Lingkungan

Kawasan Wisata Pantai	Dimensi Lingkungan	
	Indeks	Status
Pantai Nglipyep	62,91	Cukup Berkelanjutan
Pantai Balaikambang	77,73	Berkelanjutan
Pantai Ungapan	57,68	Cukup Berkelanjutan
<i>Stress (S) = 15,3% (goodness of fit)</i>		
<i>Squared Correlation (R²) = 94,7% (mendekati 1)</i>		
<i>Number of iterations = 3</i>		

Sumber : Data diolah, 2019.

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* menunjukkan bahwa Pantai Nglileyep memiliki status cukup berkelanjutan (62,91), Pantai Balaikambang dengan status berkelanjutan (77,73), dan Pantai Ungapan memiliki status cukup berkelanjutan (57,68). Parameter statistik yang ditunjukkan oleh nilai *stress* (S) sebesar 15,3% menyatakan *goodness of fit* ($S < 25\%$) dan koefisien determinasi ($R^2 = 94,7\%$) memberikan penegasan kondisi yang baik (mendekati nilai 1). Hal ini memberikan pemahaman bahwa semua atribut cukup akurat dan memberikan hasil analisis yang semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengkaji status Dimensi Lingkungan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Perbedaan nilai indeks keberlanjutan antara analisis MDS dan *Monte Carlo* dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2. Perbandingan Indeks Keberlanjutan MDS dan *Monte Carlo* (MC) Dimensi Lingkungan

Kawasan Pantai Selatan	Indeks Keberlanjutan			Keputusan
	MDS	MC	Selisih	
Pantai Nglileyep	62,91	62,87	0,03%	Memadai
Pantai Balaikambang	77,73	76,59	1,14%	Memadai
Pantai Ungapan	57,68	57,83	0,15%	Memadai

Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel 6.2 menunjukkan bahwa hasil analisis *Monte Carlo* pada taraf kepercayaan 95% tidak mengalami perbedaan besar jika dibandingkan dengan hasil MDS. Nilai selisih antara indeks keberlanjutan hasil analisis MDS dan analisis *Monte Carlo* kurang dari 5% pada seluruh lokasi kawasan pantai selatan. Dengan demikian analisis *Rap-EcoBeach* memadai sebagai penduga status dimensi lingkungan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Hasil-hasil parameter statistik dan simulasi Monte Carlo tersebut memberikan pemahaman bahwa analisis *Rap-EcoBeach* secara kuantitatif dan cepat (*rapid appraisal*) cukup baik dipergunakan sebagai alat evaluasi dalam menentukan status dimensi lingkungan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Dilihat dari sudut pandang lingkungan, kegiatan ekowisata Kawasan pantai harus memenuhi syarat geomorfologi pantai, proses pantai yang terkait dengan gelombang laut, erosi pantai, sebaran padatan tersuspensi, sebaran sedimen dasar permukaan, air tanah dan luas dataran pantai (Susana *et al.* 2004).

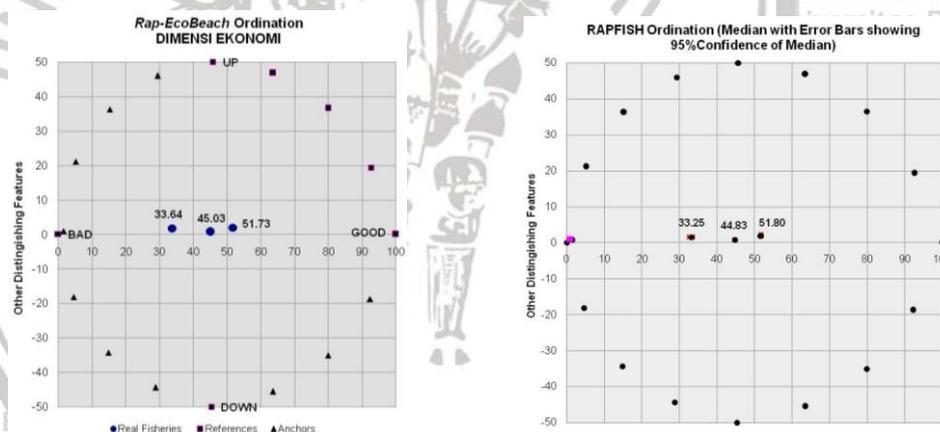
Kegiatan wisata yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada. Setiap kegiatan wisata mempunyai persyaratan sumber daya dan lingkungan masing-masing sesuai objek wisata yang akan dikembangkan. Persyaratan sumber daya dan lingkungan dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan wisata. Parameter yang menjadi prasyarat dalam kesesuaian ekowisata bahari berupa parameter fisik dan parameter biologi.

Parameter fisik pantai dan perairan menjadi prasyarat yang lebih dominan pada wisata pantai, sedangkan pada wisata bahari yang berbasis ekosistem parameter biologi juga dipertimbangkan. Parameter fisik yang dipertimbangkan dalam kesesuaian wisata, yaitu pasir pantai, substrat dasar, kecerahan air laut, kedalaman, kecepatan arus, lebar pantai, kemiringan pantai, pasang surut, ombak, dan air tawar. Parameter biologi yang dipertimbangkan dalam kesesuaian wisata, yaitu vegetasi pantai, karang, ikan karang, mangrove, lamun, dan biota laut lainnya (Yulius *et al.*, 2018).

6.1.2 Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi merujuk pada pengertian pengembangan kawasan pantai selatan memiliki keberlanjutan kegiatan ekonomi dengan nilai manfaat jangka panjang dengan layak serta mampu memberikan manfaat ekonomi kepada stakeholders secara adil dan merata. Atribut-atribut dimensi ini, yaitu: (1) Peningkatan pendapatan keluarga; (2) Kontribusi perekonomian daerah; (3) Peluang pekerjaan; (4) Diversifikasi usaha; (5) Pengembangan produk lokal; (6) Pengembangan jasa wisata lain; (7) Retribusi wisatawan; dan (8) Peningkatan daya beli wisatawan.

Hasil pengukuran indeks dan status keberlanjutan Dimensi Ekonomi sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* disampaikan sebagaimana Gambar 6.2.



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.2. Ordinası MDS dan Monte Carlo Dimensi Ekonomi

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* Dimensi Ekonomi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang untuk masing-masing kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Indeks dan Status Keberlanjutan Dimensi Ekonomi

Kawasan Wisata Pantai	Dimensi Ekonomi	
	Indeks	Status
Pantai Ngliyep	33,64	Kurang Berkelanjutan
Pantai Balaikambang	51,73	Cukup Berkelanjutan
Pantai Ungapan	45,03	Kurang Berkelanjutan
<i>Stress (S) = 17,7% (goodness of fit)</i>		
<i>Squared Correlation (R²) = 93,7% (mendekati 1)</i>		
<i>Number of iterations = 3</i>		

Sumber : Data diolah, 2019.

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* menunjukkan bahwa Pantai Ngliyep memiliki status kurang berkelanjutan (33,64), Pantai Balaikambang memiliki status cukup berkelanjutan (51,73), dan Pantai Ungapan memiliki status kurang berkelanjutan (45,03). Parameter statistik yang ditunjukkan oleh nilai *stress (S)* sebesar 17,7% menyatakan *goodness of fit* ($S < 25\%$) dan koefisien determinasi ($R^2 = 93,7\%$) memberikan penegasan kondisi yang baik (mendekati nilai 1). Hal ini memberikan pemahaman bahwa semua atribut cukup akurat dan memberikan hasil analisis yang semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengkaji status Dimensi Ekonomi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Perbedaan nilai indeks keberlanjutan antara analisis MDS dan *Monte Carlo* dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4. Perbandingan Indeks Keberlanjutan MDS dan *Monte Carlo* (MC) Dimensi Ekonomi

Kawasan Pantai Selatan	Indeks Keberlanjutan			Keputusan
	MDS	MC	Selisih	
Pantai Ngliyep	33,64	33,25	0,39%	Memadai
Pantai Balaikambang	51,73	51,80	0,07%	Memadai
Pantai Ungapan	45,03	44,83	0,20%	Memadai

Sumber : Data diolah, 2019.

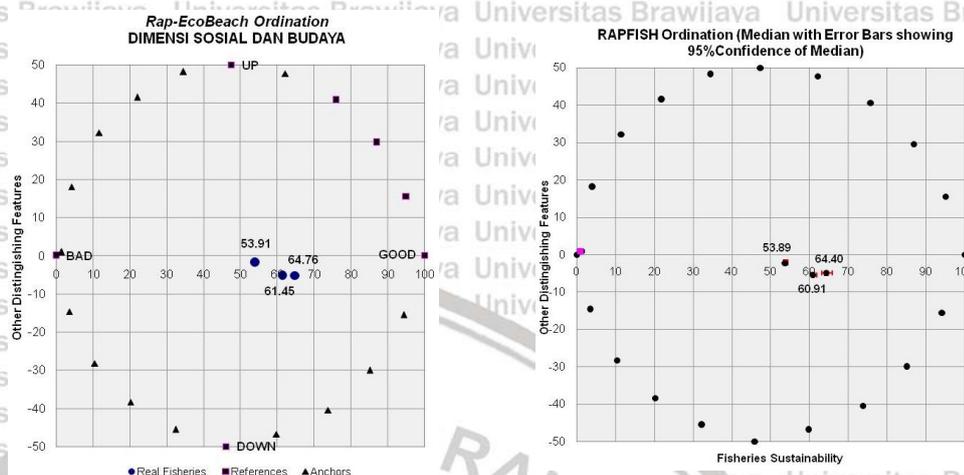
Tabel 6.4 menunjukkan bahwa hasil analisis *Monte Carlo* pada taraf kepercayaan 95% tidak mengalami perbedaan besar jika dibandingkan dengan hasil MDS. Nilai selisih antara indeks keberlanjutan hasil analisis MDS dan analisis *Monte Carlo* kurang dari 5% pada seluruh lokasi kawasan pantai selatan. Dengan demikian analisis *Rap-EcoBeach* memadai sebagai penduga status dimensi ekonomi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Hasil-hasil parameter statistik dan simulasi *Monte Carlo* tersebut memberikan pemahaman bahwa analisis *Rap-EcoBeach* secara kuantitatif dan cepat (*rapid appraisal*) cukup baik dipergunakan sebagai alat evaluasi dalam menentukan status dimensi ekonomi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

6.1.3 Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Sosial dan Budaya

Dimensi sosial-budaya merujuk pada pemahaman bahwa pengembangan kawasan pantai selatan akan tetap menjaga dan menghormati keaslian nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat lokal, melestarikan nilai-nilai warisan budaya dan adat yang ada, dan berkontribusi dalam meningkatkan rasa toleransi serta pemahaman antar-budaya. Atribut-atribut dimensi ini, yaitu: (1) Tingkat pendidikan masyarakat; (2) Tingkat pengangguran; (3) Kelestarian budaya; (4) Muatan edukasi; (5) Partisipasi masyarakat; (6) Penerapan sains dan teknologi; (7) Pendidikan dan pelatihan pariwisata; (8) Kebersihan lingkungan; (9) Konflik sosial; dan (10) Tingkat keamanan.

Hasil pengukuran indeks dan status keberlanjutan Dimensi Sosial dan Budaya sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* disampaikan sebagaimana Gambar 6.3.



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.3. Ordinasasi MDS dan Monte Carlo Dimensi Sosial dan Budaya

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* Dimensi Sosial dan Budaya dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang untuk masing-masing kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5. Indeks dan Status Keberlanjutan Dimensi Sosial dan Budaya

Kawasan Wisata Pantai	Dimensi Sosial dan Budaya	
	Indeks	Status
Pantai Nglileyep	53,91	Cukup Berkelanjutan
Pantai Balaikambang	64,76	Cukup Berkelanjutan
Pantai Ungapan	61,45	Cukup Berkelanjutan
<i>Stress (S) = 15,2%</i>		
<i>Squared Correlation (R²) = 94,8%</i>		
<i>Number of iterations = 3</i>		

Sumber : Data diolah, 2019.

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* menunjukkan bahwa Pantai Nglipet memiliki status cukup berkelanjutan (53,91), Pantai Balaikambang memiliki status cukup berkelanjutan (64,76), dan Pantai Ungapan memiliki status cukup berkelanjutan (61,45).

Parameter statistik yang ditunjukkan oleh nilai *stress* (S) sebesar 15,2% menyatakan *goodness of fit* ($S < 25\%$) dan koefisien determinasi (R^2) = 94,8% memberikan penegasan kondisi yang baik (mendekati nilai 1). Hal ini memberikan pemahaman bahwa semua atribut cukup akurat dan memberikan hasil analisis yang semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengkaji status Dimensi Sosial dan Budaya dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Perbedaan nilai indeks keberlanjutan antara analisis MDS dan *Monte Carlo* dapat dilihat pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6. Perbandingan Indeks Keberlanjutan MDS dan *Monte Carlo* (MC) Dimensi Sosial dan Budaya

Kawasan Pantai Selatan	Indeks Keberlanjutan			Keputusan
	MDS	MC	Selisih	
Pantai Nglipet	53,91	53,89	0,03%	Memadai
Pantai Balaikambang	64,76	64,40	0,37%	Memadai
Pantai Ungapan	61,45	60,91	0,54%	Memadai

Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel 6.6 menunjukkan bahwa hasil analisis *Monte Carlo* pada taraf kepercayaan 95% tidak mengalami perbedaan besar jika dibandingkan dengan hasil MDS. Nilai selisih antara indeks keberlanjutan hasil analisis MDS dan analisis *Monte Carlo* kurang dari 5% pada seluruh lokasi kawasan pantai selatan. Dengan demikian analisis *Rap-EcoBeach* memadai sebagai penduga status dimensi Sosial

dan Budaya dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Hasil-hasil parameter statistik dan simulasi Monte Carlo tersebut memberikan pemahaman bahwa analisis *Rap-EcoBeach* secara kuantitatif dan cepat (*rapid appraisal*) cukup baik dipergunakan sebagai alat evaluasi dalam menentukan status dimensi Sosial dan Budaya dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

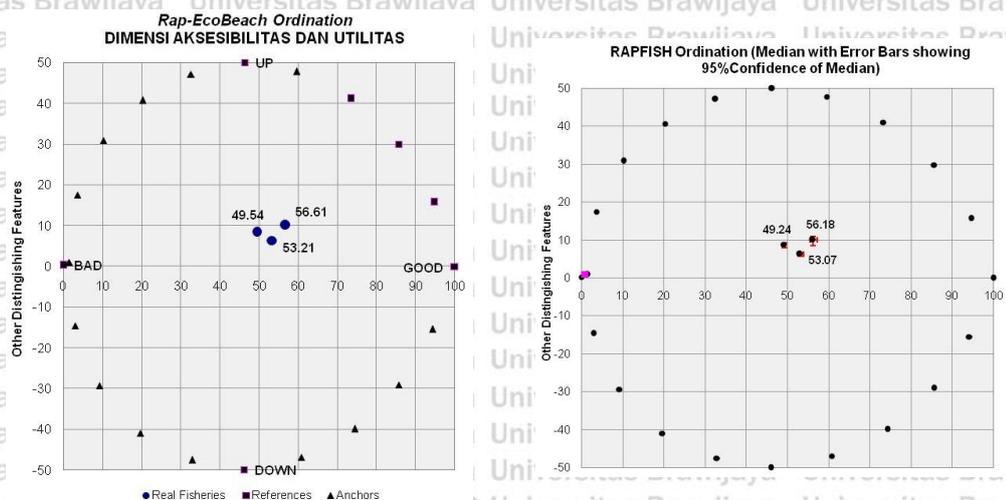
6.1.4 Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi

Aksesibilitas dan Utilitas

Dimensi aksesibilitas dan utilitas memberikan pemahaman bahwa pengembangan kawasan pantai selatan memiliki dukungan berupa kemudahan akses, baik akses informasi, infrastruktur, fasilitas sarana dan prasarana lainnya sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para wisatawan. Utilitas merujuk pada pengertian bahwa pengembangan kawasan pantai selatan bisa memberi manfaat langsung kepada pengguna jasa wisata rekreasi pantai, seperti penerangan, air bersih, pengelolaan sampah, dan sebagainya. Atribut-atribut dimensi ini, yaitu: (1) Sarana dan prasarana wisata; (2) Akses transportasi; (3) Akses informasi; (4) Akses komunikasi; (5) Akomodasi; (6) Air bersih; (7) Listrik; (8) Fasilitas kesehatan; (9) Promosi wisata; dan (10) Pemasaran wisata.

Hasil pengukuran indeks dan status keberlanjutan Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* disampaikan sebagaimana

Gambar 6.4.



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.4. Ordinasasi MDS dan Monte Carlo Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang untuk masing-masing kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7. Indeks dan Status Keberlanjutan Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas

Kawasan Wisata Pantai	Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas	
	Indeks	Status
Pantai Ngliyep	49,54	Kurang Berkelanjutan
Pantai Balaikambang	53,21	Cukup Berkelanjutan
Pantai Ungapan	56,61	Cukup Berkelanjutan
Stress = 15,4% (goodness of fit)		
Squared Correlation (R^2) = 94,6% (mendekati 1)		
Number of iterations = 2		

Sumber : Data diolah, 2019.

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* menunjukkan bahwa Pantai Ngliyep memiliki status kurang berkelanjutan (49,54), Pantai Balaikambang memiliki status cukup

berkelanjutan (53,21), dan Pantai Ungapan memiliki status cukup berkelanjutan (56,61). Parameter statistik yang ditunjukkan oleh nilai *stress* (*S*) sebesar 15,4% menyatakan *goodness of fit* ($S < 25\%$) dan koefisien determinasi ($R^2 = 94,6\%$) memberikan penegasan kondisi yang baik (mendekati nilai 1). Hal ini memberikan pemahaman bahwa semua atribut cukup akurat dan memberikan hasil analisis yang semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengkaji status Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Perbedaan nilai indeks keberlanjutan antara analisis MDS dan *Monte Carlo* dapat dilihat pada Tabel 6.8.

Tabel 6.8. Perbandingan Indeks Keberlanjutan MDS dan *Monte Carlo* (MC) Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas

Kawasan Pantai Selatan	Indeks Keberlanjutan			Keputusan
	MDS	MC	Selisih	
Pantai Ngliyep	49,54	49,24	0,30%	Memadai
Pantai Balaikambang	53,21	53,07	0,14%	Memadai
Pantai Ungapan	56,61	56,18	0,43%	Memadai

Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel 6.8 menunjukkan bahwa hasil analisis *Monte Carlo* pada taraf kepercayaan 95% tidak mengalami perbedaan besar jika dibandingkan dengan hasil MDS. Nilai selisih antara indeks keberlanjutan hasil analisis MDS dan analisis *Monte Carlo* kurang dari 5% pada seluruh lokasi kawasan pantai selatan. Dengan demikian analisis *Rap-EcoBeach* memadai sebagai penduga status dimensi Aksesibilitas dan Utilitas dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

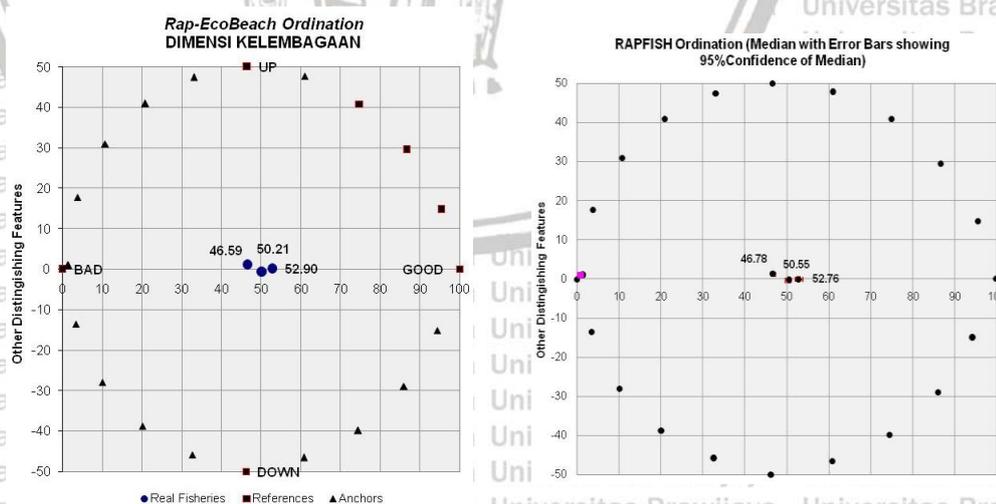
Hasil-hasil parameter statistik dan simulasi *Monte Carlo* tersebut memberikan pemahaman bahwa analisis *Rap-EcoBeach* secara kuantitatif dan

cepat (*rapid appraisal*) cukup baik dipergunakan sebagai alat evaluasi dalam menentukan status dimensi Aksesibilitas dan Utilitas dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

6.1.5 Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Kelembagaan

Dimensi kelembagaan merujuk pada pemahaman bahwa pengembangan kawasan pantai selatan didukung regulasi atau payung hukum serta peran serta institusi/lembaga termasuk sumberdaya manusianya. Dukungan juga terkait manajemen pengelolaan kepariwisataan di suatu destinasi, baik dari unsur pemerintah, swasta ataupun masyarakat (Sunaryo, 2013). Adapun atribut-atribut dimensi ini adalah sebagai berikut: (1) Regulasi pemerintah pusat; (2) Regulasi pemerintah daerah (PERDA); (3) Norma/hukum adat; (4) Peran institusi pemerintah; (5) Peran pihak swasta; (6) Peran LITBANG; (7) Peran LSM/Akademisi; dan (8) Peran lembaga masyarakat lokal.

Hasil pengukuran indeks dan status keberlanjutan Dimensi Kelembagaan sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* disampaikan sebagaimana Gambar 6.5.



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.5. Ordinasasi MDS dan Monte Carlo Dimensi Kelembagaan

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* Dimensi Kelembagaan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang untuk masing-masing kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 6.9.

Tabel 6.9. Indeks dan Status Keberlanjutan Dimensi Kelembagaan

Kawasan Wisata Pantai	Dimensi Kelembagaan	
	Indeks	Status
Pantai Nglileyep	46,59	Kurang Berkelanjutan
Pantai Balaikambang	52,90	Cukup Berkelanjutan
Pantai Ungapan	50,21	Cukup Berkelanjutan
<i>Stress (S) = 17,3% (goodness of fit)</i>		
<i>Squared Correlation (R²) = 93,8% (mendekati 1)</i>		
<i>Number of iterations = 3</i>		

Sumber : Data diolah, 2019.

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* menunjukkan bahwa Pantai Nglileyep memiliki status kurang berkelanjutan (46,59), Pantai Balaikambang memiliki status cukup berkelanjutan (52,90), dan Pantai Ungapan memiliki status cukup berkelanjutan (50,21). Parameter statistik yang ditunjukkan oleh nilai *stress (S)* sebesar 17,3% menyatakan *goodness of fit* ($S < 25\%$) dan koefisien determinasi ($R^2 = 93,8\%$) memberikan penegasan kondisi yang baik (mendekati nilai 1). Hal ini memberikan pemahaman bahwa semua atribut cukup akurat dan memberikan hasil analisis yang semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengkaji status Dimensi Kelembagaan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Perbedaan nilai indeks keberlanjutan antara analisis MDS dan *Monte Carlo* dapat dilihat pada Tabel 6.10.

Tabel 6.10. Perbandingan Indeks Keberlanjutan MDS dan Monte Carlo (MC) Dimensi Kelembagaan

Kawasan Pantai Selatan	Indeks Keberlanjutan			Keputusan
	MDS	MC	Selisih	
Pantai Ngliyep	46,59	46,78	0,19%	Memadai
Pantai Balaikambang	52,90	52,76	0,13%	Memadai
Pantai Ungapan	50,21	50,55	0,33%	Memadai

Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel 6.10 menunjukkan bahwa hasil analisis *Monte Carlo* pada taraf kepercayaan 95% tidak mengalami perbedaan besar jika dibandingkan dengan hasil MDS. Nilai selisih antara indeks keberlanjutan hasil analisis MDS dan analisis *Monte Carlo* kurang dari 5% pada seluruh lokasi kawasan pantai selatan. Dengan demikian analisis *Rap-EcoBeach* memadai sebagai penduga status dimensi Kelembagaan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Hasil-hasil parameter statistik dan simulasi *Monte Carlo* tersebut memberikan pemahaman bahwa analisis *Rap-EcoBeach* secara kuantitatif dan cepat (*rapid appraisal*) cukup baik dipergunakan sebagai alat evaluasi dalam menentukan status dimensi Kelembagaan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

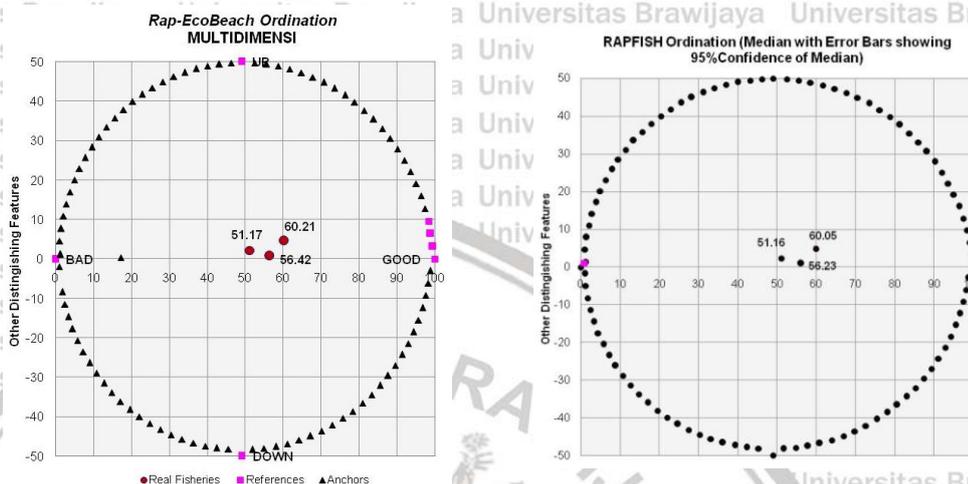
6.1.6 Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Multidimensi

Pengukuran status keberlanjutan multidimensi merupakan pengukuran yang dilakukan terhadap keberlanjutan multidimensi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Multidimensi yang dimaksud adalah merupakan penggabungan dari seluruh

dimensi keberlanjutan, yakni Dimensi Lingkungan, Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial dan Budaya, Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas serta Dimensi Kelembagaan.

Hasil pengukuran indeks dan status keberlanjutan Multidimensi sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* disampaikan sebagaimana Gambar 6.1



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.6. Ordinas MDS dan Monte Carlo Multidimensi

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* Multidimensi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang untuk masing-masing kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada

Tabel 6.11.

Tabel 6.11. Indeks dan Status Keberlanjutan Multidimensi

Kawasan Wisata Pantai	Indeks	Status
Pantai Ngliyep	51,17	Cukup Berkelanjutan
Pantai Balaikambang	60,21	Cukup Berkelanjutan
Pantai Ungapan	56,42	Cukup Berkelanjutan
<i>Stress (S) = 13,6% (goodness of fit)</i>		
<i>Squared Correlation (R²) = 95,6% (mendekati 1)</i>		
<i>Number of iterations = 2</i>		

Sumber : Data diolah, 2019.

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* menunjukkan bahwa Pantai Ngliyep memiliki status kurang berkelanjutan (51,17), Pantai Balaikambang memiliki status cukup berkelanjutan (60,21), dan Pantai Ungapan memiliki status cukup berkelanjutan (56,42). Parameter statistik yang ditunjukkan oleh nilai *stress* (S) sebesar 13,6% menyatakan *goodness of fit* ($S < 25\%$) dan koefisien determinasi ($R^2 = 95,6\%$) memberikan penegasan kondisi yang baik (mendekati nilai 1). Hal ini memberikan pemahaman bahwa semua atribut cukup akurat dan memberikan hasil analisis yang semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengkaji status Multidimensi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Perbedaan nilai indeks keberlanjutan antara analisis MDS dan *Monte Carlo* dapat dilihat pada Tabel 6.12.

Tabel 6.12. Perbandingan Indeks Keberlanjutan MDS dan *Monte Carlo* (MC) Multidimensi

Kawasan Pantai Selatan	Indeks Keberlanjutan			Keputusan
	MDS	MC	Selisih	
Pantai Ngliyep	51,17	51,16	0,00%	Memadai
Pantai Balaikambang	60,21	60,05	0,16%	Memadai
Pantai Ungapan	56,42	56,23	0,19%	Memadai

Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel 6.12 menunjukkan bahwa hasil analisis *Monte Carlo* pada taraf kepercayaan 95% tidak mengalami perbedaan besar jika dibandingkan dengan hasil MDS. Nilai selisih antara indeks keberlanjutan hasil analisis MDS dan analisis *Monte Carlo* kurang dari 5% pada seluruh lokasi kawasan pantai selatan. Dengan demikian analisis *Rap-EcoBeach* memadai sebagai penduga status Multidimensi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Hasil-hasil parameter statistik dan simulasi Monte Carlo tersebut memberikan pemahaman bahwa analisis *Rap-EcoBeach* secara kuantitatif dan cepat (*rapid appraisal*) cukup baik dipergunakan sebagai alat evaluasi dalam menentukan status Multidimensi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

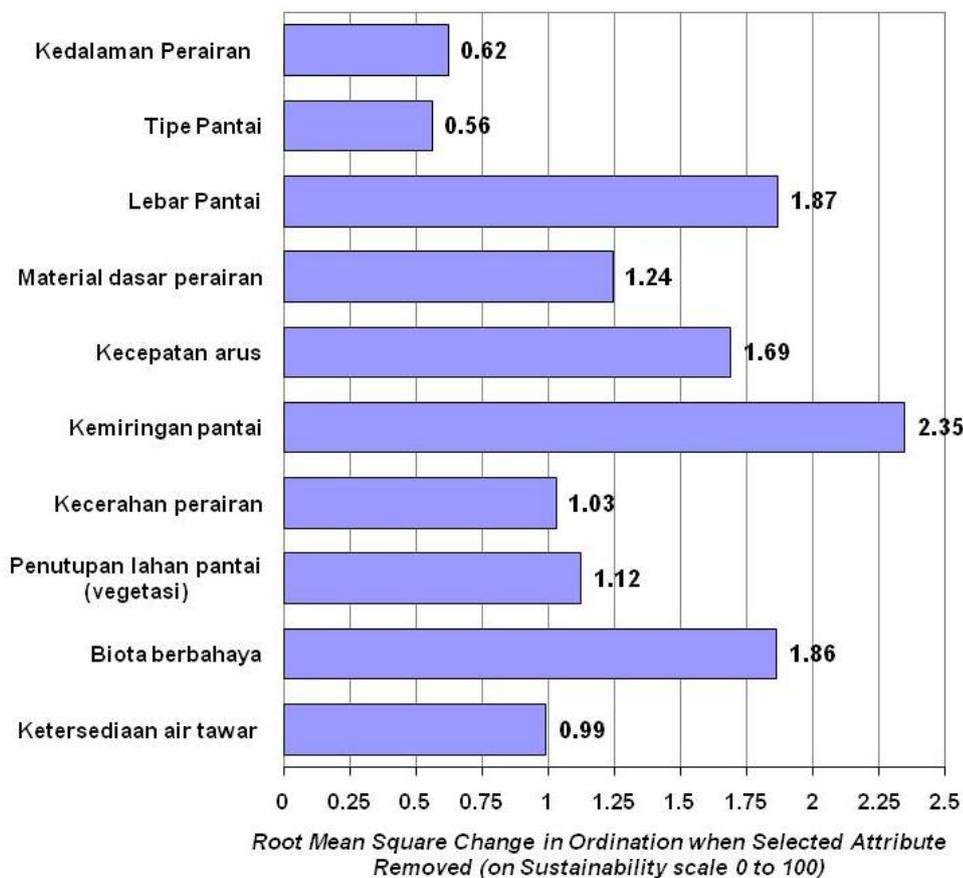
6.2 Atribut Sensitif Dimensi-dimensi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

Rap-EcoBeach selain menghasilkan keluaran analisis berupa indeks keberlanjutan masing-masing dimensi dan multidimensi, juga melakukan analisis *leverage*. Analisis *leverage* berfungsi untuk mengungkapkan atribut-atribut sensitif berdasarkan perbandingan nilai *Root Means Square* (RMS) dengan nilai *Median* (*Me*) pada masing-masing dimensi keberlanjutan. Atribut-atribut dinyatakan sensitif jika nilai *Root Means Square* (RMS) lebih besar dari nilai *Median* ($RMS > Me$). Atribut-atribut sensitif ini merupakan faktor pengungkit atau atribut-atribut yang keberadaannya berpengaruh sensitif dalam mengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

6.2.1 Atribut-atribut Sensitif Dimensi Lingkungan

Analisis *leverage* pada dimensi lingkungan berfungsi untuk mengungkapkan atribut-atribut pada dimensi lingkungan. Atribut-atribut ini merupakan atribut yang berpengaruh sensitif dalam mengungkit atau meningkatkan status keberlanjutan pada dimensi lingkungan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Hasil analisis *leverage* dimensi lingkungan sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* dapat dilihat pada Gambar 6.7.

Leverage of Attributes DIMENSI LINGKUNGAN



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.7. Nilai *Root Mean Square (RMS)* Dimensi Lingkungan

Gambar 7.2 merupakan hasil analisis *leverage* yang menghasilkan atribut-atribut sensitif sebagai faktor-faktor pengungkit dimensi lingkungan. Atribut dinyatakan sensitif jika $RMS > Me$, sedangkan nilai median dimensi lingkungan adalah 2,05. Ikhtisar nilai RMS berikut tingkat sensitivitas masing-masing atribut pada dimensi lingkungan dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 6.13.

Tabel 6.33. Nilai *Root Mean Square (RMS)* dan Tingkat Sensitivitas Atribut-Atribut Dimensi Lingkungan

No.	Atribut	RMS	Keterangan
1.	Kedalaman Perairan	0,62	-
2.	Tipe Pantai	0,56	-
3.	Lebar Pantai	1,87	<i>Sensitif</i>
4.	Material dasar perairan	1,24	-
5.	Kecepatan arus	1,69	<i>Sensitif</i>
6.	Kemiringan pantai	2,35	<i>Sensitif</i>
7.	Kecerahan perairan	1,03	-
8.	Penutupan lahan pantai	1,12	-
9.	Biota berbahaya	1,86	<i>Sensitif</i>
10.	Ketersediaan air tawar	0,99	-

Median = 1,33

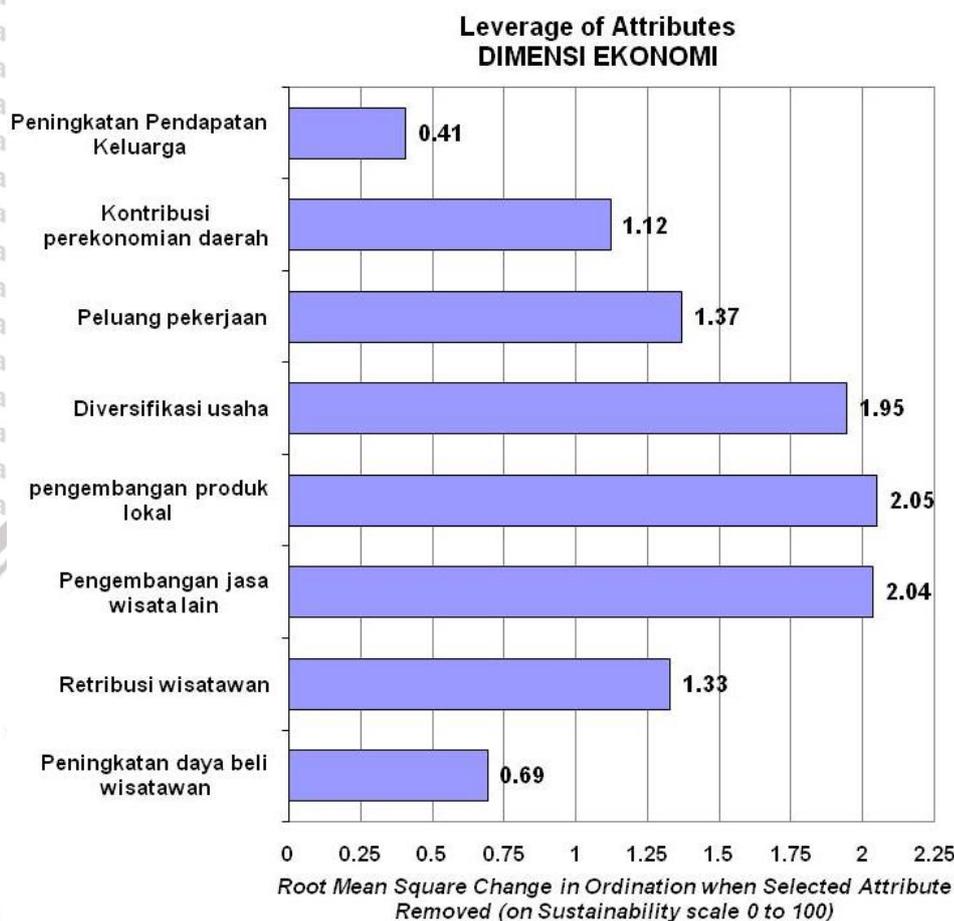
Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel tersebut menjelaskan bahwa atribut-atribut dimensi lingkungan memiliki nilai median 1,33. Atas dasar pemahaman ini maka atribut-atribut sensitif dimensi lingkungan yang merupakan faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan secara berurutan yakni: Kemiringan pantai (2,35), Lebar pantai (1,87), Biota berbahaya (1,86), dan Kecepatan arus (1,69). Atribut-atribut sensitif dimensi lingkungan ini merupakan faktor pengungkit atau faktor yang berpengaruh sensitif status dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Jika atribut-atribut sensitif ini diperbaiki maka akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi lingkungan.

6.2.2 Atribut-atribut Sensitif Dimensi Ekonomi

Analisis *leverage* pada dimensi ekonomi berfungsi untuk mengungkapkan atribut-atribut pada dimensi ekonomi. Atribut-atribut ini merupakan atribut yang berpengaruh sensitif dalam mengungkit atau meningkatkan status keberlanjutan pada dimensi ekonomi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan

pantai selatan di Kabupaten Malang. Hasil analisis *leverage* dimensi ekonomi sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* dapat dilihat pada Gambar 6.8.



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.8. Nilai Root Mean Square (RMS) Dimensi Ekonomi

Gambar 6.8 merupakan hasil analisis *leverage* yang menghasilkan atribut-atribut sensitif sebagai faktor-faktor pengungkit dimensi ekonomi. Atribut dinyatakan sensitif jika $RMS > Me$, sedangkan nilai median dimensi ekonomi adalah 1,37. Ikhtisar nilai RMS berikut tingkat sensitivitas masing-masing atribut dimensi ekonomi dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 6.14..

Tabel 6.14. Nilai Root Mean Square (RMS) dan Tingkat Sensitivitas Atribut-Atribut Dimensi Ekonomi

No.	Atribut	RMS	Keterangan
1.	Peningkatan pendapatan keluarga	0,41	-
2.	Kontribusi perekonomian daerah	1,12	-
3.	Peluang pekerjaan	1,37	<i>Sensitif</i>
4.	Diversifikasi usaha	1,95	<i>Sensitif</i>
5.	Pengembangan produk lokal	2,05	<i>Sensitif</i>
6.	Pengembangan jasa wisata lain	2,04	<i>Sensitif</i>
7.	Retribusi wisatawan	1,33	-
8.	Peningkatan daya beli wisatawan	0,69	-
Median = 1,37			

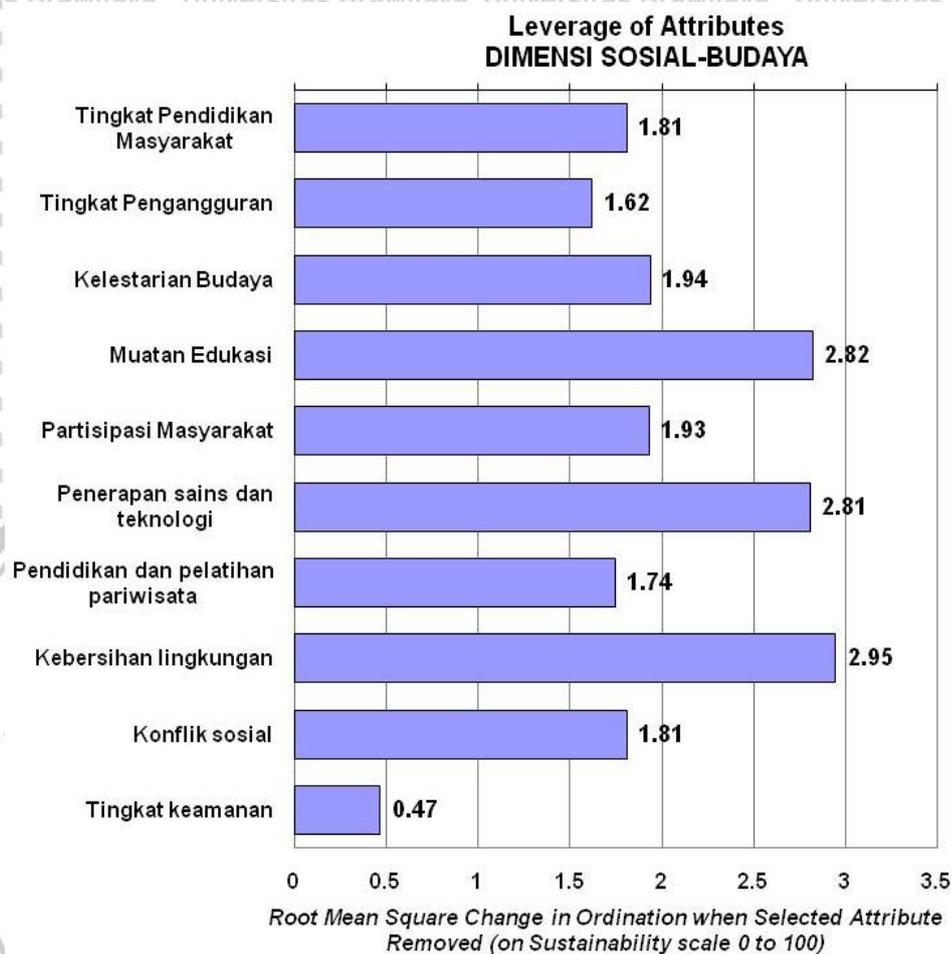
Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel tersebut menjelaskan bahwa atribut-atribut dimensi ekonomi memiliki nilai median 1,37. Atas dasar pemahaman ini maka atribut-atribut sensitif dimensi ekonomi yang merupakan faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan secara berurutan yakni: Pengembangan produk local (2,05), Pengembangan jasa wisata lain (2,04), Diversifikasi usaha (1,95), dan Peluang pekerjaan (1,37). Atribut-atribut sensitif dimensi ekonomi ini merupakan faktor pengungkit atau faktor yang berpengaruh sensitif status dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Jika atribut-atribut sensitif ini diperbaiki maka akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi ekonomi.

6.2.3 Atribut-atribut Sensitif Dimensi Sosial dan Budaya

Analisis *leverage* pada dimensi sosial dan budaya berfungsi untuk mengungkapkan atribut-atribut pada dimensi sosial dan budaya. Atribut-atribut ini merupakan atribut yang berpengaruh sensitif dalam mengungkit atau meningkatkan status keberlanjutan pada dimensi sosial dan budaya dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten

Malang. Hasil analisis *leverage* dimensi sosial dan budaya sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* dapat dilihat pada Gambar 6.7.



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.9. Nilai Root Mean Square (RMS) Dimensi Sosial dan Budaya

Gambar 6.9 merupakan hasil analisis *leverage* yang menghasilkan atribut-atribut sensitif sebagai faktor-faktor pengungkit dimensi Sosial dan budaya. Atribut dinyatakan sensitif jika $RMS > Me$, sedangkan nilai median dimensi sosial dan budaya adalah 2,05. Ikhtisar nilai RMS berikut tingkat sensitivitas masing-masing atribut dimensi sosial dan budaya dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 6.15.

Tabel 6.15. Nilai Root Mean Square (RMS) dan Tingkat Sensitivitas Atribut-Atribut Dimensi Sosial dan Budaya

No.	Atribut	RMS	Keterangan
1.	Tingkat pendidikan masyarakat	1,81	-
2.	Tingkat pengangguran	1,62	-
3.	Kelestarian budaya	1,94	-
4.	Muatan edukasi	2,82	Sensitif
5.	Partisipasi masyarakat	1,93	-
6.	Penerapan sains dan teknologi	2,81	Sensitif
7.	Pendidikan & pelatihan pariwisata	1,74	-
8.	Kebersihan lingkungan	2,95	Sensitif
9.	Konflik sosial	1,81	-
10.	Tingkat keamanan	0,47	-
Median = 1,99			

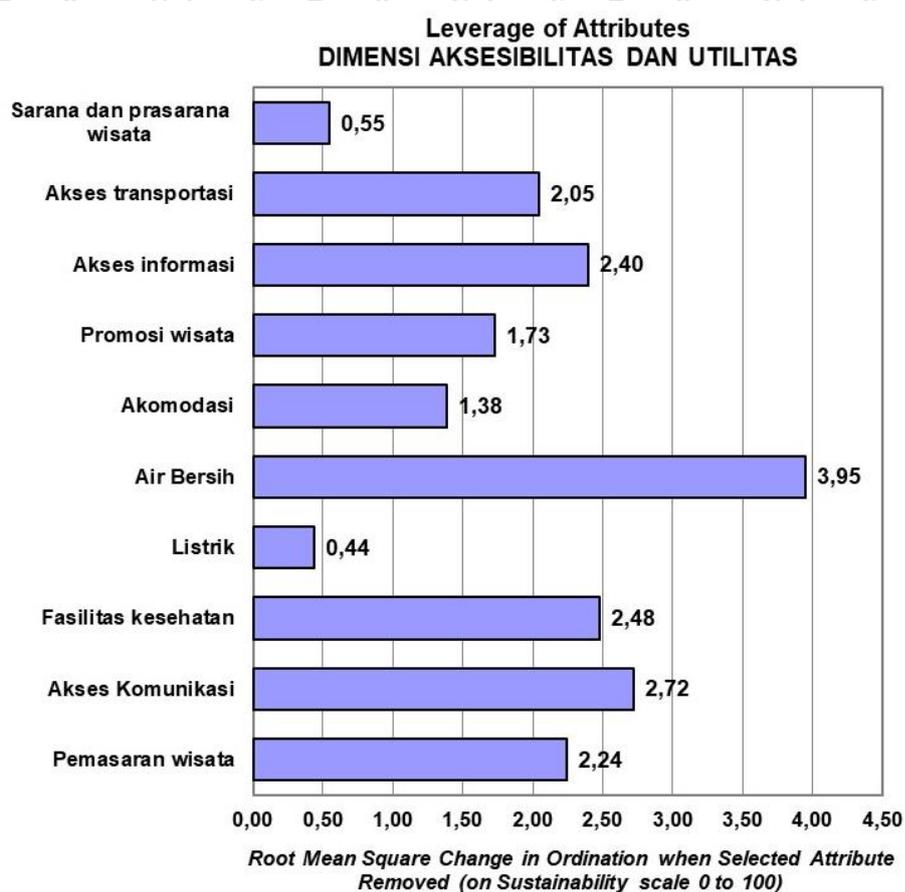
Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel 6.15 menjelaskan bahwa atribut-atribut dimensi sosial dan budaya memiliki nilai median 1,99. Atas dasar pemahaman ini maka atribut-atribut sensitif dimensi sosial dan budaya yang merupakan faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan secara berurutan yakni: Kebersihan lingkungan (2,95), Muatan edukasi (2,82), dan Penerapan sains dan teknologi (2,81). Atribut-atribut sensitif dimensi sosial dan budaya ini merupakan faktor pengungkit atau faktor yang berpengaruh sensitif status dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Jika atribut-atribut sensitif ini diperbaiki maka akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi sosial dan budaya.

6.2.4 Atribut-atribut Sensitif Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas

Analisis *leverage* pada dimensi aksesibilitas dan utilitas berfungsi untuk mengungkapkan atribut-atribut pada dimensi aksesibilitas dan utilitas. Atribut-atribut ini merupakan atribut yang berpengaruh sensitif dalam mengungkit atau

meningkatkan status keberlanjutan pada dimensi aksesibilitas dan utilitas dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Hasil analisis *leverage* dimensi aksesibilitas dan utilitas sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* dapat dilihat pada Gambar 6.7.



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.10. Nilai Root Mean Square (RMS) Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas

Gambar 7.2 merupakan hasil analisis *leverage* yang menghasilkan atribut-atribut sensitif sebagai faktor-faktor penguangkit dimensi Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas. Atribut dinyatakan sensitif jika $RMS > Me$, sedangkan nilai median dimensi Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas adalah 1,99. Ikhtisar nilai RMS berikut tingkat sensitivitas masing-masing atribut dimensi Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 6.16..

Tabel 6.16. Nilai Root Mean Square (RMS) dan Tingkat Sensitivitas Atribut-Atribut Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas

No.	Atribut	RMS	Keterangan
1.	Sarana dan prasarana wisata	0,55	-
2.	Akses transportasi	2,05	<i>Sensitif</i>
3.	Akses informasi	2,40	<i>Sensitif</i>
4.	Promosi wisata	1,73	-
5.	Akomodasi	1,38	-
6.	Air bersih	3,95	<i>Sensitif</i>
7.	Listrik	0,44	-
8.	Fasilitas kesehatan	2,48	<i>Sensitif</i>
9.	Akses komunikasi	2,72	<i>Sensitif</i>
10.	Pemasaran wisata	2,24	<i>Sensitif</i>
Median = 1,99			

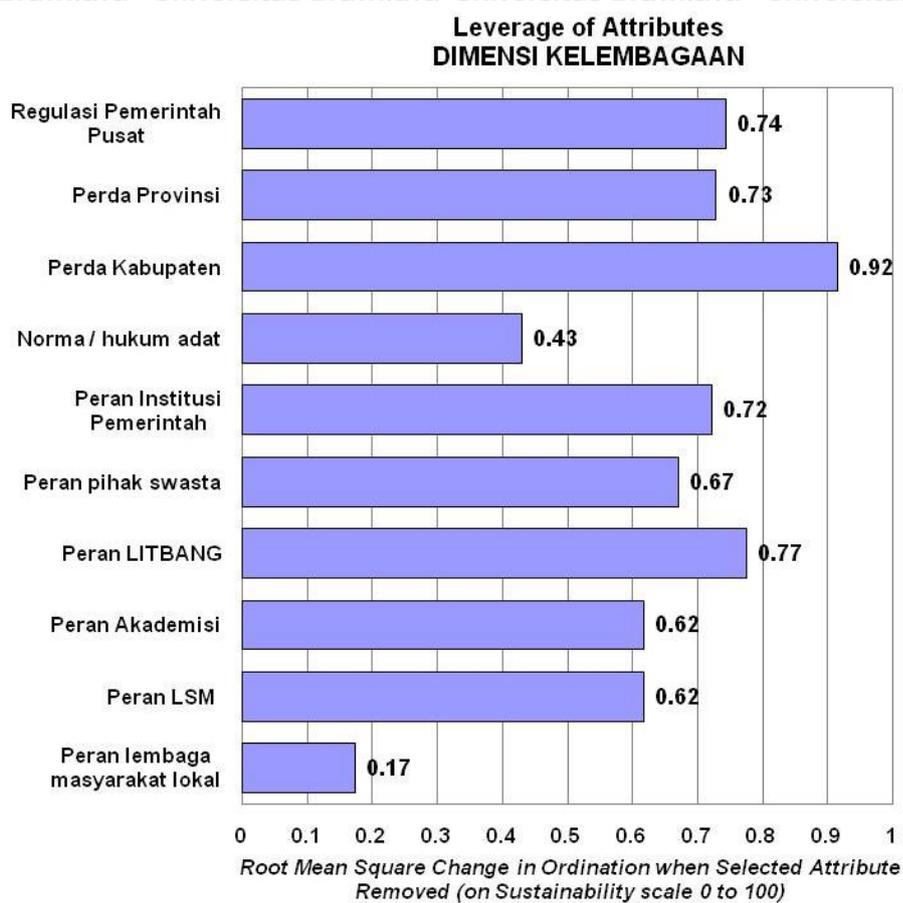
Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel tersebut menjelaskan bahwa atribut-atribut dimensi aksesibilitas dan utilitas memiliki nilai median 1,99. Atas dasar pemahaman ini maka atribut-atribut sensitif dimensi aksesibilitas dan utilitas yang merupakan faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan secara berurutan yakni: Air bersih (3,95), Akses komunikasi wisata (2,72), Fasilitas kesehatan (2,48), Akses informasi (2,40), Pemasaran wisata (2,24), dan Akses transportasi (2,05). Atribut-atribut sensitif dimensi aksesibilitas dan utilitas ini merupakan faktor pengungkit atau faktor yang berpengaruh sensitif status dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Jika atribut-atribut sensitif ini diperbaiki maka akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi aksesibilitas dan utilitas.

6.2.5 Atribut-atribut Sensitif Dimensi Kelembagaan

Analisis *leverage* pada dimensi kelembagaan berfungsi untuk mengungkapkan atribut-atribut pada dimensi kelembagaan. Atribut-atribut ini

merupakan atribut yang berpengaruh sensitif dalam mengungkit atau meningkatkan status keberlanjutan pada dimensi kelembagaan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Hasil analisis *leverage* dimensi kelembagaan sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* dapat dilihat pada Gambar 6.7.



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.11. Nilai Root Mean Square (RMS) Dimensi Kelembagaan

Gambar 6.11 merupakan hasil analisis *leverage* yang menghasilkan atribut-atribut sensitif sebagai faktor-faktor pengungkit dimensi kelembagaan.

Atribut dinyatakan sensitif jika $RMS > Me$, sedangkan nilai median dimensi kelembagaan adalah 0,64. Ikhtisar nilai RMS berikut tingkat sensitivitas masing-masing atribut dimensi kelembagaan dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 6.17.

Tabel 6.17. Nilai Root Mean Square (RMS) dan Tingkat Sensitivitas Atribut-Atribut Dimensi Kelembagaan

No.	Atribut	RMS	Keterangan
1.	Regulasi Pemerintah Pusat	0,74	Sensitif
2.	Perda Provinsi	0,73	Sensitif
3.	Perda Kabupaten	0,92	Sensitif
4.	Norma / hukum adat	0,43	-
5.	Peran Institusi Pemerintah	0,72	Sensitif
6.	Peran pihak swasta	0,67	Sensitif
7.	Peran LITBANG	0,77	Sensitif
8.	Peran Akademisi	0,62	-
9.	Peran LSM	0,62	-
10.	Peran lembaga masyarakat lokal	0,17	-
Median = 0,64			

Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel 6.17 menjelaskan bahwa atribut-atribut dimensi kelembagaan memiliki nilai median 0,64. Atas dasar pemahaman ini maka atribut-atribut sensitif dimensi kelembagaan yang merupakan faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan secara berurutan yakni: Perda Kabupaten (0,92), Peran LITBANG (0,77), Regulasi Pemerintah Pusat (0,74), Perda Provinsi (0,73), Peran Institusi Pemerintah (0,72), dan Peran pihak swasta (0,67). Atribut-atribut sensitif dimensi kelembagaan ini merupakan faktor pengungkit atau faktor yang berpengaruh sensitif status dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Jika atribut-atribut sensitif ini diperbaiki maka akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi kelembagaan.

6.3 Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya pelaksanaan pembangunan dengan mengurangi pengaruh buruk pembangunan terhadap lingkungan. Pembangunan sektor pariwisata yang terjadi belakangan ini cukup menimbulkan kekhawatiran berbagai kalangan atas dampak buruk yang ditimbulkannya. Dampak buruk tersebut diantaranya berupa eksploitasi berlebihan pada suatu kawasan wisata yang berujung pada penurunan potensi dan bahkan mengakibatkan penurunan minat wisatawan untuk berkunjung di kawasan wisata tersebut. Minimnya perhatian serta pengawasan akan berakibat fatal manakala eksploitasi yang dilakukan ini telah melewati ambang batas kewajaran. Oleh karena itulah konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) mengedepankan arti penting kelestarian objek wisata alam dari bentuk-bentuk eksploitasi secara berlebihan. Konsep pariwisata berkelanjutan ini selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan ekowisata.

Penelitian pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang ini dilaksanakan pada 3 (tiga) lokasi pantai kawasan pantai selatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Ketiga lokasi pantai tersebut adalah pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang. Pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur merupakan realisasi konsepsi ekowisata yang lahir atas dasar kekhawatiran terjadinya eksploitasi kawasan pantai selatan secara berlebihan. Konsepsi ekowisata ini diharapkan mampu mempertahankan kelestarian alam khususnya Kawasan pantai selatan serta memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Atribut-atribut sensitif pada masing-masing dimensi merupakan faktor-faktor penguangkit kenaikan status keberlanjutan. Atribut-atribut sensitif ini apabila diperbaiki maka akan mampu meningkatkan status dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Oleh karena itu penyusunan strategi keberlanjutan dilakukan dengan mengacu pada keberadaan faktor-faktor penguangkit pada masing-masing dimensi pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

6.3.1 Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Lingkungan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

Atribut-atribut sensitif dimensi lingkungan merupakan faktor penguangkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan secara berurutan yakni: kemiringan pantai, lebar pantai, biota berbahaya, dan kecepatan arus. Atribut-atribut sensitif ini jika diperbaiki maka diharapkan akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi lingkungan dengan penjelasan sebagaimana berikut ini.

1. Kemiringan pantai

Kemiringan pantai merupakan derajat kemiringan pantai yang dimiliki oleh ketiga objek kawasan pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pantai Ngliyep memiliki kemiringan 65° , pantai Ungapan dengan kemiringan 58° , dan kemiringan pantai Balaikambang sebesar 75° . Hal ini menunjukkan bahwa ketiga kawasan pantai ini tidak sesuai untuk wisata pantai sehingga perlu dicari solusi agar hal ini nantinya tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan para wisatawan.

Kemiringan pantai berhubungan dengan arus yang datang dari laut.

Semakin mendekati garis pantai, kelandaian gelombang datang akan semakin curam seiring dengan berkurangnya kedalaman dan akhirnya gelombang akan pecah. Pemecahan gelombang ini membawa dampak positif bagi kenyamanan wisatawan untuk melakukan rekreasi di pinggiran pantai (Umar, 2012). Nilai kemiringan pantai akan berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan dalam wisata, terutama untuk aktivitas berenang dan mandi.

Kemiringan pantai yang kurang dari 10° sangat sesuai untuk wisata pantai, sedangkan kemiringan pantai yang lebih dari 45° tidak sesuai untuk wisata pantai karena merupakan pantai yang curam. Dengan kemiringan pantai yang landai, dapat membuat para pengunjung merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas wisata pantai (Rahmawati, 2009).

Tipe pantai pada umumnya terbagi menjadi empat tipe, yaitu pantai datar, landai, curam, dan terjal. Pantai yang datar memiliki kemiringan $<10^\circ$, landai $10-25^\circ$ dan curam $>25^\circ$ (Yulianda, 2007). Oleh karena itu, mengurangi kemiringan pantai sehingga pantai menjadi datar sampai landai merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keamanan pengunjung dalam melakukan aktifitas wisata pantai.

2. Lebar pantai

Lebar pantai, yaitu jarak antara vegetasi terakhir yang ada di pantai dengan batas surut terendah. Pengukuran lebar pantai dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar wilayah pantai yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan wisata pantai. Lebar pantai ketiga objek kawasan pantai Nglileyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang, masing-masing adalah pantai Nglileyep memiliki lebar 127 meter ke arah laut, pantai Ungapan dengan lebar 155 meter, dan pantai Balaikambang memiliki lebar 200 meter ke arah laut. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga kawasan pantai ini sesuai untuk wisata

pantai. Namun demikian lebar pantai ini tentunya berdampak pada tingginya ombak yang pada kondisi tertentu akan membahayakan bagi para wisatawan.

Lebar pantai berkaitan dengan luasnya lahan pantai yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas wisata pantai. Lebar pantai sangat mempengaruhi aktivitas yang dilakukan para pengunjung. Semakin lebar suatu pantai, semakin baik untuk pengunjung dalam melakukan aktivitasnya, namun semakin kecil lebar pantai yang dimiliki suatu tempat wisata, pengunjung merasa tidak nyaman untuk melakukan aktivitas (Rahmawati, 2009). Kesesuaian lebar pantai yang dimiliki oleh pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang untuk objek wisata, tentunya dapat dioptimalkan pemanfaatannya dengan tetap menjaga lebar pantai ini dari kemungkinan terjadinya abrasi, erosi, dan sedimentasi. Panjang garis pantai dan lebar pantai yang cukup panjang dengan hamparan pasir hitam sangat memungkinkan untuk melakukan aktivitas di sepanjang pantai tersebut baik untuk kegiatan rekreasi seperti sarana bermain bagi pengunjung terutama anak-anak, berjemur, dan kegiatan wisata yang lain.

3. Biota berbahaya

Biota berbahaya merupakan faktor penting dalam wisata baik rekreasi maupun berenang. Semakin sedikit biota berbahaya yang ditemukan maka lokasi tersebut akan semakin baik. Di antara spesies yang berasosiasi pada ekosistem pantai, mangrove, lamun, maupun terumbu karang terdapat biota yang cukup berbahaya bagi pengunjung. Keberadaan biota berbahaya tentunya akan mengganggu pengunjung wisata. Adapun biota berbahaya bagi pengunjung wisata antara lain, gastropoda, karang api, ikan pari, landak laut, bulu babi, ubur-ubur, anemon, dan ular laut.

Hasil pengamatan secara visual di pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang tidak ditemukan biota berbahaya. Dengan demikian

kawasan pantai ini menunjang kegiatan wisatawan dari aspek keamanan dan kenyamanan wisatawan khususnya untuk rekreasi pantai dan berenang. Kondisi yang demikian sudah semestinya untuk selalu dijaga dengan selalu mengadakan pengawasan terhadap objek pantai itu sendiri jangan sampai nantinya diketemukan biota berbahaya.

4. Kecepatan arus

Arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dapat disebabkan oleh tiupan angin atau karena perbedaan densitas air laut atau dapat pula disebabkan oleh Gerakan bergelombang panjang (gerakan pasang surut). Arus yang disebabkan oleh pasang surut, biasanya lebih banyak dapat diamati di perairan pantai (Nontji 2005). Penggolongan kecepatan arus terdiri atas empat kategori, yaitu kategori arus lambat dengan kecepatan 0–0,25 m/s, kategori arus sedang dengan kecepatan 0,25–0,50 m/s, kategori arus cepat dengan kecepatan pada kisaran 0,5–1 m/s dan kategori arus sangat cepat dengan kecepatan di atas 1 m/s (Tambunan *et al.*, 2013).

Informasi tentang arus sangat berguna berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan berwisata karena kecepatan arus yang terlalu tinggi dapat membahayakan pengunjung mengingat tidak adanya pembatasan kawasan yang diperbolehkan untuk berenang, maka parameter ini sangat penting untuk diukur kesesuaiannya. Hasil yang diperoleh dari pengamatan langsung di pantai Ngliep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang memiliki rata-rata 0,23 m/s sehingga kecepatan arus di ketiga pantai ini termasuk kategori arus sedang. Namun demikian, sebagai bagian dari Pantai Selatan, ketiga pantai ini pada kondisi pasang, yakni sore hari memiliki kecepatan arus rata-rata diatas 0,53 m/s atau arus cepat yang membahayakan bagi para pengunjung. Oleh karena itu pada ketiga pantai ini perlu adanya rambu peringatan atau pembatasan waktu kunjungan, khususnya bagi wisatawan yang hendak melakukan aktivitasnya di perairan pantai seperti berenang, berlayar, dan sebagainya.

6.3.2 Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Ekonomi Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

Atribut-atribut sensitif dimensi ekonomi merupakan faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan, masing-masing adalah pengembangan produk lokal, pengembangan jasa wisata lain, diversifikasi usaha, dan peluang pekerjaan. Atribut-atribut sensitif ini jika diperbaiki maka diharapkan akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi ekonomi dengan penjelasan sebagaimana berikut ini.

1. Pengembangan produk lokal

Pemerintah Kabupaten Malang mulai mengimplementasikan kebijakan tentang pengembangan Produk Unggulan Daerah melalui *one village one product (OVOP)*. Kebijakan pemerintah Kabupaten Malang ini mempunyai tujuan bahwa pengembangan produk unggulan daerah di Kabupaten Malang sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa produk lokal tersebut diantaranya berupa industri rumahan seperti industri kerajinan gerabah, kerajinan keramik, dan industri makanan olahan berupa keripik buah, dan sebagainya.

Pelaksanaan pendekatan OVOP pertama yang dijalankan dalam kategori berhasil sehingga pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Malang mulai mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pengembangan produk unggulan yaitu dengan melakukan revitalisasi di sektor koperasi, industri kecil dan menengah melalui OVOP atau satu desa satu produk dengan basis komoditi unggulan. Seiring perkembangannya, OVOP di Kabupaten Malang telah menjadi salah satu instrumen untuk pembangunan sektoral, bahkan sudah dilandasi dengan adanya Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/1185/KEP/421.013/2013 tentang Produk Unggulan

Kecamatan Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product* – OVOP).

Kebijakan pemerintah Kabupaten Malang ini mempunyai tujuan bahwa pengembangan produk unggulan daerah di Kabupaten Malang sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam upaya pengembangan ekowisata pantai selatan ini pengembangan produk lokal belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu penanganan yang lebih optimal lagi dengan melibatkan para stakeholders.

2. Pengembangan jasa wisata lain

Pengembangan jasa wisata lain diharapkan tidak saja akan menambah jenis-jenis objek wisata tambahan yang mendukung keberadaan pantai sebagai objek wisata, namun juga akan mampu menambah pendapatan rumah tangga bagi masyarakat sekitarnya. Karakteristik objek wisata yang dimiliki oleh objek wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang antara lain adalah keindahan pantai, dikelilingi oleh perbukitan, keberadaan pepohonan di pinggir pantai, serta keindahan sehingga selalu menarik wisatawan untuk berkunjung. Dengan semua keindahan yang dimilikinya, keramahtamaan penduduk lokal, hal ini tentunya membuka peluang bagi terwujudnya pengembangan jasa wisata lain, khususnya jasa wisata buatan, seperti tempat bermain anak, jasa wisata keliling kawasan pantai, wisata budaya, dan sebagainya.

Jenis-jenis pengembangan jasa wisata lain atau yang terkait dengan upaya untuk menambah pendapatan ekonomi masyarakat yang dapat dilakukan di kawasan objek wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang antara lain adalah sebagaimana berikut ini.

a. Bisnis kuliner

Berkunjung ke tempat wisata pantai tentu saja akan menghabiskan waktu yang cukup banyak. Banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan ketika berlibur di pantai seperti bermain air, bermain pasir, berenang, berselancar dan lain sebagainya membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Dengan melihat peluang tersebut, maka menjalankan bisnis kuliner seperti membuka rumah makan atau restoran merupakan pilihan yang tepat. Karena pasti akan banyak disinggahi oleh para wisatawan.

b. Jasa Penginapan

Jenis bisnis yang paling potensial untuk dijalankan di sekitar daerah wisata pantai lainnya adalah penginapan atau *homestay*. Wisatawan yang berkunjung untuk berlibur berasal dari berbagai macam daerah baik itu lokal maupun internasional. Apalagi bagi wisatawan yang berasal dari tempat yang jauh, maka tidak cukup rasanya jika menghabiskan waktu hanya satu hari saja. Untuk dapat memuaskan diri dalam menikmati objek wisata dalam beberapa hari, maka mereka harus menginap atau tinggal sementara.

c. Jasa toilet dan kamar mandi

Seorang wisatawan yang melakukan aktivitas di pantai seperti berenang, bermain air, dan selancar pasti membutuhkan toilet dan kamar mandi. Oleh karena itu, peluang bisnis wisata pantai yang satu ini cukup menjanjikan. Membuka jasa sewa toilet dan kamar mandi akan sangat laris dan ramai. Dengan begitu, Anda akan lebih mudah untuk memperoleh pendapatan tinggi, apalagi saat banyak pengunjung pantai di musim liburan.

d. Jasa tempat parkir

Minimnya lahan parkir yang ada di daerah pantai membuat bisnis tempat parkir kendaraan menjadi salah satu bisnis sampingan yang potensial. Ditambah dengan medan yang berpasir, membuat kendaraan kesulitan untuk melintas. Sehingga setiap kendaraan para pengunjung pantai harus diparkirkan di kawasan sebelum memasuki pantai. Jenis bisnis yang satu ini sangat cocok bagi para penduduk yang memiliki lahan kosong untuk dijadikan sebagai tempat parkir.

e. Sewa kendaraan

Peluang bisnis wisata pantai lain yang tidak kalah potensial untuk dijalankan adalah jasa sewa kendaraan. Beberapa wisatawan yang berkunjung akan membutuhkan kendaraan seperti motor atau mobil untuk berkeliling di daerah wisata. Kondisi ini sangat cocok untuk dijadikan peluang dalam menjalankan bisnis sewa kendaraan. Selain mobil dan motor, kendaraan lain yang dapat disewakan biasanya adalah ATV. Para pengunjung pantai akan tertarik untuk menyewa ATV yang dapat digunakan saat ingin mengintari garis pantai.

f. Sewa peralatan pantai

Para wisatawan yang berkunjung di pantai biasanya tidak hanya menikmati keindahan pemandangannya saja. Pada umumnya mereka juga ingin melakukan berbagai kegiatan lain seperti *snorkeling*, *diving*, atau selancar. Tidak semua wisatawan yang datang membawa peralatan sendiri dari rumah. Oleh karena itu, bisnis sewa peralatan untuk berbagai kegiatan wisata pantai sangat berpeluang. Beberapa barang yang dapat disewakan untuk wisatawan diantaranya adalah perahu, papan selancar, alat serang, *diving*, dan lain sebagainya.

g. Sewa tenda dan perlengkapan berkemah

Bagi para wisatawan yang belum puas menikmati pesona pantai di siang hari, biasanya mereka akan melanjutkan untuk bermalam di pantai.

Hal ini tentu saja dapat dijadikan sebagai peluang bisnis wisata pantai yang cukup menjanjikan dengan menyewakan tenda beserta perlengkapan pendukungnya.

h. Sewa tikar dan layang-layang

Para wisatawan yang berkunjung ke pantai biasanya membawa keluarga besarnya. Jumlahnya pun biasanya mencapai 8 hingga 10 orang. Hal ini merupakan salah satu peluang bisnis wisata pantai yang dapat dimanfaatkan dengan membuka bisnis sewa tikar. Selain itu, berjualan atau menyewakan layang-layang juga diminati banyak orang.

Angin pantai yang kencang sangat mendukung Anda untuk berjualan atau menyewakan layang-layang.

3. Diversifikasi usaha

Diversifikasi usaha merupakan upaya untuk melakukan pengembangan usaha di kawasan wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang dengan tujuan untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Diversifikasi usaha tersebut antara lain dengan diversifikasi produk wisata atraksi pada objek wisata, pengembangan objek-objek wisata alam lebih diarahkan menjadi *alternative tourism* dengan pengembangan paket-paket wisata. Oleh karena itu, dengan pengembangan paket wisata, meskipun jumlah kunjungan wisatawan lebih sedikit dibandingkan wisata buatan namun, pendapatan yang didapatkan dari pengeluaran wisatawan menjadi lebih besar.

Pengembangan paket wisata dapat diarahkan pada paket *outbound* (*flying fox, marine bridge, hell barrier, birma crosser, spider web, monkey leader*) yang sifatnya lebih dekat dengan alam, serta tetap dikombinasikan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, baik melalui kegiatan perkemahan, wisata anak (*playground*) ataupun paket wisata minat khusus dengan kegiatan yang dapat memacu adrenalin seperti *motorcross, grass track, downhill mountain bike*. Selain penambahan wahana-wahana bertema, pengelola dapat melakukan diversifikasi atraksi wisata dengan menambahkan event-event budaya seperti tari-tarian pada jam-jam tertentu. Penambahan wahana-wahana ini dapat mengurangi kebosanan pada wisatawan serta meningkatkan omzet penjualan. Hal ini selain menambah kegiatan wisata di dalam objek wisata dan mengenalkan wisata budaya bagi wisatawan

4. Peluang pekerjaan

Keberadaan kawasan wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang sebagai daerah tujuan wisata diharapkan akan membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan, seperti: usaha perdagangan, terbukanya peluang bagi masyarakat untuk menyediakan sewa penginapan, persewaan sepeda motor, berdirinya toko souvenir, dan sebagainya. Kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan ketiga kawasan pantai tersebut sebagai objek pariwisata masih belum secara optimal mampu membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Dari perspektif ekonomi, dampak positif pariwisata yaitu: (1) mendatangkan devisa bagi negara melalui penukaran mata uang asing di daerah tujuan wisata, (2) pasar potensial bagi produk barang dan jasa masyarakat setempat, (3) meningkatkan pendapatan masyarakat yang kegiatannya terkait langsung atau tidak langsung dengan jasa pariwisata, (4)

memperluas penciptaan kesempatan kerja, baik pada sektor-sektor yang terkait langsung seperti perhotelan, restoran, agen perjalanan, maupun pada sektor-sektor yang tidak terkait langsung seperti industri kerajinan, penyediaan produk-produk pertanian, atraksi budaya, bisnis eceran, jasa-jasa lain dan sebagainya, (5) sumber pendapatan asli daerah (PAD), dan (6) merangsang kreativitas seniman, baik seniman pengrajin industri kecil maupun seniman tabuh dan tari yang diperuntukkan konsumsi wisatawan.

Sementara itu, RENSTRA Disparbud Kab. Malang Tahun 2016 – 2021

menyebutkan bahwa pariwisata dikategorikan sebagai salah satu sektor ekonomi penting yang dapat menambah pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, menyediakan lapangan pekerjaan, memerangi kemiskinan, dan melestarikan budaya lokal. Pembangunan ekonomi daerah yang kuat merupakan sebuah perpaduan yang efektif antara pemanfaatan sumberdaya yang ada, dalam hal ini pemanfaatan sumber daya alam maupun budaya dengan masyarakat dan pemerintah.

Kebutuhan tenaga kerja pariwisata makin meningkat sejalan dengan makin berkembangnya usaha jasa pariwisata, sarana pariwisata serta usaha objek dan daya tarik wisata. Oleh karena itu kesempatan kerja di bidang pariwisata perlu juga diperhitungkan, berdasarkan pada jumlah kunjungan wisatawan, jumlah pengeluaran wisatawan dan pertumbuhan sarana pariwisata. Oleh karena itu dalam konteks terbukanya peluang pekerjaan ini, pemerintah sebagai regulator berperan strategis dalam mengupayakan kesempatan yang luas bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi penuh dalam setiap aktivitas ekonomi. Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan potensi yang ada di masyarakat sekitar untuk kemudian melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat terkait pemanfaatan peluang pekerjaan yang ada.

6.3.3 Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Sosial dan Budaya Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

Atribut-atribut sensitif dimensi sosial dan budaya merupakan faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan, masing-masing adalah kebersihan lingkungan, muatan edukasi, dan penerapan sains dan teknologi. Atribut-atribut sensitif ini jika diperbaiki maka diharapkan akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi sosial dan budaya dengan penjelasan sebagaimana berikut ini.

1. Kebersihan lingkungan

Kualitas kebersihan yang merupakan kondisi nyaman secara umum bagi wisatawan yang diciptakan oleh pengelolaan daerah wisata itu sendiri. Baik wisatawan, penduduk lokal, dan pengelola sarana umum atau pribadi diharapkan turut berperan dalam menjaga kualitas kebersihan lingkungan. Kualitas kebersihan lingkungan sangat berperan penting dalam menciptakan suasana lingkungan daya tarik wisata yang nyaman dan memberikan citra positif bagi wisatawan yang datang mengunjunginya.

Keberadaan kawasan wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Namun demikian hal ini berdampak pada kondisi kebersihan lingkungan yang tidak terjaga dengan baik. Sampah yang dihasilkan dari kegiatan pengunjung atau wisatawan tidak dapat dikelola dengan maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran para pengunjung atau wisatawan yang didukung oleh minimnya sarana prasarana kebersihan yang tersedia. Hal ini tentu saja sangat berdampak buruk pada citra daya tarik wisata pantai yang jika dibiarkan daya tarik ini akan semakin ditinggalkan karena kurang baiknya pengelolaan kebersihan pantai.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal

24 (b) menjelaskan setiap orang berkewajiban membantu terciptanya suasana, aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Terkait realisasi kebijakan pemerintah dalam mendukung kebersihan destinasi wisata diselenggarakan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat adalah sampah. Melalui kebijakan yang dibuat bersama dengan dinas-dinas terkait, maka sampah tidak lagi sebagai beban pekerjaan. Terlebih kedatangan wisatawan pada waktu tertentu bisa saja dalam jumlah besar sehingga memungkinkan sampah juga mengalami peningkatan drastis. Oleh karena itu perlu perencanaan dan antisipasi yang dilakukan guna mengatasi permasalahan sampah ini untuk jangka waktu yang panjang. Kebijakan yang dimaksud tentunya mencakup juga ketersediaan SDM yang bertanggung jawab secara penuh terhadap kebersihan pantai dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kebersihan.

Selain itu, penerapan strategi juga berhubungan dengan upaya menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat dan wisatawan untuk selalu menjaga kebersihan objek wisata. Sebagai stakeholder, pemerintah dan masyarakat lokal dapat membuat konsep bersama untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Implementasi kebijakan kebersihan yang dibuat pemerintah untuk wisatawan dapat dilakukan melalui pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara intens. Bisa dengan menyelenggarakan polisi kebersihan untuk memantau dan menindak orang-orang yang membuang sampah sembarangan.

2. Muatan edukasi

Wisata edukasi atau *edutourism* adalah suatu program dimana wisatawan berkunjung ke suatu lokasi wisata dengan tujuan utama untuk memperoleh pengalaman pembelajaran secara langsung di obyek wisata

tersebut. Wisata edukasi (pendidikan) juga merupakan gabungan dari beberapa sub-tipe wisata seperti ekowisata, wisata sejarah dan budaya, wisata pedesaan, dan sebagainya. *Edutourism* merupakan diversifikasi daya tarik wisata dari wisata alam (ekowisata) yang bertujuan untuk memperluas dan memperbanyak produk wisata alam.

Wisata edukasi yang ada di Kabupaten Malang beraneka ragam yang kesemuanya ini dapat dijadikan sebagai bagian dari paket wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang. Wisata pantai dengan muatan edukasi ini dapat dilakukan tidak saja berupa ekosistem laut selatan, namun juga keberadaan habitat seputaran pantai yang sebagian besar masih berupa hutan dan pegunungan. Selain itu, juga dapat berupa peninggalan sejarah seperti Kerajaan Singosari, Kanjuruhan dan budaya-budaya lokal seperti bantengan, dan sebagainya.

Wisata edukasi yang ada di Kabupaten Malang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Wisata Budaya. Kekayaan etnis dan budaya yang dimiliki Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Wayang Topeng Malangan (Topeng Malang). Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan tiga budaya (Jawa Tengah, Madura, dan Tengger). Saat ini bertambah kesenian baru yang kian berkembang pesat di kota Malang yaitu kesenian "Bantengan" kesenian ini merupakan hasil dari kreatifitas masyarakat asli Malang, sejak dahulu sebenarnya kesenian ini sudah dikenal oleh masyarakat Malang namun baru sekaranglah "Bantengan" lebih dikenal oleh masyarakat tidak hanya masyarakat lokal namun juga luar daerah bahkan mancanegara.
- b. Wisata Petik Buah. Terdapat banyak perkebunan perkebunan apel, stroberi, jeruk, dan jambu yang memiliki nilai artistik dan memikat untuk

didatangi. Pengunjung tak hanya bisa memuaskan mata melihat bebuan di pohonnya, tapi juga bisa belajar bagaimana memetik buah tanpa merusak pohon. Adapun lokasi untuk Petik Jeruk di Kecamatan Dau dan Petik Jambu di Selorejo.

c. Wisata Candi. Terdapat banyak candi yang bernilai sejarah yang terletak di Malang. Candi tersebut yaitu Candi Singosari, Jago dan Kidal. Adapun lokasinya berada di Singosari (candi singosari) dan Tumpang (candi jago dan kidal).

d. Wisata Perkebunan. Agrowisata Wonosari Singosari menampilkan keindahan alam berupa perkebunan teh yang hijau. Sejauh mata memandang terhampar hijau pucuk-pucuk daun teh yang segar. Disini pengunjung dapat mengikuti proses pembuatan teh, mulai dari pemetikan daun hingga siap diminum.

e. Wisata Bendungan. Keindahan danau buatan sambil berperahu dan memancing dapat dinikmati di Bendungan Karangates Kecamatan Sumberpucung.

3. Penerapan sains dan teknologi

Penerapan ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi merupakan upaya dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung konsepsi ekowisata di kawasan wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang. Keberadaan ketiga pantai ini untuk menuju konsepsi ekowisata masih memerlukan banyak pengembangan dan disinilah peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Ilmu pengetahuan diarahkan pada pemahaman terhadap ekowisata itu sendiri kepada seluruh stakeholder, sedangkan teknologi berhubungan dengan penerapan teknologi dalam mewujudkan pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang sebagai kawasan ekowisata. Perkembangan akan sosial media yang

demikian pesat, penetrasi dan jangkauannya telah memberikan peluang bagi penyebaran informasi secara cepat dan massif. Oleh karena itu harus menyiapkan langkah-langkah khusus untuk menyikapi semua perkembangan tersebut. Kuncinya adalah para stakeholder harus secara Bersama-sama mempersiapkan SDM, penguasaan terhadap IPTEK, dan aksinya secara terintegrasi.

6.3.4 Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

Atribut-atribut sensitif dimensi aksesibilitas dan utilitas merupakan faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan, masing-masing adalah air bersih, akses komunikasi, fasilitas kesehatan, akses informasi, pemasaran wisata, dan akses transportasi. Atribut-atribut sensitif ini jika diperbaiki maka diharapkan akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi aksesibilitas dan utilitas dengan penjelasan sebagaimana berikut ini.

1. Air bersih

Pengertian air bersih dalam kegiatan kepariwisataan adalah ketersediaan air bersih berupa air tawar sangat diperlukan untuk menunjang fasilitas pengelolaan maupun pelayanan wisata. Sumber air berasal dari sumber air tanah dangkal dan sumber air tanah dalam. Air tanah dalam berpotensi menjadi sumber air bersih untuk minum dan memasak (Kautsar, 2006). Pengamatan ketersediaan air tawar dilakukan dengan cara mengukur jarak antara stasiun penelitian dan lokasi, di mana sumber air tersedia (Masita et al. 2013). Pada kegiatan ekowisata, ketersediaan air bersih berupa air tawar sangat diperlukan untuk menunjang fasilitas pengelolaan maupun pelayanan

ekowisata. Hal ini juga merupakan kriteria penilaian terhadap kelayakan prioritas pengembangan ekowisata pantai (Handayawati, 2010).

Adanya air bersih di suatu lokasi objek wisata, terutama wisata pantai merupakan faktor yang perlu tersedia, baik untuk pengelolaan maupun untuk pelayanan keperluan pengunjung. Air bersih atau air tawar tersebut tidak harus selalu bersumber dari dalam lokasi objek wisata, tetapi bisa saja dialirkan dari luar lokasi, dan akan lebih bagus dan menunjang lagi apabila air bersih tadi bersumber di dalam lokasi.

Pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang memiliki sumber air yang langsung bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pengelola maupun pengunjung, letaknya di sekitar lokasi pantai. Debit air yang dihasilkan rata-rata mencapai 0,8 liter per detik, sehingga masih belum mencukupi kebutuhan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, MCK, dan sebagainya. Seiring perkembangan teknologi, kebutuhan air bersih penduduk sekitar dan wisatawan juga ditopang oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bersumber dari sumber mata air dan adanya 3 bendungan air (Selorejo, Karangates, Sengguruh). Sekalipun demikian, masih sering terjadi kebutuhan air bersih ini masih belum memenuhi kebutuhan baik masyarakat sekitar maupun kebutuhan para wisatawan. Oleh karena itu perlu adanya penanganan secara lebih baik lagi dalam hal pasokan air bersih ini sehingga kebutuhan masyarakat dan khususnya wisatawan akan terpenuhi.

2. Akses Komunikasi

Banyaknya titik "*blank-spot*" signal telekomunikasi di kawasan Pantai Selatan. Berdasarkan data, dari 44 pantai yang terbentang mulai Ampelgading (Pantai Licin) - Donomulyo (Pantai Modangan), baru dua saja yang bisa diakses telepon seluler, yakni Pantai Balekambang dan Pantai Sendangbiru. Hanya satu *provider* yang mendirikan *based transceiver system* (BTS) di

kawasan Pantai Selatan padahal potensi wisata kawasan selatan Kabupaten Malang, terutama pantai-pantai di sepanjang jalur lintas selatan (JLS) sangat besar.

Diskominfo Kabupaten Malang sendiri sebenarnya telah mengusung tema kolaborasi pariwisata, budaya yang didukung piranti teknologi informasi komunikasi. Sebagai implementasi dukungan pariwisata dengan sistem informasi teknologi (IT) ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengusung miniatur *tower* dan *smartphone*. Tujuannya, menunjukkan bahwa masyarakat bisa mempromosikan tempat wisata menggunakan alat komunikasi secara *real time* atau tepat waktu. Sementara wujud budaya dituangkan dalam topeng muka (wajah) Kala, raksasa ciri khas Singosari dan kereta kencana Nagatasaka (kereta kencana Ratu Kencanasari) dari Pantai Selatan. Tema ini diusung dengan harapan ada *provider* yang tertarik menginvestasikan modalnya untuk memperkuat jaringan komunikasi di sepanjang JLS berikut pantai-pantainya.

3. Fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan sarana penunjang kesehatan tidak saja untuk kepentingan wisatawan namun juga bagi masyarakat sekitar. Fasilitas kesehatan yang dimaksud tidak semata keberadaan balai-balai kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit namun juga keperluan istirahat dalam arti jasmani dan rohani bagi wisatawan, seperti air panas yang mengandung mineral, iklim yang sejuk, menyehatkan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah bersama-sama masyarakat perlu untuk mendirikan fasilitas-fasilitas kesehatan yang secara khusus diperuntukkan bagi ketiga kawasan objek wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang

4. Akses informasi

Akses informasi merupakan kemudahan dalam memperoleh informasi terkait keberadaan objek wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang. Daerah pariwisata yang ramah teknologi jelas memudahkan akses para wisatawan. Karena teknologi, wisatawan mudah mengakses informasi suatu destinasi dan situs wisata, mudah memesan transportasi *online* dan mengecek jadwal bus, tidak sulit ketika mencari rumah makan favorit yang menjual makanan khas, hingga mencari hotel beserta harganya.

Oleh karena itu perlu strategi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang beragam guna memberikan kemudahan informasi bagi para wisatawan.

5. Pemasaran wisata

Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. Kabupaten Malang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, namun dalam kegiatan pemasaran produk pariwisata masih belum optimal. Pemasaran berguna untuk memberikan informasi bagi masyarakat yang belum mengetahui informasi mengenai obyek wisata yang akan dituju, khususnya kawasan wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sendiri memiliki sebuah divisi yang bertugas untuk memperkenalkan produk pariwisata Kabupaten Malang kepada konsumen atau wisatawan, sehingga target dan tujuan sebuah perusahaan tercapai yaitu Bidang Pemasaran Pariwisata.

Tugas dan fungsi Bidang Pemasaran Pariwisata pada Peraturan Bupati Malang no 49 tahun 2016 Pasal 25 dan 26 antara lain adalah merencanakan

dan melaksanakan pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri, daya tarik wisata, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.

Terkait hal ini, strategi pemasaran pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang harus dilakukan dengan memperhatikan: (a) keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan pariwisata, dan (b) strategi pemasaran berbasis pemasaran yang bertanggung jawab. Keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan pariwisata dilakukan dengan hal-hal berikut:

- a. Pengoptimalan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pemasaran dan promosi
- b. Koordinasi, intergrasi, dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.
- c. Penguatan promosi bermitra (*co-marketing*) dengan pelaku usaha pariwisata.
- d. Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (*e-commerce*) dengan pelaku usaha pariwisata.
- e. Pengembangan kerjasama pariwisata dalam skema Mitra Praja Utama (MPU).
- f. Pengembangan kerjasama pemasaran pariwisata dengan sister provinces Jawa Timur.

Selanjutnya, strategi pemasaran berbasis pemasaran yang bertanggung jawab, yakni:

- a. Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (*host*) dan penerima manfaat
- b. Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (*paperless & recycleable material*)

- c. Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), seperti pengembangan panduan *do's and don't*, *interpretation kit*, dan film iklan *responsible tourism behaviour*
- d. Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (*reward*) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata
- e. Pengembangan pola-pola sanksi (*punishment*) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggung jawab

6. Akses transportasi

Akses jalan dan infrastruktur pendukung untuk menuju kawasan wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang cukup memprihatinkan, bahkan kondisi itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ketiga pantai ini sangat indah, namun karena kondisi jalan yang tidak mendukung karena banyak lubang, sedangkan jalan itu sendiri jalannya berliku dan banyak tikungan, hal ini sudah barang tentu akan mengurangi minat wisatawan untuk datang berkunjung.

Keberadaan Jalan Lintas Selatan (JLS) di wilayah pesisir Malang selatan mulai membuka potensi Kabupaten Malang, khususnya destinasi wisata pantai. Proyek JLS yang melintasi wilayah Kabupaten Malang yang dimulai dari perbatasan Lumajang hingga perbatasan Blitar dengan 109,7 km terus menapakkan alur yang progresif. Dengan luas lahan yang terpakai 263,28 hektar. Dalam proyek itu juga ada 16 buah jembatan dengan total panjang 735 meter. Jika pembangunan JLS tuntas dipastikan akan terjadi kemajuan yang luar biasa di wilayah Malang Selatan. Karena selama ini akses jalan memang menjadi kendala bagi kemajuan wilayah yang memiliki berbagai potensi alam mulai tambang hingga wisata. Oleh karena itu perlu dilakukan secepatnya perbaikan-perbaikan infrastruktur jalan dan sekaligus menyediakan alat-alat

transportasi yang memiliki akses secara langsung ke kawasan wisata wisata pantai Ngliprep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang.

6.3.5 Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Kelembagaan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

Atribut-atribut sensitif dimensi kelembagaan merupakan faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan, masing-masing adalah kebersihan lingkungan, muatan edukasi, dan penerapan sains dan teknologi. Atribut-atribut sensitif ini jika diperbaiki maka diharapkan akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi kelembagaan dengan penjelasan sebagaimana berikut ini.

1. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Amanat pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Malang itu sendiri telah diatur dalam Pasal 9 Huruf

(b) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Terkait Pembangunan Destinasi Pariwisata.

2. Peran Lembaga LITBANG

Lembaga penelitian dan pengembangan merupakan pusat penelitian yang memfokuskan kajian penelitian di bidang kepariwisataaan. Keberadaan Lembaga ini diharapkan akan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni di bidang kepariwisataaan melalui penelitian dasar dan terapan dalam berbagai aspek kritikal untuk menjawab berbagai tantangan kepariwisataaan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan umat manusia.

Selebihnya lembaga ini diharapkan mampu berperan dalam menunjang bidang keahlian kepariwisataaan baik akademik maupun profesional, melalui

pengembangan pendidikan formal dan non formal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu serta menunjang industri kepariwisataan melalui pengembangan produk-produk pariwisata yang inovatif di Kabupaten Malang.

Selama ini keberadaan lembaga ini masih semata lembaga yang bernaung di bawah pemerintah kabupaten, yakni Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Pemerintah Kabupaten Malang.

Lembaga ini adalah perangkat daerah yang merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di pemerintahan kabupaten Malang.

Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi peran lembaga penelitian dan pengembangan, baik dari pemerintah maupun kalangan akademisi yang nantinya akan menjadi pusat penelitian yang memfokuskan pada kajian penelitian di bidang kepariwisataan secara khusus pada kawasan wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang. Lembaga ini diharapkan akan berperan menjadi pusat inkubasi dan desiminasi keilmuan kepariwisataan serta menjadi agen perencanaan kepariwisataan yang dapat memberikan sumbangsih nyata bagi proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang.

3. Regulasi Pemerintah Pusat

Regulasi pemerintah Republik Indonesia terkait pembangunan ekowisata sebenarnya telah ditetapkan, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistemnya; 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 4) Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berbagai regulasi dan kebijakan tentang kepariwisataan masih terdapat disharmoni antar peraturan perundang-undangan, baik tujuan maupun kewenangan dalam pengelolaan pariwisata. Kejelasan tujuan dan ruang lingkup dalam pengaturan perundang-undangan ekowisata perlu dilakukan secara kompeherensif dan terstruktur sehingga dinamika substansi yang terkandung dan/atau tertuang dalam undang-undang tersebut tidak bersifat parsial. Selain itu, harus dipahami bahwa ekowisata sesungguhnya bukan harus dimaknai sebagai kegiatan perjalanan menuju alam liar/*remote area* saja, melainkan harus ditegakan di setiap ruang atau destinasi pariwisata. Terkait hal ini maka tentunya menjadi sangat penting untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan keberadaan regulasi perundangan ini sehingga nantinya akan mampu menjadi payung hukum bagi pengembangan ekowisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang.

4. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi

Payung hukum pengembangan ekowisata sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017–2032. Strategi pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan mengembangkan daya tarik wisata yang meliputi wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang terintegrasi secara spasial dengan memperhatikan keunggulan dan daya saing secara global melalui: (a) pengidentifikasian potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia; (b) penetapan potensi daya tarik wisata unggulan; (c) pembentukan jalur pengembangan wisata yang

terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur wilayah; (d) pengembangan kegiatan penunjang wisata; (e) pelestarian tradisi atau kearifan masyarakat lokal; dan (f) peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada masyarakat dan/atau perajin lokal untuk pengembangan pariwisata.

Terkait hal ini perlu kiranya diterbitkan Peraturan Daerah (PERDA) yang secara khusus mampu menjadi payung hukum bagi terwujudnya pengembangan ekowisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang.

5. Peran Institusi Pemerintah

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu program andalan Pemerintah Kabupaten Malang dan saat ini obyek wisata Pantai Balekambang dijadikan sebagai ikon wisata Kabupaten Malang. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui obyek wisata Pantai Balekambang, Pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya untuk dapat menjalankan peranannya sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator dengan semaksimal mungkin. Dimana dari keempat peran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.

Sebagai entrepreneur, pemerintah Kabupaten Malang mampu meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata dari tahun ke tahun. Sebagai koordinator, Pemerintah Kabupaten Malang telah berhasil menciptakan perencanaan yang terpadu dalam pengembangan Pariwisata melalui RPJMD 2016-2021 dan Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa yang mengelola sektor Pariwisata. Sebagai fasilitator, pemerintah Kabupaten Malang memfokuskan pembangunan pariwisata yang diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur Jalan Lintas Selatan (JLS) dan pengembangan wilayah. Dan sebagai stimulator, Pemerintah Kabupaten Malang mampu

menarik para investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata dengan Perusahaan Daerah Jasa Yasa selaku pengelola.

Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa peran pemerintah belum optimal untuk melakukan pengembangan potensi wisata pantai dikarenakan pengelolaan kawasan pantai dan coban berada di bawah Perum Perhutani. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang berusaha menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani dalam pengelolaan pantai, khususnya kawasan wisata pantai Ngliep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang.

Kerjasama pengelolaan pariwisata tersebut akan ditindaklanjuti untuk pantai-pantai lainnya dan wana wisata coban yang ada di wilayah Kabupaten Malang, namun area wisatanya di kawasan milik Perhutani agar potensi wisata dapat dioptimalkan. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan pengelolaannya bisa lebih baik dan profesional.

6. Peran pihak swasta

Peran pihak swasta dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang masih belum ada. Padahal sebenarnya peran swasta ini mestinya akan mampu mendukung penyediaan prasarana dan pengelolaannya di masing-masing obyek wisata yang ada. Pihak swasta juga bisa berperan dalam pengembangan atraksi, penyediaan akomodasi, fasilitas. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan ekowisata pantai Ngliep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang, khususnya dalam hal penyediaan prasarana dan pengelolaannya di masing-masing obyek wisata yang ada. Pihak swasta berperan dalam pengembangan atraksi, penyediaan akomodasi, fasilitas, dan sebagainya.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitik. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2003). Pengertian metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2013).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah positivistik kuantitatif yang dilakukan secara longitudinal karena sifatnya berkelanjutan untuk jangka waktu yang relatif panjang mengikuti proses interaktif ragam variabel. Desain longitudinal dirancang untuk mengumpulkan data pada lebih dari satu kasus dan pada kurun waktu tertentu ketika data dikumpulkan secara kuantitatif terhadap variabel yang kemudian diuji lewat pengembangan secara empirik di lapangan (Bryman, 2001).

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang ini dilaksanakan pada 3 (tiga) lokasi pantai kawasan pantai selatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Ketiga lokasi pantai tersebut adalah pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang. Penelitian dilaksanakan antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.



Sumber : Disparta Kab. Malang, 2018.

Gambar 4.1.

Peta Lokasi Wisata Rekreasi Pantai Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

4.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan dengan menetapkan 3 (tiga) lokasi titik sampel, yakni pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang.

Pengembangan ekowisata yang dimaksud adalah pengembangan wisata rekreasi pantai pada ketiga titik lokasi sampel. Wisata rekreasi pantai merupakan wisata yang dilakukan pengunjung dengan pantai sebagai objek utama wisata. Aktivitas yang dilakukan pengunjung pada wisata rekreasi pantai umumnya bersantai, bermain air, atau berenang di tepi pantai (Hidayat, 2011), serta menikmati pemandangan dan panorama alam, seperti matahari terbit (*sunrise*) ataupun matahari terbenam (*sunset*) (Sanam dan Adikampana, 2014).

Pengukuran status pengembangan ekowisata berkelanjutan pada ketiga lokasi titik sampel dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan dimensi-dimensi keberlanjutan berikut atribut-atributnya untuk kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode *Multidimensional Scaling* (MDS) pendekatan *Rap-EcoBeach* (Modifikasi RAPPFISH). Dimensi dan atribut keberlanjutan itu sendiri adalah sebagai berikut: (1) Dimensi Lingkungan, jumlah atribut 10 buah; (2) Dimensi Ekonomi, jumlah atribut 8 buah; (3) Dimensi Sosial & Budaya, jumlah atribut 10 buah; (4) Dimensi Aksesibilitas & Utilitas, jumlah atribut 10 buah; dan (5) Dimensi Kelembagaan jumlah atribut 8 buah.

4.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian serta belum mengalami pengolahan data. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik kuisisioner dengan tujuan untuk menggali pendapat pakar (*judgment expert*) terkait pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan, yakni pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang. Hasil jawaban para pakar ini berupa distribusi skor kuisisioner meliputi skor atribut pada masing-masing Dimensi Lingkungan, Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial & Budaya, Dimensi Aksesibilitas & Utilitas, dan Dimensi Kelembagaan.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah mengalami pengolahan sudah dalam bentuk data-data yang sebelumnya sudah tersedia baik

pada dinas ataupun instansi pemerintah di Kabupaten Malang. Data-tata sekunder tersebut adalah data biofisik pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang; profil Kabupaten Malang; dan sebagainya.

4.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain adalah berikut ini.

1) Kuisisioner/Angket

Kuisisioner/angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013:199). Kuisisioner dalam penelitian ini adalah jenis kuisisioner tertutup, yaitu kuisisioner yang telah dilengkapi dengan pilihan jawaban sehingga responden hanya memberi tanda pada jawaban yang dipilih. Angket dalam penelitian ini terdiri dari daftar butir-butir pernyataan atribut-atribut masing-masing dimensi pengembangan ekowisata berkelanjutan. Dimensi-dimensi tersebut adalah Dimensi Lingkungan, Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial & Budaya, Dimensi Aksesibilitas & Utilitas, dan Dimensi Kelembagaan.

2) Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi dilakukan terhadap subjek dan objek penelitian yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan kondisi eksiting lokasi penelitian terkait pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang bersumber pada hal-hal atau benda-benda yang tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2015:135). Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai pendukung dalam mendokumentasikan data-data penelitian, seperti profil pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang, kondisi fisik pantai, dan sebagainya.

4.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari dimensi-dimensi pengembangan ekowisata berkelanjutan beserta atribut yang menyertainya. Adapun penjelasan terkait dimensi-dimensi berikut atributnya disampaikan berikut ini.

1) Dimensi Lingkungan

Dimensi lingkungan merujuk pada pemahaman bahwa keberlanjutan sumberdaya kawasan pantai selatan yang dalam hal ini adalah pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang dengan potensi wisata rekreasi pantai atau perluasan sumberdaya alam berikut lingkungan fisik diarahkan untuk menjamin kehidupan jangka panjang dan keberlanjutan sumberdaya lingkungan pantai itu sendiri. Atribut-atribut dimensi ini adalah sebagai berikut: (1) Kedalaman perairan; (2) Tipe pantai; (3) Lebar pantai; (4) Material dasar perairan; (5) Kecepatan arus; (6) Kemiringan pantai; (7) Kecerahan perairan; (8) Penutupan lahan pantai (vegetasi); (9) Biota berbahaya; dan (10) Ketersediaan air tawar.

Deskripsi atribut-atribut dan kriteria skor dimensi lingkungan dalam

Pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang disampaikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Atribut-atribut dan Kriteria Penilaian Dimensi Lingkungan dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

No.	Atribut-atribut	Skor	Good	Bad	Kriteria Penilaian
1.	Kedalaman perairan	0, 1, 2, 3	3	0	[3] 0-3 m; [2] >3-6 m; [1] >6-10 m; [0] >10 m
2.	Tipe pantai	0, 1, 2, 3	3	0	[3] Pasir putih; [2] Pasir putih, sedikit karang; [1] Pasir hitam, berkarang, sedikit terjal; [0] Lumpur, berbatu terjal
3.	Lebar pantai	0, 1, 2, 3	3	0	[3] >15 m; [2] 10-15 m; [1] 3-10 m; [0] <3 m
4.	Material dasar perairan	0, 1, 2, 3	3	0	[3] Pasir; [2] Karang berpasir; [1] Pasir berlumpur; [0] Lumpur
5.	Kecepatan arus	0, 1, 2, 3	3	0	[3] 0-0,17 m/dt; [2] 0,17-0,34 m/dt; [1] 0,34-0,51 m/dt; [0] >0,51 m/dt
6.	Kemiringan pantai	0, 1, 2, 3	3	0	[3] <100; [2] 100-250; [1] >250-450; [0] >450
7.	Kecerahan perairan	0, 1, 2, 3	3	0	[3] >10 m; [2] >5-10 m; [1] 3-5 m; [0] <2 m
8.	Penutupan lahan pantai (vegetasi)	0, 1, 2, 3	3	0	[3] Kelapa, lahan terbuka; [2] Semak belukar rendah, savanna; [1] Belukar tinggi; [0] Hutan bakau, pemukiman, pelabuhan
9.	Biota berbahaya	0, 1, 2, 3	3	0	[3] Tidak ada; [2] Bulu babi; [1] Bulu babi, ikan pari; [0] Bulu babi, ikan pari, lepu, hiu
10.	Ketersediaan air tawar	0, 1, 2, 3	3	0	[3] <0,5 km; [2] >0,5-1 km; [1] >1-2 km; [0] >2 km

Sumber : Data diolah, 2019.

2) Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi merujuk pada pengertian pengembangan kawasan pantai selatan memiliki keberlanjutan kegiatan ekonomi dengan nilai manfaat jangka panjang dengan layak serta mampu memberikan manfaat ekonomi kepada stakeholders secara adil dan merata. Atribut-atribut dimensi ini, yaitu: (1) Peningkatan pendapatan keluarga; (2) Kontribusi perekonomian daerah; (3) Peluang pekerjaan; (4) Diversifikasi usaha; (5) Pengembangan produk lokal; (6) Pengembangan jasa wisata lain; (7) Retribusi wisatawan; dan (8) Peningkatan daya beli wisatawan.

Deskripsi atribut-atribut dan kriteria skor dimensi ekonomi dalam Pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang disampaikan sebagaimana Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Atribut-atribut dan Kriteria Penilaian Dimensi Ekonomi dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

No.	Atribut-atribut	Skor	Good	Bad	Kriteria Penilaian
1.	Peningkatan pendapatan keluarga	0, 1, 2	2	0	[0] Kurang dari UMR Rp.1.010. 000,- [1] Cukup, fluktuatif; [2] Tinggi, UMR Rp.1.010.000,-
2.	Kontribusi perekonomian daerah	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada; [1] Ada, kurang; [2] Ada, kontribusi tinggi
3.	Peluang pekerjaan	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada; [1] Tidak pasti, kadang ada; [2] Tinggi
4.	Diversifikasi usaha	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada; [1] Ada, kurang; [2] Ada, terus-menerus
5.	Pengembangan produk lokal	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada [1] Ada, sedikit; [2] Ada, banyak

No.	Atribut-atribut	Skor	Good	Bad	Kriteria Penilaian
6.	Pengembangan jasa wisata lain	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada; [1] Ada, sedikit [2] Ada, banyak
7.	Retribusi wisatawan	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada retribusi; [1] Ada, tapi sukarela [2] Ada retribusi
8.	Peningkatan daya beli wisatawan	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada; [1] Ada, tapi rendah [2] Ada, tinggi

Sumber : Data diolah, 2019.

3) Dimensi Sosial dan Budaya

Dimensi sosial-budaya merujuk pada pemahaman bahwa pengembangan kawasan pantai selatan akan tetap menjaga dan menghormati keaslian nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat lokal, melestarikan nilai-nilai warisan budaya dan adat yang ada, dan berkontribusi dalam meningkatkan rasa toleransi serta pemahaman antar-budaya. Atribut-atribut dimensi ini, yaitu: (1) Tingkat pendidikan masyarakat; (2) Tingkat pengangguran; (3) Kelestarian budaya; (4) Muatan edukasi; (5) Partisipasi masyarakat; (6) Penerapan sains dan teknologi; (7) Pendidikan dan pelatihan pariwisata; (8) Kebersihan lingkungan; (9) Konflik sosial; dan (10) Tingkat keamanan.

Deskripsi atribut-atribut dan kriteria skor dimensi sosial-budaya dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang disampaikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3.

Atribut-atribut dan Kriteria Penilaian Dimensi Sosial-Budaya dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

No.	Atribut-atribut	Skor	Good	Bad	Kriteria Penilaian
1.	Tingkat pendidikan masyarakat	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak tamat/tamat SD, [1] Tamat SMP- SMA, [2] Tidak atau tamat PT

No.	Atribut-atribut	Skor	Good	Bad	Kriteria Penilaian
2.	Tingkat pengangguran	0, 1, 2	2	0	[0] Tinggi, [1] Sedang, [2] Rendah
3.	Kelestarian budaya	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada; [1] Ada, sedikit; [2] Ada, banyak
4.	Muatan edukasi	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada; [1] Ada, sedikit; [2] Ada, banyak
5.	Partisipasi masyarakat	0, 1, 2, 3	3	0	[0] Sangat buruk, tidak ada; [1] Buruk, partisipasi pasif; [2] Ada, situasional; [3] Sangat baik, aktif;
6.	Penerapan sains dan teknologi	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada; [1] Ada, situasional [2] Ada, cukup baik
7.	Pendidikan dan pelatihan pariwisata	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada; [1] Ada; [2] Ada
8.	Kebersihan lingkungan	0, 1, 2	2	0	[0] Kotor; [1] Bersih, sebagian; [2] Bersih dan terawat
9.	Konflik sosial	0, 1, 2	2	0	[0] Ada, banyak [1] Ada, terkadang [2] Tidak ada
10.	Tingkat keamanan	0, 1, 2, 3	3	0	[0] Tidak aman; [1] Cukup aman; [3] Sangat aman

Sumber : Data diolah, 2019.

4) Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas

Dimensi aksesibilitas dan utilitas memberikan pemahaman bahwa pengembangan kawasan pantai selatan memiliki dukungan berupa kemudahan akses, baik akses informasi, infrastruktur, fasilitas sarana dan prasarana lainnya sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para wisatawan. Utilitas merujuk pada pengertian bahwa pengembangan kawasan pantai selatan bisa memberi manfaat langsung kepada pengguna jasa wisata rekreasi pantai, seperti penerangan, air bersih, pengelolaan sampah, dan sebagainya. Atribut-atribut dimensi ini, yaitu: (1) Sarana dan prasarana wisata; (2) Akses transportasi; (3) Akses

informasi; (4) Promosi wisata; (5) Akomodasi; (6) Air bersih; (7) Listrik; (8) Fasilitas kesehatan; (9) Akses komunikasi; dan (10) Pemasaran wisata.

Deskripsi atribut-atribut dan kriteria skor dimensi aksesibilitas, dan utilitas dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Atribut-atribut dan Kriteria Penilaian Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

No.	Atribut-atribut	Skor	Good	Bad	Kriteria Penilaian
1.	Sarana dan prasarana wisata	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada [1] Kurang memadai; [2] Baik, memadai
2.	Akses transportasi	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada; [1] Ada, tetapi sulit diakses; [2] Ada, mudah diakses
3.	Akses informasi	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada [1] Ada, tetapi sulit diakses; [2] Ada, mudah diakses
4.	Promosi wisata	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada; [1] Ada, tetapi sulit diakses; [2] Ada, mudah diakses
5.	Akomodasi	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada [1] Ada, tetapi jarang; [2] Ada, banyak tersedia
6.	Air bersih	0, 1, 2	2	0	[0] Kurang, tidak mencukupi kebutuhan; [1] Sedang; terkadang cukup terkadang tidak; [2] Baik, melimpah
7.	Listrik	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada; [1] Ada, tetapi tidak cukup; [2] Ada, cukup
8.	Fasilitas kesehatan	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada; [1] Ada, tetapi jarang; [2] Ada, banyak tersedia
9.	Akses komunikasi	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada; [1] Ada, jarang; [2] Ada, sering
10.	Pemasaran wisata	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada; [1] Ada, tetapi jarang; [2] Ada, banyak

Sumber : Data diolah, 2019.

5) Dimensi Kelembagaan

Dimensi kelembagaan merujuk pada pemahaman bahwa pengembangan kawasan pantai selatan didukung regulasi atau payung hukum serta peran serta institusi/lembaga termasuk sumberdaya manusianya. Dukungan juga terkait manajemen pengelolaan kepariwisataan di suatu destinasi, baik dari unsur pemerintah, swasta ataupun masyarakat. Adapun atribut-atribut dimensi ini adalah sebagai berikut: (1) Regulasi pemerintah pusat; (2) Regulasi pemerintah daerah (PERDA); (3) Norma/hukum adat; (4) Peran institusi pemerintah; (5) Peran pihak swasta; (6) Peran LITBANG; (7) Peran LSM/Akademisi; dan (8) Peran lembaga masyarakat lokal.

Deskripsi atribut-atribut dan kriteria skor dimensi kelembagaan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang disampaikan sebagaimana Tabel 4.5.

Tabel 4.5.

Atribut-atribut dan Kriteria Penilaian Dimensi Kelembagaan dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

No.	Atribut-atribut	Skor	Good	Bad	Kriteria Penilaian
1.	Regulasi pemerintah pusat	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada, [1] Ada, kurang terimplementasi [2] Ada, terimplementasi baik
2.	Regulasi pemerintah daerah (PERDA)	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada, [1] Ada, kurang terimplementasi [2] Ada, terimplementasi baik
3.	Norma/hukum adat	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada, [1] Ada, kurang berfungsi [2] Ada, berfungsi baik
4.	Peran institusi pemerintah	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada, [1] Ada, kurang aktif [2] Ada, berperan baik

No.	Atribut-atribut	Skor	Good	Bad	Kriteria Penilaian
5.	Peran pihak swasta	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada, [1] Ada, kurang berperan [2] Ada, berperan baik
6.	Peran LITBANG	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada, [1] Ada, kurang berperan [2] Ada, berperan baik
7.	Peran LSM/Akademisi	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada, [1] Ada, kurang berperan [2] Ada, berperan baik
8.	Peran lembaga masyarakat lokal	0, 1, 2	2	0	[0] Tidak ada, [1] Ada, kurang berperan [2] Ada, berperan baik

Sumber : Data diolah, 2019.

4.7 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan sesuai runutan pada tujuan penelitian sehingga penentuan metode analisis data disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Metode analisis data disampaikan penjelasan sebagaimana berikut ini.

4.7.1 Metode *Multi Dimensional Scaling* (MDS) pendekatan *Rap-EcoBeach* (*Modifikasi RAPFISH*)

Analisis status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang dilakukan dengan menggunakan metode *Multi Dimensional Scaling* (MDS) pendekatan *Rap-EcoBeach* (*Modifikasi RAPFISH*).

RAPFISH (*Rapid Appraisal for Fisheries*) dikembangkan oleh *University of British Columbia, Canada* untuk menilai keberlanjutan (Kavanagh dan Pitcher, 2004).

RAPFISH digunakan untuk menentukan indeks tingkat keberlanjutan dari berbagai dimensi keberlanjutan. Teknik *RAPFISH* telah dikembangkan untuk melakukan evaluasi tingkat keberlanjutan pembangunan suatu obyek penelitian dengan melakukan modifikasi dimensi dan atributnya sesuai dengan aspek yang dievaluasi. Analisis *Rap-EcoBeach* (*Modifikasi RAPFISH*) dilakukan pada masing-

masing dimensi, yakni Dimensi Lingkungan, Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial & Budaya, Dimensi Aksesibilitas & Utilitas, dan Dimensi Kelembagaan.

Penggunaan *Rap-EcoBeach* (Modifikasi *RAPFISH*) dilakukan pada masing-masing atribut dalam setiap dimensi keberlanjutan yang telah dilakukan *skoring*. Metode *multidimensional scaling* (MDS) pendekatan *Rap-EcoBeach* mencerminkan tingkat keberlanjutan di setiap dimensi yang dikaji berdasarkan atribut-atribut penyusun dan disesuaikan dengan ketersediaan informasi yang dapat diperoleh dari karakter sumberdaya yang dikaji (Pitcher dan Preikshot, 2000).

Metode *Multi Dimensional Scaling* (MDS) pendekatan *Rap-EcoBeach* (Modifikasi *RAPFISH*) pada dasarnya adalah metode *multivariate* yang dapat menangani data *non-metric* dan juga dikenal sebagai salah satu ordinasasi dalam ruang (dimensi) yang diperkecil (*ordination in reduced space*). Ordinasasi sendiri merupakan proses yang berupa “plotting” titik objek (posisi) di sepanjang sumbu-sumbu disusun menurut hubungan tertentu (*ordered relationship*) atau dalam suatu sistem grafik yang terdiri dari dua atau lebih (Legendre dan Legendre, 2000).

Kelebihan lain metode ini dapat merangkum data yang multidisipliner yang didapat di lapangan sehingga menghasilkan banyak informasi secara kuantitatif dan proyeksi. Pendekatan dengan metode ini telah banyak dikembangkan untuk menganalisis lingkungan (Susilo, 2003).

RAPFISH (*Rapid Appraisal for Fisheries*), obyek yang diamati dipetakan ke dalam ruang dua atau tiga dimensi, sehingga obyek atau titik tersebut diupayakan ada sedekat mungkin dengan titik asal. Teknik ordinasasi (penentuan jarak) di dalam MDS didasarkan pada *Euclidian Distance* yang dalam ruang

berdimensi n ditulis $d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 + \dots}$ Konfigurasi atau ordinasasi dari suatu obyek atau titik di dalam MDS kemudian diaproksimasi dengan

meregresikan jarak Euclidian (d_{ij}) dari titik i ke titik j dengan titik asal (δ_{ij}) dengan persamaan berikut : $d_{ij} = \alpha + \beta\delta_{ij} + \epsilon$.

Teknik meregresikan persamaan di atas adalah dengan Metode *Least Square* yang didasarkan pada akar dari Euclidian distance (*squared distance*) atau disebut dengan ALSCAL. Metode ALSCAL ini mengoptimasi jarak kuadrat (*squared distance*) terhadap data kuadrat (titik asal = oijk), yang dalam tiga dimensi (i, j, k), formula nilai *S-Stress* dihitung sebagai berikut :

$$S = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \left[\frac{\sum_i \sum_j (d_{ijk}^2 - o_{ijk}^2)^2}{\sum_i \sum_j o_{ijk}^4} \right]}$$

Jarak antar lokasi dalam pengelolaan lahan gambut konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dihitung dengan metode *euclidean distance* berdimensi n , rumus :

$$d_{ijk}^2 = \sum_{a=1}^r w_{ka} (x_{ia} - x_{ja})^2$$

Metode *Multidimensional Scalling* (MDS) secara garis besar dijelaskan sebagai berikut (1) hasil data lapangan (primer dan sekunder) dari semua dimensi dilakukan skoring; (2) ditentukan acuan utama baik (*Good*) dan buruk (*Bad*) dengan melakukan skor baik dan buruk pada semua atribut; (3) membuat dua titik utama lainnya yaitu "titik tengah" yang merupakan titik "buruk" dan titik "baik". Dua titik acuan utama tambahan ini menjadi acuan arah vertikal ("atas" atau "*up*" dan "bawah" atau "*down*"); dan (4) membuat titik acuan tambahan yang disebut sebagai jangkar (*anchors*) yang dapat digunakan untuk membantu hasil ordinasi.

Titik tersebut sebagai titik-titik bertindak sebagai *stabilizer* yang membantu semacam "amplop" sehingga titik-titik lokasi penelitian tidak berada di luar amplop.

Titik-titik ini juga berguna dalam melakukan analisis regresi untuk menghitung "*stress*" yang merupakan bagian dari MDS (Susilo, 2003).

Metode MDS pendekatan *Rap-EcoBeach* (Modifikasi *RAPFISH*) untuk mengukur status pengembangan ekowisata berkelanjutan pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (Kavanagh and Pitcher, 2004).

1) Mengevaluasi dan menetapkan atribut dari kelima dimensi (review atribut)

Atribut merupakan parameter dari dimensi yang mewakili kondisi *existing* lokasi penelitian dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Atribut yang telah disusun kemudian dilakukan evaluasi untuk dilihat hubungan antar atribut, apakah memiliki hubungan linier atau tidak. Jika terdapat hubungan linier maka disatukan menjadi satu atribut. Evaluasi dan penetapan atribut dilakukan dengan pendekatan *scientific judgement* berdasarkan pendekatan keilmuan yang sesuai baik berdasarkan hasil kajian maupun sumber pustaka lainnya. Penetapan atribut juga dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data dari atribut tersebut.

2) Memberikan penilaian terhadap setiap atribut yang telah disusun dari masing-masing dimensi dalam skala ordinal 0-2 atau 0-3

Atribut dari setiap dimensi dilakukan penilaian berdasarkan *scientific judgement* oleh para pakar sesuai dengan kondisi atribut terkini dibandingkan dengan standar yang berlaku maupun pada kondisi normal.

Pemberian skor ordinal pada rentang 0-2, atau 0-3 atau sesuai dengan karakter atribut yang menggambarkan strata penilaian dari terendah (0) sampai yang tertinggi (3). Skor 0 adalah buruk (*Bad*) dan skor 3 adalah baik (*Good*). Penilaian atribut dilakukan dengan membandingkan kondisi atribut dengan memberikan penilaian buruk (0), sedang (1), baik (2) atau sangat baik (3).

3) Menghitung nilai indeks dan menilai status keberlanjutan

Penilaian terhadap keseluruhan atribut dari masing-masing dimensi dikategorikan ke dalam baik hingga buruk. Asumsi bahwa kinerja pengelolaan terletak antara 0 sampai 100% atau buruk sampai dengan baik. Diantara nilai buruk sampai baik maka ada interval nilai kinerja yaitu cukup dan kurang, sehingga diperoleh empat tingkatan kinerja yaitu buruk, kurang, sedang dan baik. Tingkatan kinerja dibagi menjadi 4 tingkat sehingga diperoleh interval 0, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Hasil penilaian kinerja atribut dari masing-masing dimensi dipetakan kedalam dua titik acuan yang merupakan titik buruk (*Bad*) dan titik baik (*Good*).

Nilai indeks untuk dimensi-dimensi pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang terdiri dari empat (4) kategori selengkapnya disajikan dalam Tabel 4.6.

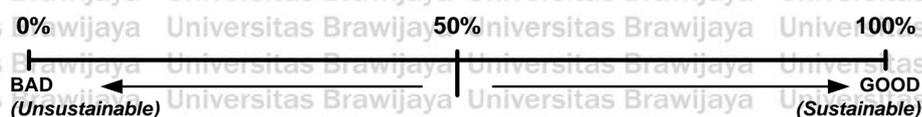
Tabel 4.6.
Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

No.	Nilai Indeks	Kategori	Keterangan
1.	0,00-24,99	Buruk	Tidak Berkelanjutan <i>Bad : Unsustainable</i>
2.	25,00-49,99	Kurang	Kurang Berkelanjutan <i>Insufficient : Less sustainable</i>
3.	50,00-74,99	Cukup	Cukup Berkelanjutan <i>Fair : Fairly Sustainable</i>
4.	75,00-100	Baik	Berkelanjutan <i>Good : Very Sustainable</i>

Sumber : Dimodifikasi dari Susilo (2003).

Posisi titik keberlanjutan dapat digambarkan dalam bentuk garis sumbu vertikal ataupun sumbu horisontal. Nilai indeks keberlanjutan berada pada nilai 0% (buruk) sampai 100% (baik). Jika dimensi yang dinilai dengan nilai indeksnya

berada di bawah 50% maka mempunyai nilai yang kurang atau kurang berkeberlanjutan (*unsustainable*), dan jika dimensi yang dinilai berada di atas nilai 50% maka dimensi dari sistem yang dinilai dapat dikatakan berkelanjutan (*sustainable*). Penilaian ini dapat diilustrasikan pada Gambar 4.2.



Sumber : Susilo (2003).

Gambar 4.2.

Posisi Titik Keberlanjutan dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

Analisis Monte Carlo (MC)

Analisis dengan metode Monte Carlo berguna untuk mempelajari (1) pengaruh kesalahan dalam skor atribut yang disebabkan oleh pemahaman kondisi sumberdaya; (2) pengaruh variasi pemberian skor akibat perbedaan opini atau penilaian oleh penelitian yang berbeda; (3) Stabilitas proses analisis MDS yang berulang-ulang (*iterasi*) dan juga melihat kualitas stabilitas titik-titik acuan metode yang dilakukan; (3) kesalahan memasukan data atau data yang hilang; dan (4) Tingginya nilai *stress* hasil analisis (Kavanagh and Pitcher, 2004).

Analisis *Monte Carlo* dilakukan pada selang kepercayaan 95%. Hasil analisis *Monte Carlo* kemudian dibandingkan dengan hasil analisis MDS. Hasil perbandingan ini jika perbedaannya kecil maka menunjukkan bahwa dampak dari kesalahan pemberian skor relatif kecil, dampak dari variasi beberapa pemberian skor terhadap atribut relatif kecil, penilaian dengan MDS yang berulang-ulang menjadi stabil, kesalahan data atau kehilangan data menjadi relatif kecil.

Membandingkan hasil analisis *Monte Carlo* (MC) dan analisis MDS pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5% sehingga diperoleh bahwa selisih nilai kedua analisis tersebut lebih besar ($MC-MDS > 5\%$) atau lebih kecil ($MC-MDS$

< 5%). Jika nilai selisih kedua analisis ini > 5% maka hasil analisis MDS *tidak memadai* sebagai penduga nilai indeks keberlanjutan, dan jika nilai selisih kedua analisis tersebut <5% maka hasil analisis MDS *memadai* untuk menduga nilai indeks keberlanjutan.

Goodness of Fit (Penilaian ketepatan)

Ketepatan analisis MDS (*Goodness of fit*) ditentukan oleh nilai S-Stress yang dihasilkan dari perhitungan nilai S tersebut. Nilai *stress* rendah menunjukkan ketepatan yang tinggi (*Good of fit*), sementara nilai S tinggi menunjukkan sebaliknya. Selanjutnya dalam Rapsfish, model yang baik ditunjukkan dengan nilai *stress* yang lebih kecil dari 0,25 dan sebaliknya jika nilai *stress* lebih tinggi dari 0,25 maka hasil MDS memiliki ketepatan yang rendah.

4.7.2 Analisis Leverage (Analisis Sensitivitas)

Analisis leverage atau analisis sensitivitas adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan atribut-atribut sensitif yang berpengaruh atau berperan sebagai faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Faktor pengungkit merupakan atribut yang keberadaannya berpengaruh sensitif terhadap peningkatan atau penurunan status keberlanjutan. Oleh karenanya, atribut-atribut sensitif ini perlu diberi perhatian secara khusus yang sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan status pengembangan ekowisata kawasan pesisir pantai itu sendiri.

Analisis Leverage atau analisis sensitivitas digunakan untuk mengetahui efekstabilitas jika salah satu atribut dihilangkan saat dilakukannya ordinasi. Untuk sebanyak M atribut, maka analisis Leverage dilakukan M+1 kali penghitungan, yaitu 1 kali penghitungan terhadap seluruh atribut (M atribut) dan M kali terhadap salah satu atribut jika dihilangkan. Semakin besar nilai RMS maka semakin besar peranan atribut tersebut terhadap sensitivitas status keberlanjutan. Analisis

Rapfish memungkinkan untuk menganalisis *leverage* (sensitivitas atribut terhadap nilai indeks keberlanjutan).

Pengaruh setiap atribut dilihat dalam bentuk perubahan *root mean square* (RMS), khususnya pada sumbu x terutama pada skala berkelanjutan sumberdaya dan perubahan sumbu y tidak diperhitungkan. Hal ini dikarenakan hanya untuk melihat perubahan RMS. Rumus RMS tersebut adalah:

$$RMS = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \{Vf(i,1) - Vf(,1)\}^2}{n}}$$

Dimana :

$Vf(i1)$ = nilai hasil MDS (setelah rotasi dan *flifing*); dan $Vf(,1)$ = nilai tengah hasil MDS pada Kolom ke-1.

Hasil analisis *leverage* akan menunjukkan persentase (%) perubahan *root mean square* masing-masing atribut jika dihilangkan dalam ordinas. Atribut yang memiliki persentase tertinggi merupakan atribut yang paling sensitif/berpengaruh kuat terhadap keberlanjutan. *Leverage* dihitung berdasarkan *standard error* perbedaan antara skor dengan atribut dan skor yang diperoleh tanpa atribut.

Faktor pengungkit dapat dilihat dari hasil olahan Rapfish dengan nilai *root means square* (RMS) tertinggi (maksimum) sampai dengan nilai setengahnya dari tiap-tiap dimensi keberlanjutan (Kavanagh and Pitcher, 2004).

4.7.3 Metode Penyusunan Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

Pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang terdiri dari 5 (lima) dimensi keberlanjutan, masing-masing adalah sebagai berikut: (1) Dimensi Lingkungan, jumlah atribut 10 buah; (2) Dimensi Ekonomi, jumlah atribut 8 buah; (3) Dimensi Sosial & Budaya, jumlah atribut 10 buah; (4) Dimensi Aksesibilitas & Utilitas, jumlah atribut 10 buah; dan (5) Dimensi Kelembagaan jumlah atribut 8 buah. Atas dasar olahan Rap-

EcoBeach nantinya akan diperoleh atribut-atribut sensitif pada masing-masing dimensi.

Metode penyusunan strategi pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang dilakukan melalui metode deskriptif.

Penerapan metode ini dilandasi pada hasil-hasil olahan *Rap-EcoBeach*, khususnya pada hasil olahan *Analisis Leverage* berupa atribut-atribut sensitif pada masing-masing dimensi keberlanjutan. Atribut-atribut sensitif pada masing-masing dimensi akan dilakukan analisis untuk kemudian disusun strategi berupa perbaikan-perbaikan terhadap atribut tersebut. Dengan strategi yang telah disusun diharapkan akan mampu meningkatkan status pengembangan ekowisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang berkelanjutan di Kabupaten Malang.



BAB V

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang

5.1.1 Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas wilayahnya dari 37 Kabupaten/Kotamadya yang ada di Jawa Timur. Berdasarkan data Kabupaten Malang dalam Angka 2016, Kabupaten Malang memiliki luas wilayah 2.977,05 km² atau sama dengan 297.705 ha dan jumlah penduduknya 2.544.318 (terbesar kedua setelah Kotamadya Surabaya). Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya.

Kabupaten Malang berada kurang lebih 89 km arah selatan Surabaya.

Secara geografis Kabupaten Malang terletak pada koordinat antara 112^o17',10,90" Bujur Timur dan 112^o57',00,00" Bujur Timur dan antara 7^o44',55,11" sampai 8^o26',35,45" Lintang Selatan, dengan di kelilingi gunung-gunung antara lain Gunung Anjasmara (2.277 m) dan Gunung Arjuna (3.399 m) di sebelah Utara, Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m) di sebelah Timur, Gunung Kelud (1.731 m) di sebelah Barat dan Pegunungan Kapur (650 m) dan Gunung Kawi (2.625 m) di sebelah Selatan.

Secara administratif Kabupaten Malang terbagi atas 33 kecamatan, 378 desa dan 12 kelurahan. Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang bupati serta lazimnya keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam hal kependudukan, Kabupaten Malang

juga memiliki keberagaman seperti yang dimiliki oleh kota-kota besar lain di Indonesia. Mulai etnis (Tionghoa, Jawa, Arab), suku (Jawa, Madura, Sunda, Batak, dan lain-lain), agama, adat, budaya, tradisi, bahasa, gaya hidup, dan lain-lain. Jika ditinjau dari lokasinya, maka Kabupaten Malang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto.
- Sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang.

5.1.2 Keadaan Topografi dan Klimatologi

Kondisi topografi Kabupaten Malang terdiri dari: daerah dataran rendah yang terletak pada ketinggian 250-500 m di atas permukaan air laut, daerah dataran tinggi, daerah perbukitan kapur, daerah lereng Gunung Kawi-Arjuno (500-3300 m di atas permukaan air laut) dan daerah lereng Tengger-Semeru (500-3600 m di atas permukaan air laut).

Kabupaten Malang dan sekitarnya beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 23 – 32^o C. Keadaan iklim ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan Samudera Indonesia yang berada di sebelah selatan tepatnya di pesisir selatan Kabupaten Malang. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 74% - 80%. Kecepatan angin rata-rata 5m/dtk, tertinggi terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Desember, dengan kecepatan maksimum mencapai 22-23 m/dtk.

Iklim Kabupaten Malang relatif sejuk dan stabil sepanjang musim. Iklim yang relatif sejuk tersebut didukung pula oleh tingginya curah hujan yang mencapai 1833 mm/tahun. Iklim yang sejuk dan curah hujan yang cukup tinggi menjadikan Malang cukup berpotensi di sektor pertaniannya. Wilayahnya yang berada pada ketinggian sebenarnya dipengaruhi oleh keberadaan gunung dan pegunungan yang memagari hampir seluruh luas areanya. Sebagai contohnya kita dapat menemukan G. Arjuno di Utara, rangkaian Gunung dan Pegunungan Bromo,

Tengger, Semeru yang merupakan atap tertinggi P. Jawa berada di Timur. Lantas Pegunungan Kapur Kendeng di Selatan, dan terakhir G. Kawi berada di Barat Malang.

Posisi geografis Kabupaten Malang yang berada pada lereng pegunungan, maka dipengaruhi juga oleh angin muson tenggara (dari arah benua Australia) dan angin muson barat laut (dari arah benua Asia), sehingga angin yang sepanjang tahun bertiup dapat dikategorikan kedalam dua jenis angin, yaitu:

- Angin Timur: bertiup sekitar bulan April – Agustus. Keberadaan angin ini sangat menguntungkan transportasi laut dan kegiatan penangkapan ikan karena keadaan air laut relatif tenang.
- Angin Barat: bertiup sekitar bulan September – Maret. Keberadaan angin ini sangat mengganggu aktivitas transportasi laut dan penangkapan ikan, karena ombak dan gelombang laut cukup besar, serta curah hujan yang terjadi relatif tinggi.

5.1.3 Keadaan Geologi dan Hidrologi

Kabupaten Malang dan sekitarnya yang biasa disebut Malang Raya merupakan suatu kawasan yang berada, dikelilingi dan memiliki beberapa pegunungan. Struktur tanah yang bervariasi menjadikan Malang cocok untuk bercocok tanam. Kondisi lahan di Kabupaten Malang bagian utara relatif subur, sementara di sebelah Selatan relatif kurang subur. Masyarakat Kabupaten Malang umumnya bertani, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan dan sebagian lainnya telah berkembang sebagai masyarakat industri. Kabupaten Malang dan sekitarnya yang biasa disebut Malang Raya merupakan suatu kawasan yang berada, dikelilingi dan memiliki beberapa pegunungan. Struktur tanah yang bervariasi menjadikan Malang cocok untuk bercocok tanam. Tanah alluvial yang dihasilkan dari muntahan lahar gunung-gunung api banyak terdapat di daerah

kawasan pegunungan. Jenis alluvial yang banyak terdapat di Kabupaten Malang adalah alluvial kelabu kehitaman dengan luas 47.328,16 Ha. Regosol dan Andosol coklat pun banyak ditemukan di Kabupaten Malang dengan luas masing-masing 7.886 Ha dan 57.016,75 Ha. Luas wilayah asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat adalah 38.382,01Ha. Luas wilayah Kambisol 26.750,551 Ha. Luas wilayah mediteran dan Litosol masing-masing 50.027,408 Ha dan 96.436.433 Ha. Tanah tandus pun banyak dijumpai di pesisir-pesisir pantai selatan Malang. Hasilnya pun beraneka ragam mulai tanaman perkebunan seperti apel, kopi, kemudian tanaman palawija seperti jagung, ketela, dan terakhir spesialis tanah gersang seperti jati dan beberapa jenis pepohonan lainnya.

Adapun sungai-sungai yang mengalir mempunyai pengaruh besar bagi perekonomian agraris adalah:

- Kali Brantas: bermata air di Dk. Sumber Brantas Desa Tulungrejo (Batu), membelah Kabupaten Malang menjadi dua dan wilayah ini berakhir di Bendungan Karangates.
- Kali Konto: mengalir melintasi wilayah Kecamatan Pujon dan Ngantang dan berakhir di Bendungan Selorejo (Ngantang)
- Kali Lesti: mengalir di bagian timur wilayah Kecamatan Turen, Dampit dan sekitarnya di samping puluhan anak sungai yang mempunyai arti penting.
- Kali Amprong: mengalir di bagian timur wilayah Kecamatan Poncokusumo dan Tumpang.

5.2 Profil Objek Wisata

Letak geografis Kabupaten Malang cukup menguntungkan karena memiliki banyak destinasi wisata pantai, seperti di wilayah selatan langsung berbatasan dengan Samudera Hindia serta destinasi wana wisata. Tetapi sampai hari ini, potensi keindahan alam itu belum maksimal menjadi tujuan wisata.

Beberapa potensi pariwisata di Kabupaten Malang yang terletak di kawasan pantai dan gunung sebagian besar berada di wilayah perhutani. Sampai saat ini ada 78 objek wisata yang dikembangkan KPH Malang dan belasan lainnya menunggu peresmian.

Pantai dan wana wisata yang berada di Kabupaten Malang yang berada di wilayah Perhutani dan potensial menjadi daerah tujuan wisata cukup banyak, yakni sekitar 39 pantai dan 35 wana wisata. Dari 74 objek wisata itu, beberapa diantaranya merupakan favorit para wisatawan lokal maupun mancanegara, seperti Bale Kambang, Batu Bengkung, Sendang Biru, pantai Gua Cina, Coban Talun, Coban Pelangi, Coban Rondo, Pantai Pasir Panjang, Kondang Merak, Modangan, Lenggoksono, Bajul Mati, Sipelot, dan Jonggiring Saloko. Kawasan wisata itu selalu dipadati pengunjung tidak hanya pada saat hari libur, namun juga hari-hari biasa.

5.2.1 Pantai Ngliyep

Pantai Ngliyep adalah sebuah pantai di pesisir selatan yang terletak di tepi Samudera Hindia pada koordinat $8^{\circ}23'2''S$ $112^{\circ}25'23''E$ tepatnya di Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur sekitar 62 km arah selatan dari Kota Malang. Dari Kota Malang, Ngliyep sangat mudah dijangkau karena sejak tahun 1980 akses menuju pantai telah diaspal.

Luas areal wisata Pantai Ngliyep kurang lebih 10 Ha yang terdiri dari hutan lindung, areal wisata, penginapan, dan lahan parkir. Fasilitas yang ada di Pantai Ngliyep antara lain pesanggrahan 4 buah, penginapan 6 buah, dan cottage 2 buah. Pada era 1980-an, Pantai Ngliyep merupakan daerah tujuan wisata favorit di Jawa Timur. Bahkan sebelum pantai Balekambang dan Pantai Sendangbiru dikenal para wisatawan, pantai ini jauh lebih dulu dikenal. Konon pantai ini ditemukan pertama kali oleh Mbah Atun, perantauan asal Jogjakarta, pada 1919 dan mulai dibuka secara resmi pada 1951. Sayangnya, sekarang Ngliyep kurang

dikelola dengan baik karena masih terjadi persengketaan lahan antara pemerintah daerah dengan Perum Perhutani.

Ngliyep memiliki panorama yang sangat indah, memiliki hamparan pasir putih yang lembut dan area bermain yang luas dengan ditumbuhi pepohonan yang rindang. Bahkan alunan gelombangnya pun cukup menarik untuk dinikmati.

Karena itulah namanya Ngliyep yang memiliki arti setiap orang yang melihat pantai ini akan merasa mengantuk dan tertidur (bahasa Jawa: liyep-liyep). Ngliyep dikelilingi oleh tebing-tebing yang curam dan hamparan hutan tropis di sekitarnya.

Terdapat sebuah pulau kecil bernama Gunung Kombang yang terdapat sebuah petilasan yang bisa dikunjungi.

Tak jauh dari Ngliyep, di sebelah kiri terdapat sebuah teluk dengan pemandangan yang tak kalah indah yakni Teluk Putri. Untuk menuju ke sana, pengunjung cukup berjalan ke sisi kiri kemudian naik ke bukit yang tak terlalu tinggi. Disebut dengan Teluk Putri, karena di teluk ini dilapisi pasir putih sangat bersih dan halus lembut sehalus kulit para putri. Ketebalan pasir kurang lebih 40 cm. Memang hamparan pasir tidak luas yakni tak lebih dari 100 meter saja, namun nyaman untuk tempat menyepi. Hanya saja pengunjung di sini harus hati-hati karena terkadang gelombang bisa cukup besar. Oleh karena itu pengunjung tidak diperbolehkan mendekati sampai di bibir pantai. Pengunjung hanya boleh berada di pasir putih.

Setiap tanggal 14 bulan Maulud (Rabiulawal), pantai Ngliyep akan lebih ramai dari hari biasa karena selalu diadakan acara labuhan. Kegiatan labuhan ini sudah ada secara turun-temurun sejak masa Mbah Atun, orang yang dipercaya jadi penemu Ngliyep. Labuhan adalah kegiatan masyarakat adat Jawa berupa selamatan dengan menyembelih kambing atau sapi yang disedekahkan kepada masyarakat sekitar pantai. Namun, sebagian makanan juga dilarung atau ditebarkan ke tengah laut. Upacara ini dilakukan oleh masyarakat Kedungsalam

dengan membawa sesaji beraneka ragam dan diiringi kesenian Jaranan serta para pengawal yang mengenakan pakaian adat. Sesaji itu diarak menuju Gunung Kombang yang berjarak kurang lebih 300 m melalui sebuah jembatan dari pesanggrahan Ngliyep.

5.2.2 Pantai Balekambang

Pantai Balekambang adalah sebuah pantai di pesisir selatan yang terletak di tepi Samudera Indonesia secara administratif masuk wilayah Dusun Sumber Jambe, Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan koordniat $8^{\circ} 24' 12.55''$ S dan $112^{\circ} 32' 0.52''$ E. dan merupakan salah satu wisata andalan Kabupaten Malang sejak 1985 hingga kini. Daya tarik Balekambang utamanya tentu panorama alam, gelombang ombak yang memanjang hampir dua kilometer, serta hamparan pasir nan luas. Area pasir putih terlihat bersih dari sampah maupun kotoran sehingga cukup nyaman bagi pengunjung untuk bermain dan berolahraga.

Pantai ini mulai berkembang dan disinggahi masyarakat luas tahun 1978, setelah adanya pembukaan akses jalan yang dilakukan Kades Srigonco Tukiran. Nama Balekambang kian dikenal setelah secara resmi dibuka sebagai salah satu tempat wisata oleh Bupati Malang, Eddy Slamet pada 1983. Saat itu jalan pun sudah dimakadam. Pantai ini pula diresmikan sebagai tempat perkemahan pramuka Kabupaten Malang. Kini, akses menuju Balekambang sudah mudah dan nyaman, pengunjung hanya kesulitan ketika berada di kawasan Jurang Mayit karena tanjakan yang menikung tajam. Tetapi, jalannya sudah beraspal mulus karena aksesnya yang bagus, hanya butuh waktu tak lebih dari 30 menit dari kota Kecamatan Bantur ke Balekambang.

Pantai Balekambang terus berbenah, sejumlah fasilitas tambahan disediakan pengelola, salah satunya flying fox. Permainan ini dilanching sejak Agustus 2012, namun flying fox ini hanya buka setiap Sabtu-Minggu. Selain flying

fox, permainan untuk anak-anak juga menjadi daya tarik. Beragam varian mainan seperti ayunan, patung hewan lengkap tersedia. Bahkan tak lama lagi akan disediakan persewaan ATV.

Pantai Balekambang selain sebagai wisata alam, juga bisa disebut sebagai tempat wisata religi. Karena pada hari-hari tertentu, ribuan pengunjung datang ke pantai ini untuk melakukan ritual. Bagi umat Islam, mereka menjalani ritual dengan berziarah ke makam Syaikh Abdul Jalil, orang pertama yang membat Pantai Balekambang. Setiap tanggal 1 Sya'ban, para peziarah meluber ke makam yang berada terpencil di tepi Kali Berek, jaraknya sekitar 1 km sebelum masuk Pantai Balekambang dari arah Bantur. Asal usul Syaikh Abdul Jalil dikabarkan berasal dari Jogjakarta. Dia adalah seorang keluarga ningrat yang memiliki ilmu agama cukup tinggi, karena itu pengaruhnya di masyarakat begitu kuat. Apalagi Syaikh Abdul Jalil termasuk yang tidak mau kompromi kepada penjajah Belanda, karenanya Belanda menjadikannya sebagai orang yang harus disingkirkan.

Selain umat Islam, umat Hindu pun menjadikan pantai ini sebagai tempat ibadah utama setiap setahun sekali. Tepatnya pada hari raya Nyepi, lokasinya di Pura Amarta Jati yang berada di Pulau Ismoyo. Pulau ini menjorok masuk dari bibir pantai sekitar 70 meter yang dihubungkan dengan jembatan. Keberadaan pura ini bagai magnet tersendiri bagi Pantai Balekambang. Tradisi Nyepi dengan menggelar ritual keagamaan Hindu selalu dinantikan wisatawan dari berbagai daerah, termasuk wisatawan asing.

Di sekitar Pantai Balekambang juga sudah tersedia penginapan untuk para pengunjung. Pertama yaitu di penginapan Bamboo terdapat 8 kamar yang dibandrol Rp 150 ribu perharinya. Sedangkan yang terbaru adalah Hotel Wibisana sebanyak 10 kamar, yang kualitasnya lebih baik dibanding penginapan Bamboo. Kamar baru ini kelasnya dibandrol dengan tarif Rp 250 ribu per hari. Untuk kategori

Large bisa menampung hingga enam orang dengan didukung fasilitas kamar mandi dan listrik. Dua jenis tipe penginapan ini memiliki fasilitas yang memadai dan seluruhnya menyuguhkan view langsung pantai dan laut lepas.

5.2.3 Pantai Ungapan

Pantai Ungapan adalah sebuah pantai di pesisir selatan atau berada di Samudra Hindia, dimana secara administratif masuk Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. koordinat 8°26'12"S 112°38'27"E, Letak pantai ini berdekatan dengan Pantai Bajulmati. Pantai ini berjarak sekitar 64 km dari Kota Malang dan dibutuhkan sekitar 3 jam perjalanan untuk mencapainya.

Pantai Ungapan memang terletak bersebelahan di antara Pantai Goa China dan Pantai Bajulmati. Pantai Ungapan sebenarnya masih satu garis dengan Pantai Bajulmati. Namun karena Pantai Bajulmati sangat panjang sehingga akhirnya dibagi menjadi beberapa pantai yaitu Pantai Ungapan dan Pantai Jelangkung. Saat ini Pantai Ungapan dikelola oleh Perum Perhutani. Nama Ungapan berasal dari Bahasa Jawa yang berarti muara sungai atau pertemuan antara sungai dan laut. Di pantai ini memang terdapat sebuah muara yang biasanya dipergunakan untuk berenang oleh para wisatawan yang datang.

Harga tiket untuk memasuki kawasan Pantai Ungapan sebesar Rp 5.000 per orang di sebuah loket yang telah disediakan pihak Perhutani. Keindahan Pantai Ungapan tak kalah menariknya dengan Pantai Bajulmati. Di sepanjang tepi pantai terdapat banyak gubuk. Gubuk-gubuk itu terbuat dari kayu dan bambu dengan atap dedaunan menambah kesan tradisional. Gubuk tersebut berjajar dari timur ke barat pantai seolah tak ada habisnya. Di sekitar gubuk ditumbuhi rumput hijau dengan pohon dan beberapa pohon kelapa di pinggir laut, sejujnya udara, sambil menikmati makanan dan minuman di gubuk tepi pantai dengan pemandangan pantai. Yang harus diperhatikan adalah agar pengunjung menjaga

kelestarian alam di area Pantai Ungapan ini. Jangan membuang sampah sembarangan dan patuhi peraturan yang telah ditetapkan pihak Perhutani.

Pemandangan di Pantai Ungapan ini tidak jauh berbeda dengan Pantai Bajulmati. Kita dapat menyaksikan deretan batu besar berbentuk mirip seekor buaya tepat di sisi kanan pantai. Di Pantai Ungapan ini memiliki air laut berwarna biru dengan batu-batu besar di bibir pantainya. Di pantai ini pula akan disugahi panorama laut lepas yang mengagumkan. Gradasi air laut yang biru adalah salah satu yang menarik. Pulau karang yang menjulang dan angin yang semilir memanjakan para wisata yang datang. Pada sore hari akan terlihat sensasi terbenamnya matahari. Pantai Ungapan tetap merupakan pantai yang indah.

Pasir pantainya yang tidak terlalu putih sangat halus dan tidak dipenuhi karang seperti pantai-pantai lainnya. Jika pada siang hari pasir pantai ini akan terasa panas di kaki, jadi sebaiknya ke sini pada sore hari atau pagi hari. Tetapi para pengunjung dilarang untuk mandi ke tengah, karena ombak pantainya yang cukup besar. Struktur pantai yang melandai lalu langsung curam membuatnya sangat berbahaya untuk berenang di sini. Tetapi para pengunjung bisa mandi dan berenang di sebuah muara yang cukup luas.

Rumah-rumah penduduk di Pantai Ungapan lebih sedikit daripada di Pantai Bajulmati. Begitu pun hanya ada sedikit penjual makanan dan minuman di sini. Di sekitar Pantai Ungapan kita bisa menemukan berbagai sajian kuliner, tetapi mungkin jumlahnya tidak banyak. Makanan yang disediakan di antaranya nasi campur, bakso, dan juga tidak ketinggalan kelapa muda. Kita bisa bersantai di tempat ini sambil menikmati pemandangan pantai. Pantai Ungapan juga cocok bagi yang hobby camping, tetapi sayangnya di pantai ini tidak terdapat penginapan seperti halnya di Sendangbiru.

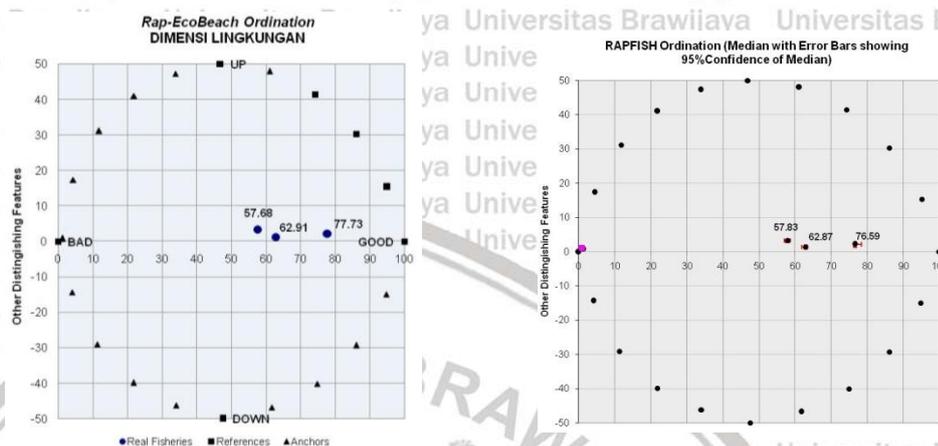
BAB VI**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****6.1 Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang**

Pengukuran terhadap indeks dan status pengembangan ekowisata berkelanjutan pada ketiga lokasi, yakni pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan dimensi-dimensi keberlanjutan berikut atribut-atributnya untuk kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode *Multidimensional Scaling* (MDS) pendekatan *Rap-EcoBeach* (Modifikasi RAPPFISH). Dimensi dan atribut keberlanjutan itu sendiri adalah sebagai berikut: (1) Dimensi Lingkungan, jumlah atribut 10 buah; (2) Dimensi Ekonomi, jumlah atribut 8 buah; (3) Dimensi Sosial dan Budaya, jumlah atribut 10 buah; (4) Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas, jumlah atribut 10 buah; dan (5) Dimensi Kelembagaan jumlah atribut 8 buah.

6.1.1 Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Lingkungan

Dimensi lingkungan merujuk pada pemahaman bahwa keberlanjutan sumberdaya kawasan pantai selatan yang dalam hal ini adalah pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang dengan potensi wisata rekreasi pantai atau perluasan sumberdaya alam berikut lingkungan fisik diarahkan untuk menjamin kehidupan jangka panjang dan keberlanjutan sumberdaya lingkungan pantai itu sendiri. Atribut-atribut dimensi ini adalah sebagai berikut: (1) Kedalaman perairan; (2) Tipe pantai; (3) Lebar pantai; (4) Material dasar perairan; (5) Kecepatan arus; (6) Kemiringan pantai; (7) Kecerahan perairan; (8) Penutupan lahan pantai (vegetasi); (9) Biota berbahaya; dan (10) Ketersediaan air tawar.

Hasil pengukuran indeks dan status keberlanjutan dimensi lingkungan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* dapat digambarkan dalam bentuk ordinasinya sebagaimana Gambar 6.1.



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.1. Ordinasinya MDS dan Monte Carlo Dimensi Lingkungan

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* Dimensi Lingkungan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang untuk masing-masing kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada

Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Indeks dan Status Keberlanjutan Dimensi Lingkungan

Kawasan Wisata Pantai	Dimensi Lingkungan	
	Indeks	Status
Pantai Nglipyep	62,91	Cukup Berkelanjutan
Pantai Balaikambang	77,73	Berkelanjutan
Pantai Ungapan	57,68	Cukup Berkelanjutan
<i>Stress (S) = 15,3% (goodness of fit)</i>		
<i>Squared Correlation (R²) = 94,7% (mendekati 1)</i>		
<i>Number of iterations = 3</i>		

Sumber : Data diolah, 2019.

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* menunjukkan bahwa Pantai Nglileyep memiliki status cukup berkelanjutan (62,91), Pantai Balaikambang dengan status berkelanjutan (77,73), dan Pantai Ungapan memiliki status cukup berkelanjutan (57,68). Parameter statistik yang ditunjukkan oleh nilai *stress* (S) sebesar 15,3% menyatakan *goodness of fit* ($S < 25\%$) dan koefisien determinasi ($R^2 = 94,7\%$) memberikan penegasan kondisi yang baik (mendekati nilai 1). Hal ini memberikan pemahaman bahwa semua atribut cukup akurat dan memberikan hasil analisis yang semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengkaji status Dimensi Lingkungan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Perbedaan nilai indeks keberlanjutan antara analisis MDS dan *Monte Carlo* dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2. Perbandingan Indeks Keberlanjutan MDS dan *Monte Carlo* (MC) Dimensi Lingkungan

Kawasan Pantai Selatan	Indeks Keberlanjutan			Keputusan
	MDS	MC	Selisih	
Pantai Nglileyep	62,91	62,87	0,03%	Memadai
Pantai Balaikambang	77,73	76,59	1,14%	Memadai
Pantai Ungapan	57,68	57,83	0,15%	Memadai

Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel 6.2 menunjukkan bahwa hasil analisis *Monte Carlo* pada taraf kepercayaan 95% tidak mengalami perbedaan besar jika dibandingkan dengan hasil MDS. Nilai selisih antara indeks keberlanjutan hasil analisis MDS dan analisis *Monte Carlo* kurang dari 5% pada seluruh lokasi kawasan pantai selatan. Dengan demikian analisis *Rap-EcoBeach* memadai sebagai penduga status dimensi lingkungan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Hasil-hasil parameter statistik dan simulasi Monte Carlo tersebut memberikan pemahaman bahwa analisis *Rap-EcoBeach* secara kuantitatif dan cepat (*rapid appraisal*) cukup baik dipergunakan sebagai alat evaluasi dalam menentukan status dimensi lingkungan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Dilihat dari sudut pandang lingkungan, kegiatan ekowisata Kawasan pantai harus memenuhi syarat geomorfologi pantai, proses pantai yang terkait dengan gelombang laut, erosi pantai, sebaran padatan tersuspensi, sebaran sedimen dasar permukaan, air tanah dan luas dataran pantai (Susana *et al.* 2004).

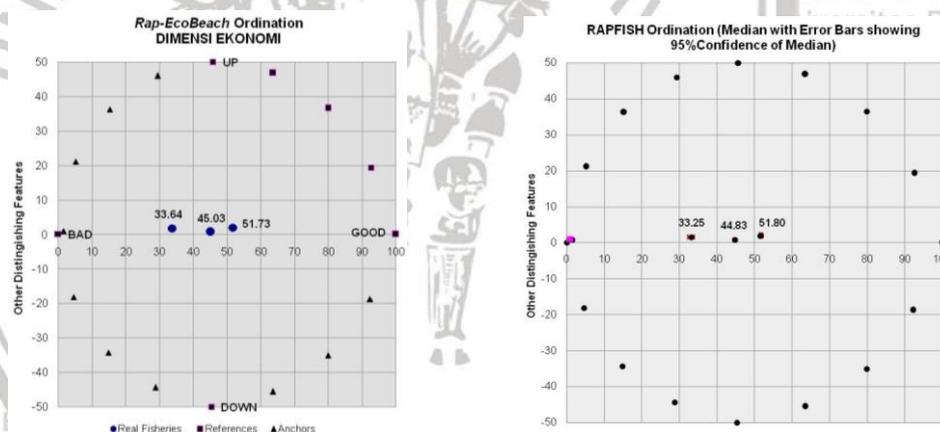
Kegiatan wisata yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada. Setiap kegiatan wisata mempunyai persyaratan sumber daya dan lingkungan masing-masing sesuai objek wisata yang akan dikembangkan. Persyaratan sumber daya dan lingkungan dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan wisata. Parameter yang menjadi prasyarat dalam kesesuaian ekowisata bahari berupa parameter fisik dan parameter biologi.

Parameter fisik pantai dan perairan menjadi prasyarat yang lebih dominan pada wisata pantai, sedangkan pada wisata bahari yang berbasis ekosistem parameter biologi juga dipertimbangkan. Parameter fisik yang dipertimbangkan dalam kesesuaian wisata, yaitu pasir pantai, substrat dasar, kecerahan air laut, kedalaman, kecepatan arus, lebar pantai, kemiringan pantai, pasang surut, ombak, dan air tawar. Parameter biologi yang dipertimbangkan dalam kesesuaian wisata, yaitu vegetasi pantai, karang, ikan karang, mangrove, lamun, dan biota laut lainnya (Yulius *et al.*, 2018).

6.1.2 Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi merujuk pada pengertian pengembangan kawasan pantai selatan memiliki keberlanjutan kegiatan ekonomi dengan nilai manfaat jangka panjang dengan layak serta mampu memberikan manfaat ekonomi kepada stakeholders secara adil dan merata. Atribut-atribut dimensi ini, yaitu: (1) Peningkatan pendapatan keluarga; (2) Kontribusi perekonomian daerah; (3) Peluang pekerjaan; (4) Diversifikasi usaha; (5) Pengembangan produk lokal; (6) Pengembangan jasa wisata lain; (7) Retribusi wisatawan; dan (8) Peningkatan daya beli wisatawan.

Hasil pengukuran indeks dan status keberlanjutan Dimensi Ekonomi sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* disampaikan sebagaimana Gambar 6.2.



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.2. Ordinasasi MDS dan Monte Carlo Dimensi Ekonomi

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* Dimensi Ekonomi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang untuk masing-masing kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Indeks dan Status Keberlanjutan Dimensi Ekonomi

Kawasan Wisata Pantai	Dimensi Ekonomi	
	Indeks	Status
Pantai Ngliyep	33,64	Kurang Berkelanjutan
Pantai Balaikambang	51,73	Cukup Berkelanjutan
Pantai Ungapan	45,03	Kurang Berkelanjutan
<i>Stress (S) = 17,7% (goodness of fit)</i>		
<i>Squared Correlation (R²) = 93,7% (mendekati 1)</i>		
<i>Number of iterations = 3</i>		

Sumber : Data diolah, 2019.

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* menunjukkan bahwa Pantai Ngliyep memiliki status kurang berkelanjutan (33,64), Pantai Balaikambang memiliki status cukup berkelanjutan (51,73), dan Pantai Ungapan memiliki status kurang berkelanjutan (45,03). Parameter statistik yang ditunjukkan oleh nilai *stress (S)* sebesar 17,7% menyatakan *goodness of fit* ($S < 25\%$) dan koefisien determinasi ($R^2 = 93,7\%$) memberikan penegasan kondisi yang baik (mendekati nilai 1). Hal ini memberikan pemahaman bahwa semua atribut cukup akurat dan memberikan hasil analisis yang semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengkaji status Dimensi Ekonomi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Perbedaan nilai indeks keberlanjutan antara analisis MDS dan *Monte Carlo* dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4. Perbandingan Indeks Keberlanjutan MDS dan *Monte Carlo* (MC) Dimensi Ekonomi

Kawasan Pantai Selatan	Indeks Keberlanjutan			Keputusan
	MDS	MC	Selisih	
Pantai Ngliyep	33,64	33,25	0,39%	Memadai
Pantai Balaikambang	51,73	51,80	0,07%	Memadai
Pantai Ungapan	45,03	44,83	0,20%	Memadai

Sumber : Data diolah, 2019.

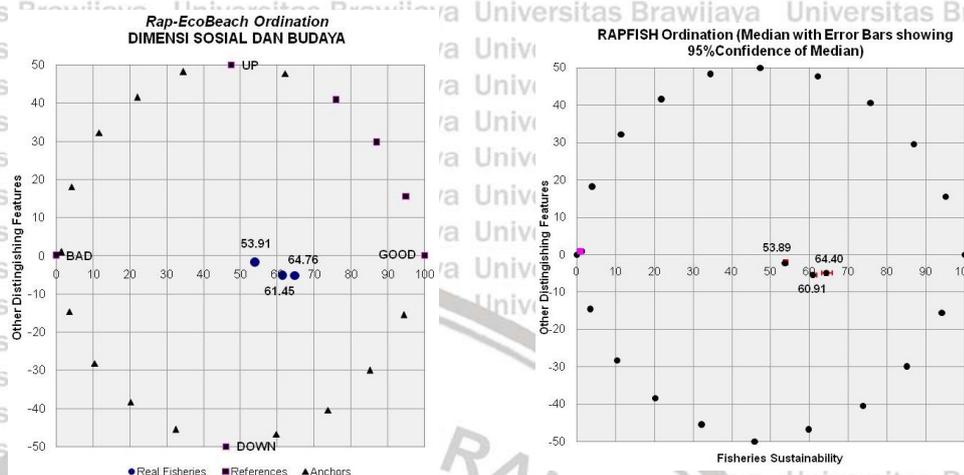
Tabel 6.4 menunjukkan bahwa hasil analisis *Monte Carlo* pada taraf kepercayaan 95% tidak mengalami perbedaan besar jika dibandingkan dengan hasil MDS. Nilai selisih antara indeks keberlanjutan hasil analisis MDS dan analisis *Monte Carlo* kurang dari 5% pada seluruh lokasi kawasan pantai selatan. Dengan demikian analisis *Rap-EcoBeach* memadai sebagai penduga status dimensi ekonomi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Hasil-hasil parameter statistik dan simulasi *Monte Carlo* tersebut memberikan pemahaman bahwa analisis *Rap-EcoBeach* secara kuantitatif dan cepat (*rapid appraisal*) cukup baik dipergunakan sebagai alat evaluasi dalam menentukan status dimensi ekonomi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

6.1.3 Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Sosial dan Budaya

Dimensi sosial-budaya merujuk pada pemahaman bahwa pengembangan kawasan pantai selatan akan tetap menjaga dan menghormati keaslian nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat lokal, melestarikan nilai-nilai warisan budaya dan adat yang ada, dan berkontribusi dalam meningkatkan rasa toleransi serta pemahaman antar-budaya. Atribut-atribut dimensi ini, yaitu: (1) Tingkat pendidikan masyarakat; (2) Tingkat pengangguran; (3) Kelestarian budaya; (4) Muatan edukasi; (5) Partisipasi masyarakat; (6) Penerapan sains dan teknologi; (7) Pendidikan dan pelatihan pariwisata; (8) Kebersihan lingkungan; (9) Konflik sosial; dan (10) Tingkat keamanan.

Hasil pengukuran indeks dan status keberlanjutan Dimensi Sosial dan Budaya sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* disampaikan sebagaimana Gambar 6.3.



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.3. Ordinası MDS dan Monte Carlo Dimensi Sosial dan Budaya

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* Dimensi Sosial dan Budaya dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang untuk masing-masing kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5. Indeks dan Status Keberlanjutan Dimensi Sosial dan Budaya

Kawasan Wisata Pantai	Dimensi Sosial dan Budaya	
	Indeks	Status
Pantai Ngliyep	53,91	Cukup Berkelanjutan
Pantai Balaikambang	64,76	Cukup Berkelanjutan
Pantai Ungapan	61,45	Cukup Berkelanjutan
<i>Stress (S) = 15,2%</i>		
<i>Squared Correlation (R²) = 94,8%</i>		
<i>Number of iterations = 3</i>		

Sumber : Data diolah, 2019.

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* menunjukkan bahwa Pantai Nglipen memiliki status cukup berkelanjutan (53,91), Pantai Balaikambang memiliki status cukup berkelanjutan (64,76), dan Pantai Ungapan memiliki status cukup berkelanjutan (61,45).

Parameter statistik yang ditunjukkan oleh nilai *stress* (S) sebesar 15,2% menyatakan *goodness of fit* ($S < 25\%$) dan koefisien determinasi (R^2) = 94,8% memberikan penegasan kondisi yang baik (mendekati nilai 1). Hal ini memberikan pemahaman bahwa semua atribut cukup akurat dan memberikan hasil analisis yang semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengkaji status Dimensi Sosial dan Budaya dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Perbedaan nilai indeks keberlanjutan antara analisis MDS dan *Monte Carlo* dapat dilihat pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6. Perbandingan Indeks Keberlanjutan MDS dan *Monte Carlo* (MC) Dimensi Sosial dan Budaya

Kawasan Pantai Selatan	Indeks Keberlanjutan			Keputusan
	MDS	MC	Selisih	
Pantai Nglipen	53,91	53,89	0,03%	Memadai
Pantai Balaikambang	64,76	64,40	0,37%	Memadai
Pantai Ungapan	61,45	60,91	0,54%	Memadai

Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel 6.6 menunjukkan bahwa hasil analisis *Monte Carlo* pada taraf kepercayaan 95% tidak mengalami perbedaan besar jika dibandingkan dengan hasil MDS. Nilai selisih antara indeks keberlanjutan hasil analisis MDS dan analisis *Monte Carlo* kurang dari 5% pada seluruh lokasi kawasan pantai selatan. Dengan demikian analisis *Rap-EcoBeach* memadai sebagai penduga status dimensi Sosial

dan Budaya dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Hasil-hasil parameter statistik dan simulasi Monte Carlo tersebut memberikan pemahaman bahwa analisis *Rap-EcoBeach* secara kuantitatif dan cepat (*rapid appraisal*) cukup baik dipergunakan sebagai alat evaluasi dalam menentukan status dimensi Sosial dan Budaya dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

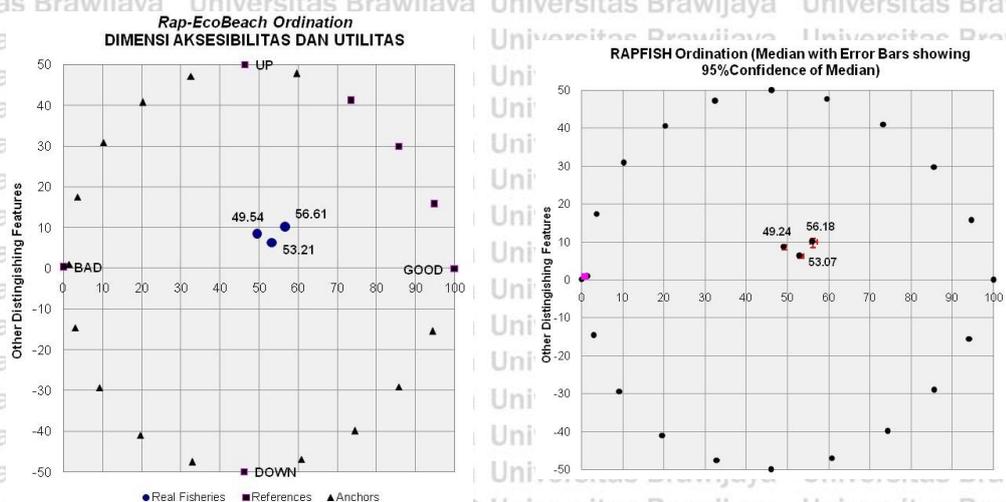
6.1.4 Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi

Aksesibilitas dan Utilitas

Dimensi aksesibilitas dan utilitas memberikan pemahaman bahwa pengembangan kawasan pantai selatan memiliki dukungan berupa kemudahan akses, baik akses informasi, infrastruktur, fasilitas sarana dan prasarana lainnya sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para wisatawan. Utilitas merujuk pada pengertian bahwa pengembangan kawasan pantai selatan bisa memberi manfaat langsung kepada pengguna jasa wisata rekreasi pantai, seperti penerangan, air bersih, pengelolaan sampah, dan sebagainya. Atribut-atribut dimensi ini, yaitu: (1) Sarana dan prasarana wisata; (2) Akses transportasi; (3) Akses informasi; (4) Akses komunikasi; (5) Akomodasi; (6) Air bersih; (7) Listrik; (8) Fasilitas kesehatan; (9) Promosi wisata; dan (10) Pemasaran wisata.

Hasil pengukuran indeks dan status keberlanjutan Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* disampaikan sebagaimana

Gambar 6.4.



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.4. Ordinasasi MDS dan Monte Carlo Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang untuk masing-masing kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7. Indeks dan Status Keberlanjutan Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas

Kawasan Wisata Pantai	Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas	
	Indeks	Status
Pantai Ngliyep	49,54	Kurang Berkelanjutan
Pantai Balaikambang	53,21	Cukup Berkelanjutan
Pantai Ungapan	56,61	Cukup Berkelanjutan
<i>Stress = 15,4% (goodness of fit)</i>		
<i>Squared Correlation (R²) = 94,6% (mendekati 1)</i>		
<i>Number of iterations = 2</i>		

Sumber : Data diolah, 2019.

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* menunjukkan bahwa Pantai Ngliyep memiliki status kurang berkelanjutan (49,54), Pantai Balaikambang memiliki status cukup

berkelanjutan (53,21), dan Pantai Ungapan memiliki status cukup berkelanjutan (56,61). Parameter statistik yang ditunjukkan oleh nilai *stress* (*S*) sebesar 15,4% menyatakan *goodness of fit* ($S < 25\%$) dan koefisien determinasi ($R^2 = 94,6\%$) memberikan penegasan kondisi yang baik (mendekati nilai 1). Hal ini memberikan pemahaman bahwa semua atribut cukup akurat dan memberikan hasil analisis yang semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengkaji status Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Perbedaan nilai indeks keberlanjutan antara analisis MDS dan *Monte Carlo* dapat dilihat pada Tabel 6.8.

Tabel 6.8. Perbandingan Indeks Keberlanjutan MDS dan *Monte Carlo* (MC) Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas

Kawasan Pantai Selatan	Indeks Keberlanjutan			Keputusan
	MDS	MC	Selisih	
Pantai Ngliyep	49,54	49,24	0,30%	Memadai
Pantai Balaikambang	53,21	53,07	0,14%	Memadai
Pantai Ungapan	56,61	56,18	0,43%	Memadai

Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel 6.8 menunjukkan bahwa hasil analisis *Monte Carlo* pada taraf kepercayaan 95% tidak mengalami perbedaan besar jika dibandingkan dengan hasil MDS. Nilai selisih antara indeks keberlanjutan hasil analisis MDS dan analisis *Monte Carlo* kurang dari 5% pada seluruh lokasi kawasan pantai selatan. Dengan demikian analisis *Rap-EcoBeach* memadai sebagai penduga status dimensi Aksesibilitas dan Utilitas dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

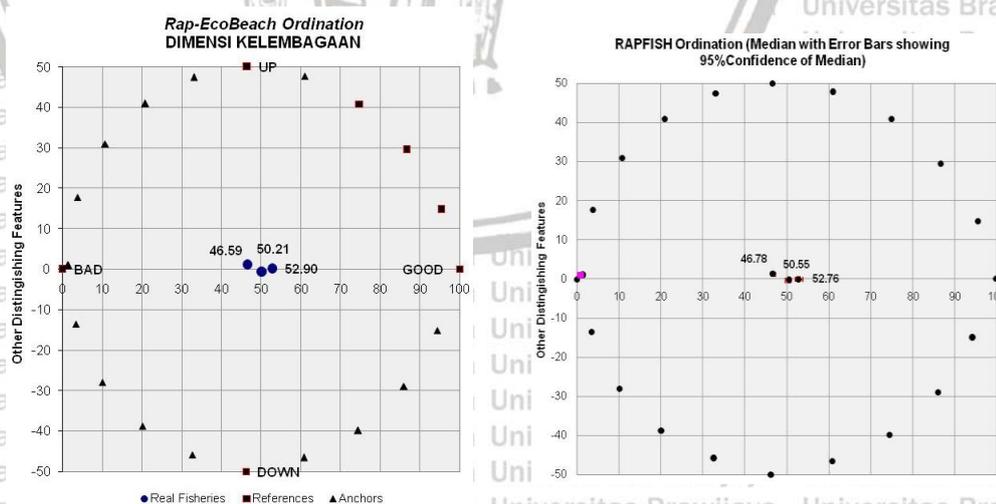
Hasil-hasil parameter statistik dan simulasi *Monte Carlo* tersebut memberikan pemahaman bahwa analisis *Rap-EcoBeach* secara kuantitatif dan

cepat (*rapid appraisal*) cukup baik dipergunakan sebagai alat evaluasi dalam menentukan status dimensi Aksesibilitas dan Utilitas dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

6.1.5 Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Kelembagaan

Dimensi kelembagaan merujuk pada pemahaman bahwa pengembangan kawasan pantai selatan didukung regulasi atau payung hukum serta peran serta institusi/lembaga termasuk sumberdaya manusianya. Dukungan juga terkait manajemen pengelolaan kepariwisataan di suatu destinasi, baik dari unsur pemerintah, swasta ataupun masyarakat (Sunaryo, 2013). Adapun atribut-atribut dimensi ini adalah sebagai berikut: (1) Regulasi pemerintah pusat; (2) Regulasi pemerintah daerah (PERDA); (3) Norma/hukum adat; (4) Peran institusi pemerintah; (5) Peran pihak swasta; (6) Peran LITBANG; (7) Peran LSM/Akademisi; dan (8) Peran lembaga masyarakat lokal.

Hasil pengukuran indeks dan status keberlanjutan Dimensi Kelembagaan sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* disampaikan sebagaimana Gambar 6.5.



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.5. Ordinası MDS dan Monte Carlo Dimensi Kelembagaan

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* Dimensi Kelembagaan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang untuk masing-masing kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 6.9.

Tabel 6.9. Indeks dan Status Keberlanjutan Dimensi Kelembagaan

Kawasan Wisata Pantai	Dimensi Kelembagaan	
	Indeks	Status
Pantai Nglileyep	46,59	Kurang Berkelanjutan
Pantai Balaikambang	52,90	Cukup Berkelanjutan
Pantai Ungapan	50,21	Cukup Berkelanjutan
<i>Stress (S) = 17,3% (goodness of fit)</i>		
<i>Squared Correlation (R²) = 93,8% (mendekati 1)</i>		
<i>Number of iterations = 3</i>		

Sumber : Data diolah, 2019.

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* menunjukkan bahwa Pantai Nglileyep memiliki status kurang berkelanjutan (46,59), Pantai Balaikambang memiliki status cukup berkelanjutan (52,90), dan Pantai Ungapan memiliki status cukup berkelanjutan (50,21). Parameter statistik yang ditunjukkan oleh nilai *stress (S)* sebesar 17,3% menyatakan *goodness of fit* ($S < 25\%$) dan koefisien determinasi ($R^2 = 93,8\%$) memberikan penegasan kondisi yang baik (mendekati nilai 1). Hal ini memberikan pemahaman bahwa semua atribut cukup akurat dan memberikan hasil analisis yang semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengkaji status Dimensi Kelembagaan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Perbedaan nilai indeks keberlanjutan antara analisis MDS dan *Monte Carlo* dapat dilihat pada Tabel 6.10.

Tabel 6.10. Perbandingan Indeks Keberlanjutan MDS dan Monte Carlo (MC) Dimensi Kelembagaan

Kawasan Pantai Selatan	Indeks Keberlanjutan			Keputusan
	MDS	MC	Selisih	
Pantai Ngliyep	46,59	46,78	0,19%	Memadai
Pantai Balaikambang	52,90	52,76	0,13%	Memadai
Pantai Ungapan	50,21	50,55	0,33%	Memadai

Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel 6.10 menunjukkan bahwa hasil analisis *Monte Carlo* pada taraf kepercayaan 95% tidak mengalami perbedaan besar jika dibandingkan dengan hasil MDS. Nilai selisih antara indeks keberlanjutan hasil analisis MDS dan analisis *Monte Carlo* kurang dari 5% pada seluruh lokasi kawasan pantai selatan. Dengan demikian analisis *Rap-EcoBeach* memadai sebagai penduga status dimensi Kelembagaan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Hasil-hasil parameter statistik dan simulasi *Monte Carlo* tersebut memberikan pemahaman bahwa analisis *Rap-EcoBeach* secara kuantitatif dan cepat (*rapid appraisal*) cukup baik dipergunakan sebagai alat evaluasi dalam menentukan status dimensi Kelembagaan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

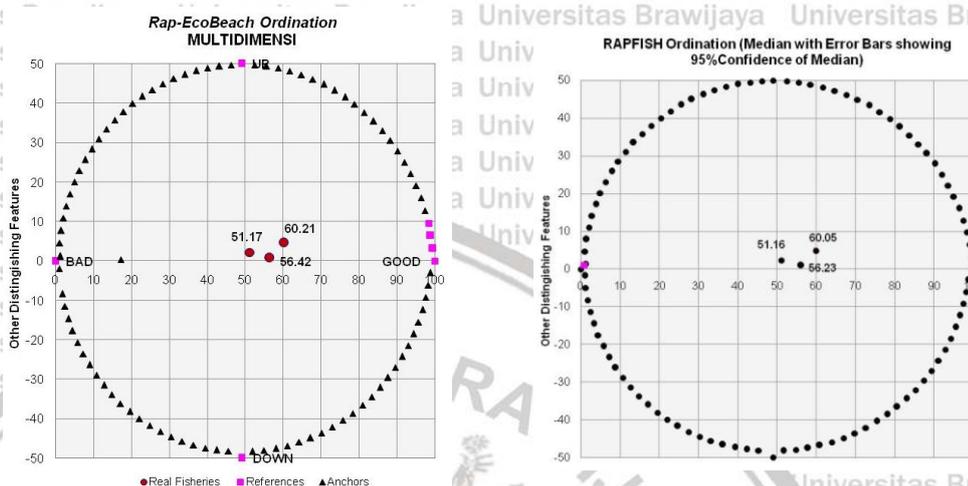
6.1.6 Indeks dan Status Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Multidimensi

Pengukuran status keberlanjutan multidimensi merupakan pengukuran yang dilakukan terhadap keberlanjutan multidimensi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Multidimensi yang dimaksud adalah merupakan penggabungan dari seluruh

dimensi keberlanjutan, yakni Dimensi Lingkungan, Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial dan Budaya, Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas serta Dimensi Kelembagaan.

Hasil pengukuran indeks dan status keberlanjutan Multidimensi sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* disampaikan sebagaimana Gambar 6.11



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.6. Ordinas MDS dan Monte Carlo Multidimensi

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* Multidimensi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang untuk masing-masing kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada

Tabel 6.11.

Tabel 6.11. Indeks dan Status Keberlanjutan Multidimensi

Kawasan Wisata Pantai	Indeks	Status
Pantai Ngliyep	51,17	Cukup Berkelanjutan
Pantai Balaikambang	60,21	Cukup Berkelanjutan
Pantai Ungapan	56,42	Cukup Berkelanjutan
<i>Stress (S) = 13,6% (goodness of fit)</i>		
<i>Squared Correlation (R²) = 95,6% (mendekati 1)</i>		
<i>Number of iterations = 2</i>		

Sumber : Data diolah, 2019.

Hasil analisis *Rap-EcoBeach* menunjukkan bahwa Pantai Ngliyep memiliki status kurang berkelanjutan (51,17), Pantai Balaikambang memiliki status cukup berkelanjutan (60,21), dan Pantai Ungapan memiliki status cukup berkelanjutan (56,42). Parameter statistik yang ditunjukkan oleh nilai *stress* (S) sebesar 13,6% menyatakan *goodness of fit* ($S < 25\%$) dan koefisien determinasi ($R^2 = 95,6\%$) memberikan penegasan kondisi yang baik (mendekati nilai 1). Hal ini memberikan pemahaman bahwa semua atribut cukup akurat dan memberikan hasil analisis yang semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengkaji status Multidimensi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Perbedaan nilai indeks keberlanjutan antara analisis MDS dan *Monte Carlo* dapat dilihat pada Tabel 6.12.

Tabel 6.12. Perbandingan Indeks Keberlanjutan MDS dan *Monte Carlo* (MC) Multidimensi

Kawasan Pantai Selatan	Indeks Keberlanjutan			Keputusan
	MDS	MC	Selisih	
Pantai Ngliyep	51,17	51,16	0,00%	Memadai
Pantai Balaikambang	60,21	60,05	0,16%	Memadai
Pantai Ungapan	56,42	56,23	0,19%	Memadai

Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel 6.12 menunjukkan bahwa hasil analisis *Monte Carlo* pada taraf kepercayaan 95% tidak mengalami perbedaan besar jika dibandingkan dengan hasil MDS. Nilai selisih antara indeks keberlanjutan hasil analisis MDS dan analisis *Monte Carlo* kurang dari 5% pada seluruh lokasi kawasan pantai selatan. Dengan demikian analisis *Rap-EcoBeach* memadai sebagai penduga status Multidimensi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

Hasil-hasil parameter statistik dan simulasi Monte Carlo tersebut memberikan pemahaman bahwa analisis *Rap-EcoBeach* secara kuantitatif dan cepat (*rapid appraisal*) cukup baik dipergunakan sebagai alat evaluasi dalam menentukan status Multidimensi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

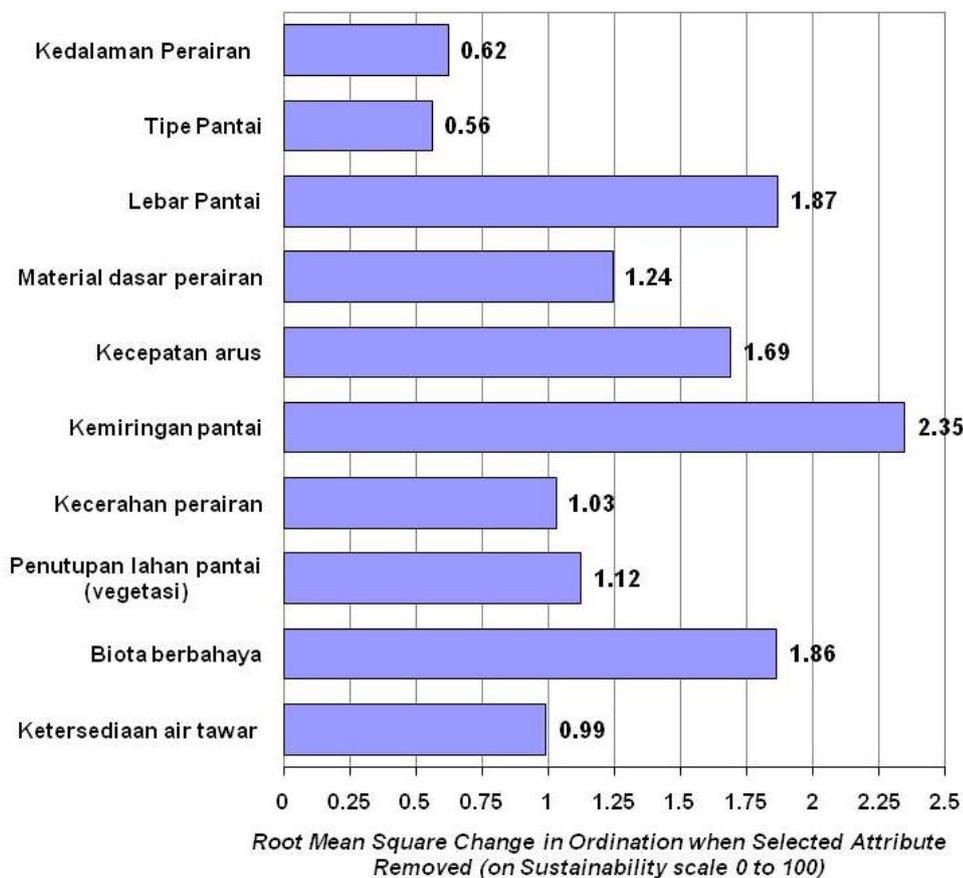
6.2 Atribut Sensitif Dimensi-dimensi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

Rap-EcoBeach selain menghasilkan keluaran analisis berupa indeks keberlanjutan masing-masing dimensi dan multidimensi, juga melakukan analisis *leverage*. Analisis *leverage* berfungsi untuk mengungkapkan atribut-atribut sensitif berdasarkan perbandingan nilai *Root Means Square* (RMS) dengan nilai *Median* (*Me*) pada masing-masing dimensi keberlanjutan. Atribut-atribut dinyatakan sensitif jika nilai *Root Means Square* (RMS) lebih besar dari nilai Median ($RMS > Me$). Atribut-atribut sensitif ini merupakan faktor pengungkit atau atribut-atribut yang keberadaannya berpengaruh sensitif dalam mengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

6.2.1 Atribut-atribut Sensitif Dimensi Lingkungan

Analisis *leverage* pada dimensi lingkungan berfungsi untuk mengungkapkan atribut-atribut pada dimensi lingkungan. Atribut-atribut ini merupakan atribut yang berpengaruh sensitif dalam mengungkit atau meningkatkan status keberlanjutan pada dimensi lingkungan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Hasil analisis *leverage* dimensi lingkungan sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* dapat dilihat pada Gambar 6.7.

Leverage of Attributes DIMENSI LINGKUNGAN



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.7. Nilai *Root Mean Square (RMS)* Dimensi Lingkungan

Gambar 7.2 merupakan hasil analisis *leverage* yang menghasilkan atribut-atribut sensitif sebagai faktor-faktor pengungkit dimensi lingkungan. Atribut dinyatakan sensitif jika $RMS > Me$, sedangkan nilai median dimensi lingkungan adalah 2,05. Ikhtisar nilai RMS berikut tingkat sensitivitas masing-masing atribut pada dimensi lingkungan dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 6.13.

Tabel 6.33. Nilai Root Mean Square (RMS) dan Tingkat Sensitivitas Atribut-Atribut Dimensi Lingkungan

No.	Atribut	RMS	Keterangan
1.	Kedalaman Perairan	0,62	-
2.	Tipe Pantai	0,56	-
3.	Lebar Pantai	1,87	Sensitif
4.	Material dasar perairan	1,24	-
5.	Kecepatan arus	1,69	Sensitif
6.	Kemiringan pantai	2,35	Sensitif
7.	Kecerahan perairan	1,03	-
8.	Penutupan lahan pantai	1,12	-
9.	Biota berbahaya	1,86	Sensitif
10.	Ketersediaan air tawar	0,99	-

Median = 1,33

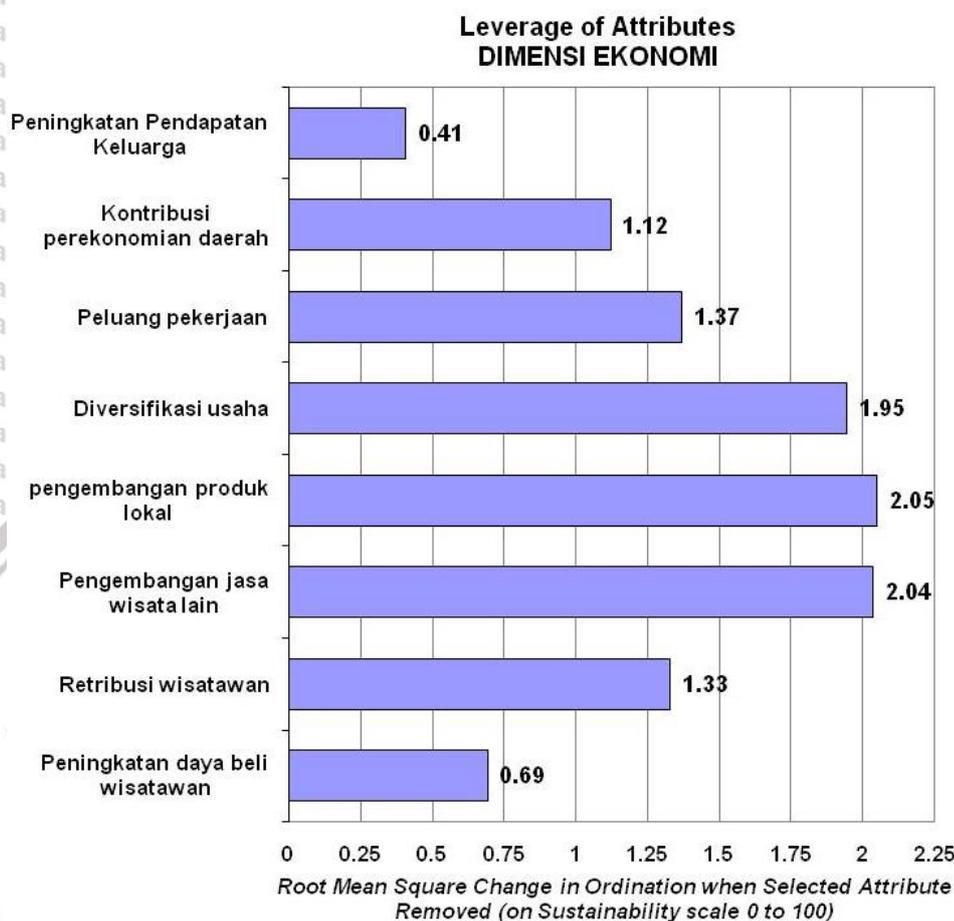
Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel tersebut menjelaskan bahwa atribut-atribut dimensi lingkungan memiliki nilai median 1,33. Atas dasar pemahaman ini maka atribut-atribut sensitif dimensi lingkungan yang merupakan faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan secara berurutan yakni: Kemiringan pantai (2,35), Lebar pantai (1,87), Biota berbahaya (1,86), dan Kecepatan arus (1,69). Atribut-atribut sensitif dimensi lingkungan ini merupakan faktor pengungkit atau faktor yang berpengaruh sensitif status dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Jika atribut-atribut sensitif ini diperbaiki maka akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi lingkungan.

6.2.2 Atribut-atribut Sensitif Dimensi Ekonomi

Analisis *leverage* pada dimensi ekonomi berfungsi untuk mengungkapkan atribut-atribut pada dimensi ekonomi. Atribut-atribut ini merupakan atribut yang berpengaruh sensitif dalam mengungkit atau meningkatkan status keberlanjutan pada dimensi ekonomi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan

pantai selatan di Kabupaten Malang. Hasil analisis *leverage* dimensi ekonomi sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* dapat dilihat pada Gambar 6.8.



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.8. Nilai Root Mean Square (RMS) Dimensi Ekonomi

Gambar 6.8 merupakan hasil analisis *leverage* yang menghasilkan atribut-atribut sensitif sebagai faktor-faktor pengungkit dimensi ekonomi. Atribut dinyatakan sensitif jika $RMS > Me$, sedangkan nilai median dimensi ekonomi adalah 1,37. Ikhtisar nilai RMS berikut tingkat sensitivitas masing-masing atribut dimensi ekonomi dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 6.14..

Tabel 6.14. Nilai Root Mean Square (RMS) dan Tingkat Sensitivitas Atribut-Atribut Dimensi Ekonomi

No.	Atribut	RMS	Keterangan
1.	Peningkatan pendapatan keluarga	0,41	-
2.	Kontribusi perekonomian daerah	1,12	-
3.	Peluang pekerjaan	1,37	<i>Sensitif</i>
4.	Diversifikasi usaha	1,95	<i>Sensitif</i>
5.	Pengembangan produk lokal	2,05	<i>Sensitif</i>
6.	Pengembangan jasa wisata lain	2,04	<i>Sensitif</i>
7.	Retribusi wisatawan	1,33	-
8.	Peningkatan daya beli wisatawan	0,69	-
Median = 1,37			

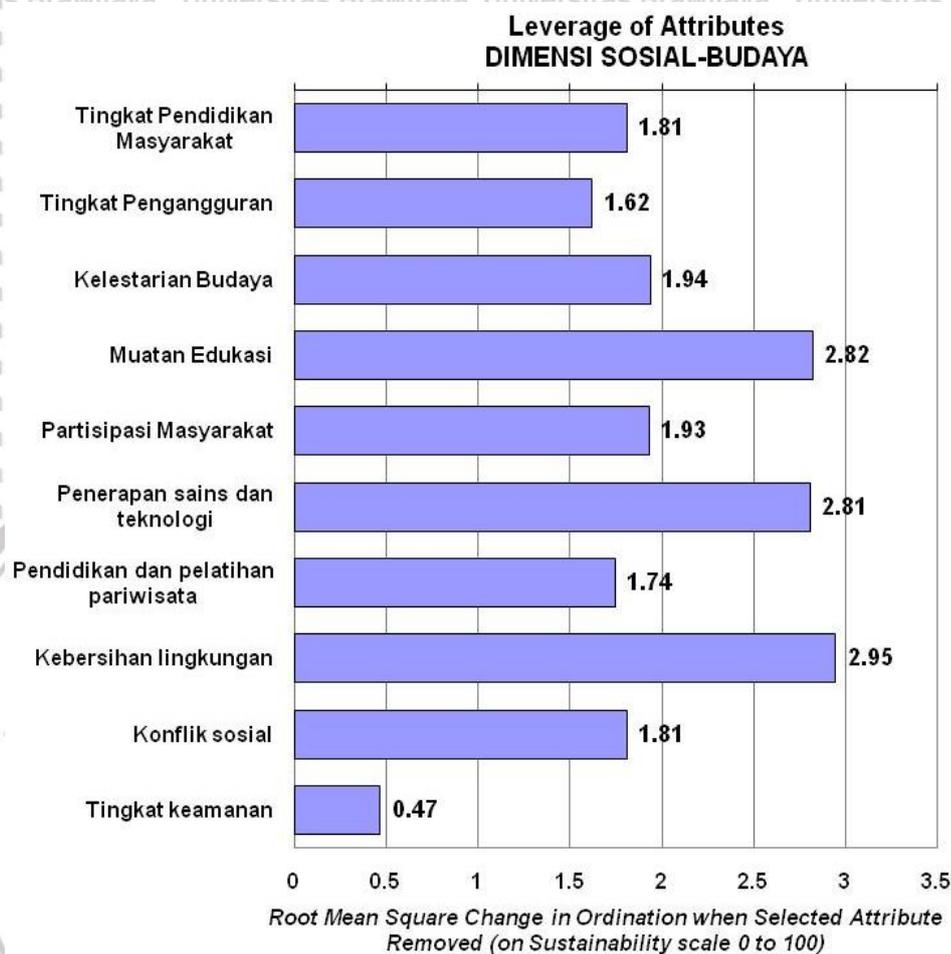
Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel tersebut menjelaskan bahwa atribut-atribut dimensi ekonomi memiliki nilai median 1,37. Atas dasar pemahaman ini maka atribut-atribut sensitif dimensi ekonomi yang merupakan faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan secara berurutan yakni: Pengembangan produk local (2,05), Pengembangan jasa wisata lain (2,04), Diversifikasi usaha (1,95), dan Peluang pekerjaan (1,37). Atribut-atribut sensitif dimensi ekonomi ini merupakan faktor pengungkit atau faktor yang berpengaruh sensitif status dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Jika atribut-atribut sensitif ini diperbaiki maka akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi ekonomi.

6.2.3 Atribut-atribut Sensitif Dimensi Sosial dan Budaya

Analisis *leverage* pada dimensi sosial dan budaya berfungsi untuk mengungkapkan atribut-atribut pada dimensi sosial dan budaya. Atribut-atribut ini merupakan atribut yang berpengaruh sensitif dalam mengungkit atau meningkatkan status keberlanjutan pada dimensi sosial dan budaya dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten

Malang. Hasil analisis *leverage* dimensi sosial dan budaya sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* dapat dilihat pada Gambar 6.7.



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.9. Nilai Root Mean Square (RMS) Dimensi Sosial dan Budaya

Gambar 6.9 merupakan hasil analisis *leverage* yang menghasilkan atribut-atribut sensitif sebagai faktor-faktor pengungkit dimensi Sosial dan budaya. Atribut dinyatakan sensitif jika $RMS > Me$, sedangkan nilai median dimensi sosial dan budaya adalah 2,05. Ikhtisar nilai RMS berikut tingkat sensitivitas masing-masing atribut dimensi sosial dan budaya dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 6.15.

Tabel 6.15. Nilai Root Mean Square (RMS) dan Tingkat Sensitivitas Atribut-Atribut Dimensi Sosial dan Budaya

No.	Atribut	RMS	Keterangan
1.	Tingkat pendidikan masyarakat	1,81	-
2.	Tingkat pengangguran	1,62	-
3.	Kelestarian budaya	1,94	-
4.	Muatan edukasi	2,82	Sensitif
5.	Partisipasi masyarakat	1,93	-
6.	Penerapan sains dan teknologi	2,81	Sensitif
7.	Pendidikan & pelatihan pariwisata	1,74	-
8.	Kebersihan lingkungan	2,95	Sensitif
9.	Konflik sosial	1,81	-
10.	Tingkat keamanan	0,47	-
Median = 1,99			

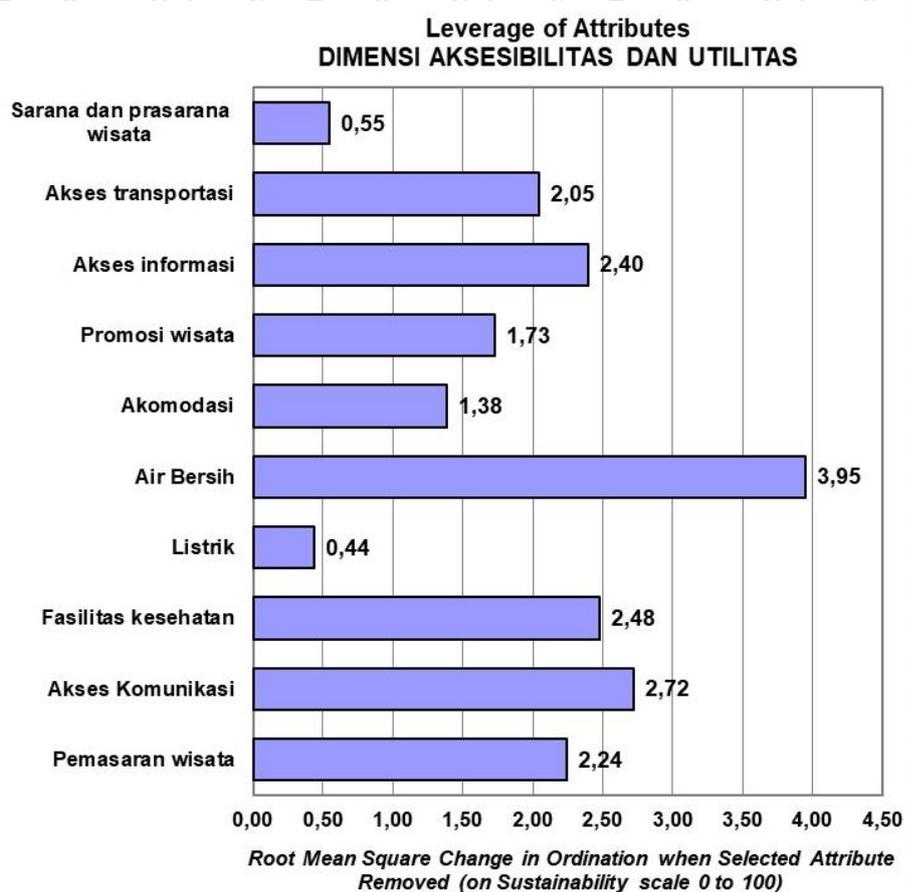
Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel 6.15 menjelaskan bahwa atribut-atribut dimensi sosial dan budaya memiliki nilai median 1,99. Atas dasar pemahaman ini maka atribut-atribut sensitif dimensi sosial dan budaya yang merupakan faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan secara berurutan yakni: Kebersihan lingkungan (2,95), Muatan edukasi (2,82), dan Penerapan sains dan teknologi (2,81). Atribut-atribut sensitif dimensi sosial dan budaya ini merupakan faktor pengungkit atau faktor yang berpengaruh sensitif status dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Jika atribut-atribut sensitif ini diperbaiki maka akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi sosial dan budaya.

6.2.4 Atribut-atribut Sensitif Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas

Analisis *leverage* pada dimensi aksesibilitas dan utilitas berfungsi untuk mengungkapkan atribut-atribut pada dimensi aksesibilitas dan utilitas. Atribut-atribut ini merupakan atribut yang berpengaruh sensitif dalam mengungkit atau

meningkatkan status keberlanjutan pada dimensi aksesibilitas dan utilitas dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Hasil analisis *leverage* dimensi aksesibilitas dan utilitas sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* dapat dilihat pada Gambar 6.7.



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.10. Nilai Root Mean Square (RMS) Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas

Gambar 7.2 merupakan hasil analisis *leverage* yang menghasilkan atribut-atribut sensitif sebagai faktor-faktor penguangkit dimensi Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas. Atribut dinyatakan sensitif jika $RMS > Me$, sedangkan nilai median dimensi Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas adalah 1,99. Ikhtisar nilai RMS berikut tingkat sensitivitas masing-masing atribut dimensi Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 6.16..

Tabel 6.16. Nilai Root Mean Square (RMS) dan Tingkat Sensitivitas Atribut-Atribut Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas

No.	Atribut	RMS	Keterangan
1.	Sarana dan prasarana wisata	0,55	-
2.	Akses transportasi	2,05	Sensitif
3.	Akses informasi	2,40	Sensitif
4.	Promosi wisata	1,73	-
5.	Akomodasi	1,38	-
6.	Air bersih	3,95	Sensitif
7.	Listrik	0,44	-
8.	Fasilitas kesehatan	2,48	Sensitif
9.	Akses komunikasi	2,72	Sensitif
10.	Pemasaran wisata	2,24	Sensitif
Median = 1,99			

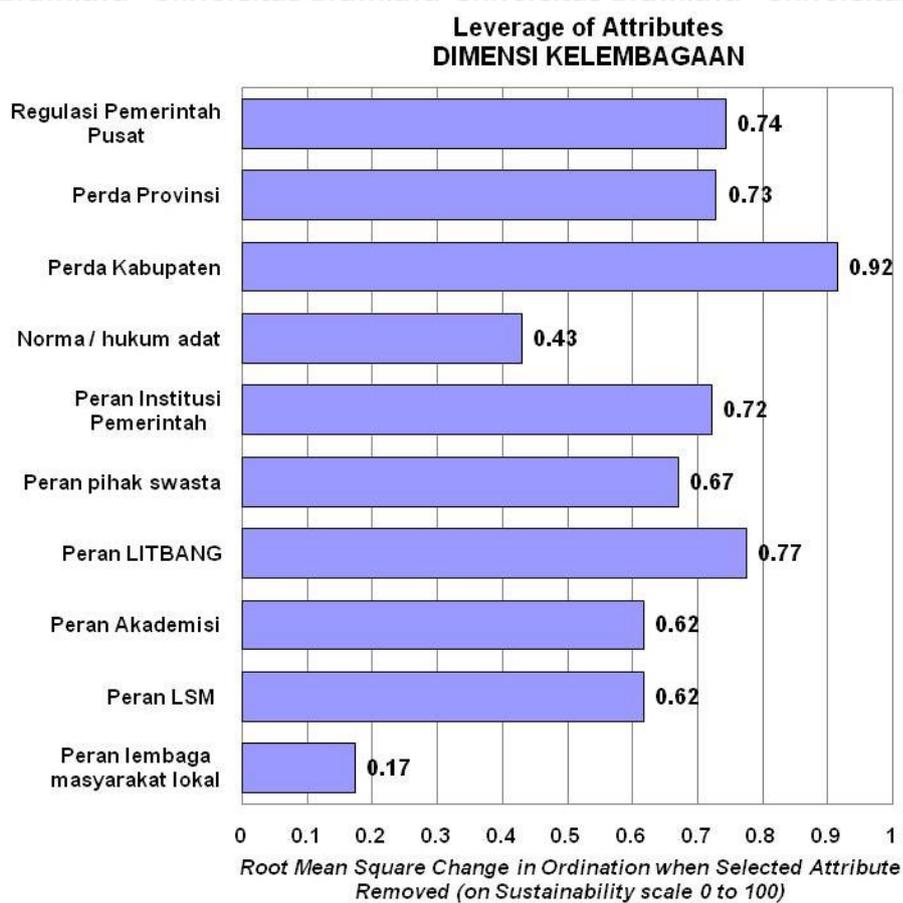
Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel tersebut menjelaskan bahwa atribut-atribut dimensi aksesibilitas dan utilitas memiliki nilai median 1,99. Atas dasar pemahaman ini maka atribut-atribut sensitif dimensi aksesibilitas dan utilitas yang merupakan faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan secara berurutan yakni: Air bersih (3,95), Akses komunikasi wisata (2,72), Fasilitas kesehatan (2,48), Akses informasi (2,40), Pemasaran wisata (2,24), dan Akses transportasi (2,05). Atribut-atribut sensitif dimensi aksesibilitas dan utilitas ini merupakan faktor pengungkit atau faktor yang berpengaruh sensitif status dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Jika atribut-atribut sensitif ini diperbaiki maka akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi aksesibilitas dan utilitas.

6.2.5 Atribut-atribut Sensitif Dimensi Kelembagaan

Analisis *leverage* pada dimensi kelembagaan berfungsi untuk mengungkapkan atribut-atribut pada dimensi kelembagaan. Atribut-atribut ini

merupakan atribut yang berpengaruh sensitif dalam mengungkit atau meningkatkan status keberlanjutan pada dimensi kelembagaan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Hasil analisis *leverage* dimensi kelembagaan sebagaimana olahan *Rap-EcoBeach* dapat dilihat pada Gambar 6.7.



Sumber : Data diolah, 2019.

Gambar 6.11. Nilai Root Mean Square (RMS) Dimensi Kelembagaan

Gambar 6.11 merupakan hasil analisis *leverage* yang menghasilkan atribut-atribut sensitif sebagai faktor-faktor pengungkit dimensi kelembagaan.

Atribut dinyatakan sensitif jika $RMS > Me$, sedangkan nilai median dimensi kelembagaan adalah 0,64. Ikhtisar nilai RMS berikut tingkat sensitivitas masing-masing atribut dimensi kelembagaan dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 6.17.

Tabel 6.17. Nilai Root Mean Square (RMS) dan Tingkat Sensitivitas Atribut-Atribut Dimensi Kelembagaan

No.	Atribut	RMS	Keterangan
1.	Regulasi Pemerintah Pusat	0,74	Sensitif
2.	Perda Provinsi	0,73	Sensitif
3.	Perda Kabupaten	0,92	Sensitif
4.	Norma / hukum adat	0,43	-
5.	Peran Institusi Pemerintah	0,72	Sensitif
6.	Peran pihak swasta	0,67	Sensitif
7.	Peran LITBANG	0,77	Sensitif
8.	Peran Akademisi	0,62	-
9.	Peran LSM	0,62	-
10.	Peran lembaga masyarakat lokal	0,17	-
Median = 0,64			

Sumber : Data diolah, 2019.

Tabel 6.17 menjelaskan bahwa atribut-atribut dimensi kelembagaan memiliki nilai median 0,64. Atas dasar pemahaman ini maka atribut-atribut sensitif dimensi kelembagaan yang merupakan faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan secara berurutan yakni: Perda Kabupaten (0,92), Peran LITBANG (0,77), Regulasi Pemerintah Pusat (0,74), Perda Provinsi (0,73), Peran Institusi Pemerintah (0,72), dan Peran pihak swasta (0,67). Atribut-atribut sensitif dimensi kelembagaan ini merupakan faktor pengungkit atau faktor yang berpengaruh sensitif status dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Jika atribut-atribut sensitif ini diperbaiki maka akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi kelembagaan.

6.3 Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya pelaksanaan pembangunan dengan mengurangi pengaruh buruk pembangunan terhadap lingkungan. Pembangunan sektor pariwisata yang terjadi belakangan ini cukup menimbulkan kekhawatiran berbagai kalangan atas dampak buruk yang ditimbulkannya. Dampak buruk tersebut diantaranya berupa eksploitasi berlebihan pada suatu kawasan wisata yang berujung pada penurunan potensi dan bahkan mengakibatkan penurunan minat wisatawan untuk berkunjung di kawasan wisata tersebut. Minimnya perhatian serta pengawasan akan berakibat fatal manakala eksploitasi yang dilakukan ini telah melewati ambang batas kewajaran. Oleh karena itulah konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) mengedepankan arti penting kelestarian objek wisata alam dari bentuk-bentuk eksploitasi secara berlebihan. Konsep pariwisata berkelanjutan ini selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan ekowisata.

Penelitian pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang ini dilaksanakan pada 3 (tiga) lokasi pantai kawasan pantai selatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Ketiga lokasi pantai tersebut adalah pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang. Pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur merupakan realisasi konsepsi ekowisata yang lahir atas dasar kekhawatiran terjadinya eksploitasi kawasan pantai selatan secara berlebihan. Konsepsi ekowisata ini diharapkan mampu mempertahankan kelestarian alam khususnya Kawasan pantai selatan serta memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Atribut-atribut sensitif pada masing-masing dimensi merupakan faktor-faktor penguangkit kenaikan status keberlanjutan. Atribut-atribut sensitif ini apabila diperbaiki maka akan mampu meningkatkan status dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang. Oleh karena itu penyusunan strategi keberlanjutan dilakukan dengan mengacu pada keberadaan faktor-faktor penguangkit pada masing-masing dimensi pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang.

6.3.1 Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Lingkungan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

Atribut-atribut sensitif dimensi lingkungan merupakan faktor penguangkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan secara berurutan yakni: kemiringan pantai, lebar pantai, biota berbahaya, dan kecepatan arus. Atribut-atribut sensitif ini jika diperbaiki maka diharapkan akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi lingkungan dengan penjelasan sebagaimana berikut ini.

1. Kemiringan pantai

Kemiringan pantai merupakan derajat kemiringan pantai yang dimiliki oleh ketiga objek kawasan pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pantai Ngliyep memiliki kemiringan 65° , pantai Ungapan dengan kemiringan 58° , dan kemiringan pantai Balaikambang sebesar 75° . Hal ini menunjukkan bahwa ketiga kawasan pantai ini tidak sesuai untuk wisata pantai sehingga perlu dicari solusi agar hal ini nantinya tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan para wisatawan.

Kemiringan pantai berhubungan dengan arus yang datang dari laut.

Semakin mendekati garis pantai, kelandaian gelombang datang akan semakin curam seiring dengan berkurangnya kedalaman dan akhirnya gelombang akan pecah. Pemecahan gelombang ini membawa dampak positif bagi kenyamanan wisatawan untuk melakukan rekreasi di pinggiran pantai (Umar, 2012). Nilai kemiringan pantai akan berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan dalam wisata, terutama untuk aktivitas berenang dan mandi.

Kemiringan pantai yang kurang dari 10° sangat sesuai untuk wisata pantai, sedangkan kemiringan pantai yang lebih dari 45° tidak sesuai untuk wisata pantai karena merupakan pantai yang curam. Dengan kemiringan pantai yang landai, dapat membuat para pengunjung merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas wisata pantai (Rahmawati, 2009).

Tipe pantai pada umumnya terbagi menjadi empat tipe, yaitu pantai datar, landai, curam, dan terjal. Pantai yang datar memiliki kemiringan $<10^\circ$, landai $10-25^\circ$ dan curam $>25^\circ$ (Yulianda, 2007). Oleh karena itu, mengurangi kemiringan pantai sehingga pantai menjadi datar sampai landai merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keamanan pengunjung dalam melakukan aktifitas wisata pantai.

2. Lebar pantai

Lebar pantai, yaitu jarak antara vegetasi terakhir yang ada di pantai dengan batas surut terendah. Pengukuran lebar pantai dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar wilayah pantai yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan wisata pantai. Lebar pantai ketiga objek kawasan pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang, masing-masing adalah pantai Ngliyep memiliki lebar 127 meter ke arah laut, pantai Ungapan dengan lebar 155 meter, dan pantai Balaikambang memiliki lebar 200 meter ke arah laut. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga kawasan pantai ini sesuai untuk wisata

pantai. Namun demikian lebar pantai ini tentunya berdampak pada tingginya ombak yang pada kondisi tertentu akan membahayakan bagi para wisatawan.

Lebar pantai berkaitan dengan luasnya lahan pantai yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas wisata pantai. Lebar pantai sangat mempengaruhi aktivitas yang dilakukan para pengunjung. Semakin lebar suatu pantai, semakin baik untuk pengunjung dalam melakukan aktivitasnya, namun semakin kecil lebar pantai yang dimiliki suatu tempat wisata, pengunjung merasa tidak nyaman untuk melakukan aktivitas (Rahmawati, 2009). Kesesuaian lebar pantai yang dimiliki oleh pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang untuk objek wisata, tentunya dapat dioptimalkan pemanfaatannya dengan tetap menjaga lebar pantai ini dari kemungkinan terjadinya abrasi, erosi, dan sedimentasi. Panjang garis pantai dan lebar pantai yang cukup panjang dengan hamparan pasir hitam sangat memungkinkan untuk melakukan aktivitas di sepanjang pantai tersebut baik untuk kegiatan rekreasi seperti sarana bermain bagi pengunjung terutama anak-anak, berjemur, dan kegiatan wisata yang lain.

3. Biota berbahaya

Biota berbahaya merupakan faktor penting dalam wisata baik rekreasi maupun berenang. Semakin sedikit biota berbahaya yang ditemukan maka lokasi tersebut akan semakin baik. Di antara spesies yang berasosiasi pada ekosistem pantai, mangrove, lamun, maupun terumbu karang terdapat biota yang cukup berbahaya bagi pengunjung. Keberadaan biota berbahaya tentunya akan mengganggu pengunjung wisata. Adapun biota berbahaya bagi pengunjung wisata antara lain, gastropoda, karang api, ikan pari, landak laut, bulu babi, ubur-ubur, anemon, dan ular laut.

Hasil pengamatan secara visual di pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang tidak ditemukan biota berbahaya. Dengan demikian

kawasan pantai ini menunjang kegiatan wisatawan dari aspek keamanan dan kenyamanan wisatawan khususnya untuk rekreasi pantai dan berenang. Kondisi yang demikian sudah semestinya untuk selalu dijaga dengan selalu mengadakan pengawasan terhadap objek pantai itu sendiri jangan sampai nantinya diketemukan biota berbahaya.

4. Kecepatan arus

Arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dapat disebabkan oleh tiupan angin atau karena perbedaan densitas air laut atau dapat pula disebabkan oleh Gerakan bergelombang panjang (gerakan pasang surut). Arus yang disebabkan oleh pasang surut, biasanya lebih banyak dapat diamati di perairan pantai (Nontji 2005). Penggolongan kecepatan arus terdiri atas empat kategori, yaitu kategori arus lambat dengan kecepatan 0–0,25 m/s, kategori arus sedang dengan kecepatan 0,25–0,50 m/s, kategori arus cepat dengan kecepatan pada kisaran 0,5–1 m/s dan kategori arus sangat cepat dengan kecepatan di atas 1 m/s (Tambunan *et al.*, 2013).

Informasi tentang arus sangat berguna berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan berwisata karena kecepatan arus yang terlalu tinggi dapat membahayakan pengunjung mengingat tidak adanya pembatasan kawasan yang diperbolehkan untuk berenang, maka parameter ini sangat penting untuk diukur kesesuaiannya. Hasil yang diperoleh dari pengamatan langsung di pantai Ngliep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang memiliki rata-rata 0,23 m/s sehingga kecepatan arus di ketiga pantai ini termasuk kategori arus sedang. Namun demikian, sebagai bagian dari Pantai Selatan, ketiga pantai ini pada kondisi pasang, yakni sore hari memiliki kecepatan arus rata-rata diatas 0,53 m/s atau arus cepat yang membahayakan bagi para pengunjung. Oleh karena itu pada ketiga pantai ini perlu adanya rambu peringatan atau pembatasan waktu kunjungan, khususnya bagi wisatawan yang hendak melakukan aktivitasnya di perairan pantai seperti berenang, berlayar, dan sebagainya.

6.3.2 Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Ekonomi Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

Atribut-atribut sensitif dimensi ekonomi merupakan faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan, masing-masing adalah pengembangan produk lokal, pengembangan jasa wisata lain, diversifikasi usaha, dan peluang pekerjaan. Atribut-atribut sensitif ini jika diperbaiki maka diharapkan akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi ekonomi dengan penjelasan sebagaimana berikut ini.

1. Pengembangan produk lokal

Pemerintah Kabupaten Malang mulai mengimplementasikan kebijakan tentang pengembangan Produk Unggulan Daerah melalui *one village one product (OVOP)*. Kebijakan pemerintah Kabupaten Malang ini mempunyai tujuan bahwa pengembangan produk unggulan daerah di Kabupaten Malang sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa produk lokal tersebut diantaranya berupa industri rumahan seperti industri kerajinan gerabah, kerajinan keramik, dan industri makanan olahan berupa keripik buah, dan sebagainya.

Pelaksanaan pendekatan OVOP pertama yang dijalankan dalam kategori berhasil sehingga pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Malang mulai mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pengembangan produk unggulan yaitu dengan melakukan revitalisasi di sektor koperasi, industri kecil dan menengah melalui OVOP atau satu desa satu produk dengan basis komoditi unggulan. Seiring perkembangannya, OVOP di Kabupaten Malang telah menjadi salah satu instrumen untuk pembangunan sektoral, bahkan sudah dilandasi dengan adanya Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/1185/KEP/421.013/2013 tentang Produk Unggulan

Kecamatan Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product* – OVOP).

Kebijakan pemerintah Kabupaten Malang ini mempunyai tujuan bahwa pengembangan produk unggulan daerah di Kabupaten Malang sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam upaya pengembangan ekowisata pantai selatan ini pengembangan produk lokal belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu penanganan yang lebih optimal lagi dengan melibatkan para stakeholders.

2. Pengembangan jasa wisata lain

Pengembangan jasa wisata lain diharapkan tidak saja akan menambah jenis-jenis objek wisata tambahan yang mendukung keberadaan pantai sebagai objek wisata, namun juga akan mampu menambah pendapatan rumah tangga bagi masyarakat sekitarnya. Karakteristik objek wisata yang dimiliki oleh objek wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang antara lain adalah keindahan pantai, dikelilingi oleh perbukitan, keberadaan pepohonan di pinggir pantai, serta keindahan sehingga selalu menarik wisatawan untuk berkunjung. Dengan semua keindahan yang dimilikinya, keramahtamaan penduduk lokal, hal ini tentunya membuka peluang bagi terwujudnya pengembangan jasa wisata lain, khususnya jasa wisata buatan, seperti tempat bermain anak, jasa wisata keliling kawasan pantai, wisata budaya, dan sebagainya.

Jenis-jenis pengembangan jasa wisata lain atau yang terkait dengan upaya untuk menambah pendapatan ekonomi masyarakat yang dapat dilakukan di kawasan objek wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang antara lain adalah sebagaimana berikut ini.

a. Bisnis kuliner

Berkunjung ke tempat wisata pantai tentu saja akan menghabiskan waktu yang cukup banyak. Banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan ketika berlibur di pantai seperti bermain air, bermain pasir, berenang, berselancar dan lain sebagainya membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Dengan melihat peluang tersebut, maka menjalankan bisnis kuliner seperti membuka rumah makan atau restoran merupakan pilihan yang tepat. Karena pasti akan banyak disinggahi oleh para wisatawan.

b. Jasa Penginapan

Jenis bisnis yang paling potensial untuk dijalankan di sekitar daerah wisata pantai lainnya adalah penginapan atau *homestay*. Wisatawan yang berkunjung untuk berlibur berasal dari berbagai macam daerah baik itu lokal maupun internasional. Apalagi bagi wisatawan yang berasal dari tempat yang jauh, maka tidak cukup rasanya jika menghabiskan waktu hanya satu hari saja. Untuk dapat memuaskan diri dalam menikmati objek wisata dalam beberapa hari, maka mereka harus menginap atau tinggal sementara.

c. Jasa toilet dan kamar mandi

Seorang wisatawan yang melakukan aktivitas di pantai seperti berenang, bermain air, dan selancar pasti membutuhkan toilet dan kamar mandi. Oleh karena itu, peluang bisnis wisata pantai yang satu ini cukup menjanjikan. Membuka jasa sewa toilet dan kamar mandi akan sangat laris dan ramai. Dengan begitu, Anda akan lebih mudah untuk memperoleh pendapatan tinggi, apalagi saat banyak pengunjung pantai di musim liburan.

d. Jasa tempat parkir

Minimnya lahan parkir yang ada di daerah pantai membuat bisnis tempat parkir kendaraan menjadi salah satu bisnis sampingan yang potensial. Ditambah dengan medan yang berpasir, membuat kendaraan kesulitan untuk melintas. Sehingga setiap kendaraan para pengunjung pantai harus diparkirkan di kawasan sebelum memasuki pantai. Jenis bisnis yang satu ini sangat cocok bagi para penduduk yang memiliki lahan kosong untuk dijadikan sebagai tempat parkir.

e. Sewa kendaraan

Peluang bisnis wisata pantai lain yang tidak kalah potensial untuk dijalankan adalah jasa sewa kendaraan. Beberapa wisatawan yang berkunjung akan membutuhkan kendaraan seperti motor atau mobil untuk berkeliling di daerah wisata. Kondisi ini sangat cocok untuk dijadikan peluang dalam menjalankan bisnis sewa kendaraan. Selain mobil dan motor, kendaraan lain yang dapat disewakan biasanya adalah ATV. Para pengunjung pantai akan tertarik untuk menyewa ATV yang dapat digunakan saat ingin mengintari garis pantai.

f. Sewa peralatan pantai

Para wisatawan yang berkunjung di pantai biasanya tidak hanya menikmati keindahan pemandangannya saja. Pada umumnya mereka juga ingin melakukan berbagai kegiatan lain seperti *snorkeling*, *diving*, atau selancar. Tidak semua wisatawan yang datang membawa peralatan sendiri dari rumah. Oleh karena itu, bisnis sewa peralatan untuk berbagai kegiatan wisata pantai sangat berpeluang. Beberapa barang yang dapat disewakan untuk wisatawan diantaranya adalah perahu, papan selancar, alat serang, *diving*, dan lain sebagainya.

g. Sewa tenda dan perlengkapan berkemah

Bagi para wisatawan yang belum puas menikmati pesona pantai di siang hari, biasanya mereka akan melanjutkan untuk bermalam di pantai.

Hal ini tentu saja dapat dijadikan sebagai peluang bisnis wisata pantai yang cukup menjanjikan dengan menyewakan tenda berikut perlengkapan pendukungnya.

h. Sewa tikar dan layang-layang

Para wisatawan yang berkunjung ke pantai biasanya membawa keluarga besarnya. Jumlahnya pun biasanya mencapai 8 hingga 10 orang. Hal ini merupakan salah satu peluang bisnis wisata pantai yang dapat dimanfaatkan dengan membuka bisnis sewa tikar. Selain itu, berjualan atau menyewakan layang-layang juga diminati banyak orang.

Angin pantai yang kencang sangat mendukung Anda untuk berjualan atau menyewakan layang-layang.

3. Diversifikasi usaha

Diversifikasi usaha merupakan upaya untuk melakukan pengembangan usaha di kawasan wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang dengan tujuan untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Diversifikasi usaha tersebut antara lain dengan diversifikasi produk wisata atraksi pada objek wisata, pengembangan objek-objek wisata alam lebih diarahkan menjadi *alternative tourism* dengan pengembangan paket-paket wisata. Oleh karena itu, dengan pengembangan paket wisata, meskipun jumlah kunjungan wisatawan lebih sedikit dibandingkan wisata buatan namun, pendapatan yang didapatkan dari pengeluaran wisatawan menjadi lebih besar.

Pengembangan paket wisata dapat diarahkan pada paket *outbound* (*flying fox, marine bridge, hell barrier, birma crosser, spider web, monkey leader*) yang sifatnya lebih dekat dengan alam, serta tetap dikombinasikan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, baik melalui kegiatan perkemahan, wisata anak (*playground*) ataupun paket wisata minat khusus dengan kegiatan yang dapat memacu adrenalin seperti *motorcross, grass track, downhill mountain bike*. Selain penambahan wahana-wahana bertema, pengelola dapat melakukan diversifikasi atraksi wisata dengan menambahkan event-event budaya seperti tari-tarian pada jam-jam tertentu. Penambahan wahana-wahana ini dapat mengurangi kebosanan pada wisatawan serta meningkatkan omzet penjualan. Hal ini selain menambah kegiatan wisata di dalam objek wisata dan mengenalkan wisata budaya bagi wisatawan

4. Peluang pekerjaan

Keberadaan kawasan wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang sebagai daerah tujuan wisata diharapkan akan membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan, seperti: usaha perdagangan, terbukanya peluang bagi masyarakat untuk menyediakan sewa penginapan, persewaan sepeda motor, berdirinya toko souvenir, dan sebagainya. Kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan ketiga kawasan pantai tersebut sebagai objek pariwisata masih belum secara optimal mampu membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Dari perspektif ekonomi, dampak positif pariwisata yaitu: (1) mendatangkan devisa bagi negara melalui penukaran mata uang asing di daerah tujuan wisata, (2) pasar potensial bagi produk barang dan jasa masyarakat setempat, (3) meningkatkan pendapatan masyarakat yang kegiatannya terkait langsung atau tidak langsung dengan jasa pariwisata, (4)

memperluas penciptaan kesempatan kerja, baik pada sektor-sektor yang terkait langsung seperti perhotelan, restoran, agen perjalanan, maupun pada sektor-sektor yang tidak terkait langsung seperti industri kerajinan, penyediaan produk-produk pertanian, atraksi budaya, bisnis eceran, jasa-jasa lain dan sebagainya, (5) sumber pendapatan asli daerah (PAD), dan (6) merangsang kreativitas seniman, baik seniman pengrajin industri kecil maupun seniman tabuh dan tari yang diperuntukkan konsumsi wisatawan.

Sementara itu, RENSTRA Disparbud Kab. Malang Tahun 2016 – 2021

menyebutkan bahwa pariwisata dikategorikan sebagai salah satu sektor ekonomi penting yang dapat menambah pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, menyediakan lapangan pekerjaan, memerangi kemiskinan, dan melestarikan budaya lokal. Pembangunan ekonomi daerah yang kuat merupakan sebuah perpaduan yang efektif antara pemanfaatan sumberdaya yang ada, dalam hal ini pemanfaatan sumber daya alam maupun budaya dengan masyarakat dan pemerintah.

Kebutuhan tenaga kerja pariwisata makin meningkat sejalan dengan makin berkembangnya usaha jasa pariwisata, sarana pariwisata serta usaha objek dan daya tarik wisata. Oleh karena itu kesempatan kerja di bidang pariwisata perlu juga diperhitungkan, berdasarkan pada jumlah kunjungan wisatawan, jumlah pengeluaran wisatawan dan pertumbuhan sarana pariwisata. Oleh karena itu dalam konteks terbukanya peluang pekerjaan ini, pemerintah sebagai regulator berperan strategis dalam mengupayakan kesempatan yang luas bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi penuh dalam setiap aktivitas ekonomi. Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan potensi yang ada di masyarakat sekitar untuk kemudian melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat terkait pemanfaatan peluang pekerjaan yang ada.

6.3.3 Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Sosial dan Budaya Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

Atribut-atribut sensitif dimensi sosial dan budaya merupakan faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan, masing-masing adalah kebersihan lingkungan, muatan edukasi, dan penerapan sains dan teknologi. Atribut-atribut sensitif ini jika diperbaiki maka diharapkan akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi sosial dan budaya dengan penjelasan sebagaimana berikut ini.

1. Kebersihan lingkungan

Kualitas kebersihan yang merupakan kondisi nyaman secara umum bagi wisatawan yang diciptakan oleh pengelolaan daerah wisata itu sendiri. Baik wisatawan, penduduk lokal, dan pengelola sarana umum atau pribadi diharapkan turut berperan dalam menjaga kualitas kebersihan lingkungan. Kualitas kebersihan lingkungan sangat berperan penting dalam menciptakan suasana lingkungan daya tarik wisata yang nyaman dan memberikan citra positif bagi wisatawan yang datang mengunjunginya.

Keberadaan kawasan wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Namun demikian hal ini berdampak pada kondisi kebersihan lingkungan yang tidak terjaga dengan baik. Sampah yang dihasilkan dari kegiatan pengunjung atau wisatawan tidak dapat dikelola dengan maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran para pengunjung atau wisatawan yang didukung oleh minimnya sarana prasarana kebersihan yang tersedia. Hal ini tentu saja sangat berdampak buruk pada citra daya tarik wisata pantai yang jika dibiarkan daya tarik ini akan semakin ditinggalkan karena kurang baiknya pengelolaan kebersihan pantai.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal

24 (b) menjelaskan setiap orang berkewajiban membantu terciptanya suasana, aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Terkait realisasi kebijakan pemerintah dalam mendukung kebersihan destinasi wisata diselenggarakan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat adalah sampah. Melalui kebijakan yang dibuat bersama dengan dinas-dinas terkait, maka sampah tidak lagi sebagai beban pekerjaan. Terlebih kedatangan wisatawan pada waktu tertentu bisa saja dalam jumlah besar sehingga memungkinkan sampah juga mengalami peningkatan drastis. Oleh karena itu perlu perencanaan dan antisipasi yang dilakukan guna mengatasi permasalahan sampah ini untuk jangka waktu yang panjang. Kebijakan yang dimaksud tentunya mencakup juga ketersediaan SDM yang bertanggung jawab secara penuh terhadap kebersihan pantai dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kebersihan.

Selain itu, penerapan strategi juga berhubungan dengan upaya menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat dan wisatawan untuk selalu menjaga kebersihan objek wisata. Sebagai stakeholder, pemerintah dan masyarakat lokal dapat membuat konsep bersama untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Implementasi kebijakan kebersihan yang dibuat pemerintah untuk wisatawan dapat dilakukan melalui pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara intens. Bisa dengan menyelenggarakan polisi kebersihan untuk memantau dan menindak orang-orang yang membuang sampah sembarangan.

2. Muatan edukasi

Wisata edukasi atau *edutourism* adalah suatu program dimana wisatawan berkunjung ke suatu lokasi wisata dengan tujuan utama untuk memperoleh pengalaman pembelajaran secara langsung di obyek wisata

tersebut. Wisata edukasi (pendidikan) juga merupakan gabungan dari beberapa sub-tipe wisata seperti ekowisata, wisata sejarah dan budaya, wisata pedesaan, dan sebagainya. *Edutourism* merupakan diversifikasi daya tarik wisata dari wisata alam (ekowisata) yang bertujuan untuk memperluas dan memperbanyak produk wisata alam.

Wisata edukasi yang ada di Kabupaten Malang beraneka ragam yang kesemuanya ini dapat dijadikan sebagai bagian dari paket wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang. Wisata pantai dengan muatan edukasi ini dapat dilakukan tidak saja berupa ekosistem laut selatan, namun juga keberadaan habitat seputaran pantai yang sebagian besar masih berupa hutan dan pegunungan. Selain itu, juga dapat berupa peninggalan sejarah seperti Kerajaan Singosari, Kanjuruhan dan budaya-budaya lokal seperti bantengan, dan sebagainya.

Wisata edukasi yang ada di Kabupaten Malang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Wisata Budaya. Kekayaan etnis dan budaya yang dimiliki Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Wayang Topeng Malang (Topeng Malang). Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan tiga budaya (Jawa Tengah, Madura, dan Tengger). Saat ini bertambah kesenian baru yang kian berkembang pesat di kota Malang yaitu kesenian "Bantengan" kesenian ini merupakan hasil dari kreatifitas masyarakat asli Malang, sejak dahulu sebenarnya kesenian ini sudah dikenal oleh masyarakat Malang namun baru sekaranglah "Bantengan" lebih dikenal oleh masyarakat tidak hanya masyarakat lokal namun juga luar daerah bahkan mancanegara.
- b. Wisata Petik Buah. Terdapat banyak perkebunan perkebunan apel, stroberi, jeruk, dan jambu yang memiliki nilai artistik dan memikat untuk

didatangi. Pengunjung tak hanya bisa memuaskan mata melihat bebuaan di pohonnya, tapi juga bisa belajar bagaimana memetik buah tanpa merusak pohon. Adapun lokasi untuk Petik Jeruk di Kecamatan Dau dan Petik Jambu di Selorejo.

c. Wisata Candi. Terdapat banyak candi yang bernilai sejarah yang terletak di Malang. Candi tersebut yaitu Candi Singosari, Jago dan Kidal. Adapun lokasinya berada di Singosari (candi singosari) dan Tumpang (candi jago dan kidal).

d. Wisata Perkebunan. Agrowisata Wonosari Singosari menampilkan keindahan alam berupa perkebunan teh yang hijau. Sejauh mata memandang terhampar hijau pucuk-pucuk daun teh yang segar. Disini pangunjung dapat mengikuti proses pembuatan teh, mulai dari pemetikan daun hingga siap diminum.

e. Wisata Bendungan. Keindahan danau buatan sambil berperahu dan memancing dapat dinikmati di Bendungan Karangates Kecamatan Sumberpucung.

3. Penerapan sains dan teknologi

Penerapan ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi merupakan upaya dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung konsepsi ekowisata di kawasan wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang. Keberadaan ketiga pantai ini untuk menuju konsepsi ekowisata masih memerlukan banyak pengembangan dan disinilah peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Ilmu pengetahuan diarahkan pada pemahaman terhadap ekowisata itu sendiri kepada seluruh stakeholder, sedangkan teknologi berhubungan dengan penerapan teknologi dalam mewujudkan pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang sebagai kawasan ekowisata. Perkembangan akan sosial media yang

demikian pesat, penetrasi dan jangkauannya telah memberikan peluang bagi penyebaran informasi secara cepat dan massif. Oleh karena itu harus menyiapkan langkah-langkah khusus untuk menyikapi semua perkembangan tersebut. Kuncinya adalah para stakeholder harus secara Bersama-sama mempersiapkan SDM, penguasaan terhadap IPTEK, dan aksinya secara terintegrasi.

6.3.4 Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

Atribut-atribut sensitif dimensi aksesibilitas dan utilitas merupakan faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan, masing-masing adalah air bersih, akses komunikasi, fasilitas kesehatan, akses informasi, pemasaran wisata, dan akses transportasi. Atribut-atribut sensitif ini jika diperbaiki maka diharapkan akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi aksesibilitas dan utilitas dengan penjelasan sebagaimana berikut ini.

1. Air bersih

Pengertian air bersih dalam kegiatan kepariwisataan adalah ketersediaan air bersih berupa air tawar sangat diperlukan untuk menunjang fasilitas pengelolaan maupun pelayanan wisata. Sumber air berasal dari sumber air tanah dangkal dan sumber air tanah dalam. Air tanah dalam berpotensi menjadi sumber air bersih untuk minum dan memasak (Kautsar, 2006). Pengamatan ketersediaan air tawar dilakukan dengan cara mengukur jarak antara stasiun penelitian dan lokasi, di mana sumber air tersedia (Masita et al. 2013). Pada kegiatan ekowisata, ketersediaan air bersih berupa air tawar sangat diperlukan untuk menunjang fasilitas pengelolaan maupun pelayanan

ekowisata. Hal ini juga merupakan kriteria penilaian terhadap kelayakan prioritas pengembangan ekowisata pantai (Handayawati, 2010).

Adanya air bersih di suatu lokasi objek wisata, terutama wisata pantai merupakan faktor yang perlu tersedia, baik untuk pengelolaan maupun untuk pelayanan keperluan pengunjung. Air bersih atau air tawar tersebut tidak harus selalu bersumber dari dalam lokasi objek wisata, tetapi bisa saja dialirkan dari luar lokasi, dan akan lebih bagus dan menunjang lagi apabila air bersih tadi bersumber di dalam lokasi.

Pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang memiliki sumber air yang langsung bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pengelola maupun pengunjung, letaknya di sekitar lokasi pantai. Debit air yang dihasilkan rata-rata mencapai 0,8 liter per detik, sehingga masih belum mencukupi kebutuhan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, MCK, dan sebagainya. Seiring perkembangan teknologi, kebutuhan air bersih penduduk sekitar dan wisatawan juga ditopang oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bersumber dari sumber mata air dan adanya 3 bendungan air (Selorejo, Karangates, Sengguruh). Sekalipun demikian, masih sering terjadi kebutuhan air bersih ini masih belum memenuhi kebutuhan baik masyarakat sekitar maupun kebutuhan para wisatawan. Oleh karena itu perlu adanya penanganan secara lebih baik lagi dalam hal pasokan air bersih ini sehingga kebutuhan masyarakat dan khususnya wisatawan akan terpenuhi.

2. Akses Komunikasi

Banyaknya titik "*blank-spot*" signal telekomunikasi di kawasan Pantai Selatan. Berdasarkan data, dari 44 pantai yang terbentang mulai Ampelgading (Pantai Licin) - Donomulyo (Pantai Modangan), baru dua saja yang bisa diakses telepon seluler, yakni Pantai Balekambang dan Pantai Sendangbiru. Hanya satu *provider* yang mendirikan *based transceiver system* (BTS) di

kawasan Pantai Selatan padahal potensi wisata kawasan selatan Kabupaten Malang, terutama pantai-pantai di sepanjang jalur lintas selatan (JLS) sangat besar.

Diskominfo Kabupaten Malang sendiri sebenarnya telah mengusung tema kolaborasi pariwisata, budaya yang didukung piranti teknologi informasi komunikasi. Sebagai implementasi dukungan pariwisata dengan sistem informasi teknologi (IT) ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengusung miniatur *tower* dan *smartphone*. Tujuannya, menunjukkan bahwa masyarakat bisa mempromosikan tempat wisata menggunakan alat komunikasi secara *real time* atau tepat waktu. Sementara wujud budaya dituangkan dalam topeng muka (wajah) Kala, raksasa ciri khas Singosari dan kereta kencana Nagatasaka (kereta kencana Ratu Kencanasari) dari Pantai Selatan. Tema ini diusung dengan harapan ada *provider* yang tertarik menginvestasikan modalnya untuk memperkuat jaringan komunikasi di sepanjang JLS berikut pantai-pantainya.

3. Fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan sarana penunjang kesehatan tidak saja untuk kepentingan wisatawan namun juga bagi masyarakat sekitar. Fasilitas kesehatan yang dimaksud tidak semata keberadaan balai-balai kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit namun juga keperluan istirahat dalam arti jasmani dan rohani bagi wisatawan, seperti air panas yang mengandung mineral, iklim yang sejuk, menyehatkan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah bersama-sama masyarakat perlu untuk mendirikan fasilitas-fasilitas kesehatan yang secara khusus diperuntukkan bagi ketiga kawasan objek wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang

4. Akses informasi

Akses informasi merupakan kemudahan dalam memperoleh informasi terkait keberadaan objek wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang. Daerah pariwisata yang ramah teknologi jelas memudahkan akses para wisatawan. Karena teknologi, wisatawan mudah mengakses informasi suatu destinasi dan situs wisata, mudah memesan transportasi *online* dan mengecek jadwal bus, tidak sulit ketika mencari rumah makan favorit yang menjual makanan khas, hingga mencari hotel beserta harganya.

Oleh karena itu perlu strategi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang beragam guna memberikan kemudahan informasi bagi para wisatawan.

5. Pemasaran wisata

Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. Kabupaten Malang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, namun dalam kegiatan pemasaran produk pariwisata masih belum optimal. Pemasaran berguna untuk memberikan informasi bagi masyarakat yang belum mengetahui informasi mengenai obyek wisata yang akan dituju, khususnya kawasan wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sendiri memiliki sebuah divisi yang bertugas untuk memperkenalkan produk pariwisata Kabupaten Malang kepada konsumen atau wisatawan, sehingga target dan tujuan sebuah perusahaan tercapai yaitu Bidang Pemasaran Pariwisata.

Tugas dan fungsi Bidang Pemasaran Pariwisata pada Peraturan Bupati Malang no 49 tahun 2016 Pasal 25 dan 26 antara lain adalah merencanakan

dan melaksanakan pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri, daya tarik wisata, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.

Terkait hal ini, strategi pemasaran pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang harus dilakukan dengan memperhatikan: (a) keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan pariwisata, dan (b) strategi pemasaran berbasis pemasaran yang bertanggung jawab. Keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan pariwisata dilakukan dengan hal-hal berikut:

- a. Pengoptimalan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pemasaran dan promosi
- b. Koordinasi, intergrasi, dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.
- c. Penguatan promosi bermitra (*co-marketing*) dengan pelaku usaha pariwisata.
- d. Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (*e-commerce*) dengan pelaku usaha pariwisata.
- e. Pengembangan kerjasama pariwisata dalam skema Mitra Praja Utama (MPU).
- f. Pengembangan kerjasama pemasaran pariwisata dengan sister provinces Jawa Timur.

Selanjutnya, strategi pemasaran berbasis pemasaran yang bertanggung jawab, yakni:

- a. Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (*host*) dan penerima manfaat
- b. Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (*paperless & recycleable material*)

- c. Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), seperti pengembangan panduan *do's and don't*, *interpretation kit*, dan film iklan *responsible tourism behaviour*
- d. Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (*reward*) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata
- e. Pengembangan pola-pola sanksi (*punishment*) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggung jawab

6. Akses transportasi

Akses jalan dan infrastruktur pendukung untuk menuju kawasan wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang cukup memprihatinkan, bahkan kondisi itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ketiga pantai ini sangat indah, namun karena kondisi jalan yang tidak mendukung karena banyak lubang, sedangkan jalan itu sendiri jalannya berliku dan banyak tikungan, hal ini sudah barang tentu akan mengurangi minat wisatawan untuk datang berkunjung.

Keberadaan Jalan Lintas Selatan (JLS) di wilayah pesisir Malang selatan mulai membuka potensi Kabupaten Malang, khususnya destinasi wisata pantai. Proyek JLS yang melintasi wilayah Kabupaten Malang yang dimulai dari perbatasan Lumajang hingga perbatasan Blitar dengan 109,7 km terus menapakan alur yang progresif. Dengan luas lahan yang terpakai 263,28 hektar. Dalam proyek itu juga ada 16 buah jembatan dengan total panjang 735 meter. Jika pembangunan JLS tuntas dipastikan akan terjadi kemajuan yang luar biasa di wilayah Malang Selatan. Karena selama ini akses jalan memang menjadi kendala bagi kemajuan wilayah yang memiliki berbagai potensi alam mulai tambang hingga wisata. Oleh karena itu perlu dilakukan secepatnya perbaikan-perbaikan infrastruktur jalan dan sekaligus menyediakan alat-alat

transportasi yang memiliki akses secara langsung ke kawasan wisata wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang.

6.3.5 Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Dimensi Kelembagaan Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Malang

Atribut-atribut sensitif dimensi kelembagaan merupakan faktor pengungkit status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan, masing-masing adalah kebersihan lingkungan, muatan edukasi, dan penerapan sains dan teknologi. Atribut-atribut sensitif ini jika diperbaiki maka diharapkan akan mampu meningkatkan status keberlanjutan dimensi kelembagaan dengan penjelasan sebagaimana berikut ini.

1. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Amanat pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Malang itu sendiri telah diatur dalam Pasal 9 Huruf

(b) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Terkait Pembangunan Destinasi Pariwisata.

2. Peran Lembaga LITBANG

Lembaga penelitian dan pengembangan merupakan pusat penelitian yang memfokuskan kajian penelitian di bidang kepariwisataan. Keberadaan Lembaga ini diharapkan akan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni di bidang kepariwisataan melalui penelitian dasar dan terapan dalam berbagai aspek kritikal untuk menjawab berbagai tantangan kepariwisataan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan umat manusia.

Selebihnya lembaga ini diharapkan mampu berperan dalam menunjang bidang keahlian kepariwisataan baik akademik maupun profesional, melalui

pengembangan pendidikan formal dan non formal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu serta menunjang industri kepariwisataan melalui pengembangan produk-produk pariwisata yang inovatif di Kabupaten Malang.

Selama ini keberadaan lembaga ini masih semata lembaga yang bernaung di bawah pemerintah kabupaten, yakni Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Pemerintah Kabupaten Malang.

Lembaga ini adalah perangkat daerah yang merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di pemerintahan kabupaten Malang.

Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi peran lembaga penelitian dan pengembangan, baik dari pemerintah maupun kalangan akademisi yang nantinya akan menjadi pusat penelitian yang memfokuskan pada kajian penelitian di bidang kepariwisataan secara khusus pada kawasan wisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang. Lembaga ini diharapkan akan berperan menjadi pusat inkubasi dan desiminasi keilmuan kepariwisataan serta menjadi agen perencanaan kepariwisataan yang dapat memberikan sumbangsih nyata bagi proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang.

3. Regulasi Pemerintah Pusat

Regulasi pemerintah Republik Indonesia terkait pembangunan ekowisata sebenarnya telah ditetapkan, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistemnya; 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 4) Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berbagai regulasi dan kebijakan tentang kepariwisataan masih terdapat disharmoni antar peraturan perundang-undangan, baik tujuan maupun kewenangan dalam pengelolaan pariwisata. Kejelasan tujuan dan ruang lingkup dalam pengaturan perundang-undangan ekowisata perlu dilakukan secara kompeherensif dan terstruktur sehingga dinamika substansi yang terkandung dan/atau tertuang dalam undang-undang tersebut tidak bersifat parsial. Selain itu, harus dipahami bahwa ekowisata sesungguhnya bukan harus dimaknai sebagai kegiatan perjalanan menuju alam liar/*remote area* saja, melainkan harus ditegakan di setiap ruang atau destinasi pariwisata. Terkait hal ini maka tentunya menjadi sangat penting untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan keberadaan regulasi perundangan ini sehingga nantinya akan mampu menjadi payung hukum bagi pengembangan ekowisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang.

4. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi

Payung hukum pengembangan ekowisata sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017–2032. Strategi pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan mengembangkan daya tarik wisata yang meliputi wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang terintegrasi secara spasial dengan memperhatikan keunggulan dan daya saing secara global melalui: (a) pengidentifikasian potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia; (b) penetapan potensi daya tarik wisata unggulan; (c) pembentukan jalur pengembangan wisata yang

terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur wilayah; (d) pengembangan kegiatan penunjang wisata; (e) pelestarian tradisi atau kearifan masyarakat lokal; dan (f) peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada masyarakat dan/atau perajin lokal untuk pengembangan pariwisata.

Terkait hal ini perlu kiranya diterbitkan Peraturan Daerah (PERDA) yang secara khusus mampu menjadi payung hukum bagi terwujudnya pengembangan ekowisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang.

5. Peran Institusi Pemerintah

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu program andalan Pemerintah Kabupaten Malang dan saat ini obyek wisata Pantai Balekambang dijadikan sebagai ikon wisata Kabupaten Malang. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui obyek wisata Pantai Balekambang, Pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya untuk dapat menjalankan peranannya sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator dengan semaksimal mungkin. Dimana dari keempat peran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.

Sebagai entrepreneur, pemerintah Kabupaten Malang mampu meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata dari tahun ke tahun. Sebagai koordinator, Pemerintah Kabupaten Malang telah berhasil menciptakan perencanaan yang terpadu dalam pengembangan Pariwisata melalui RPJMD 2016-2021 dan Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa yang mengelola sektor Pariwisata. Sebagai fasilitator, pemerintah Kabupaten Malang memfokuskan pembangunan pariwisata yang diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur Jalan Lintas Selatan (JLS) dan pengembangan wilayah. Dan sebagai stimulator, Pemerintah Kabupaten Malang mampu

menarik para investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata dengan Perusahaan Daerah Jasa Yasa selaku pengelola.

Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa peran pemerintah belum optimal untuk melakukan pengembangan potensi wisata pantai dikarenakan pengelolaan kawasan pantai dan coban berada di bawah Perum Perhutani. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang berusaha menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani dalam pengelolaan pantai, khususnya kawasan wisata pantai Ngliep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang.

Kerjasama pengelolaan pariwisata tersebut akan ditindaklanjuti untuk pantai-pantai lainnya dan wana wisata coban yang ada di wilayah Kabupaten Malang, namun area wisatanya di kawasan milik Perhutani agar potensi wisata dapat dioptimalkan. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan pengelolaannya bisa lebih baik dan profesional.

6. Peran pihak swasta

Peran pihak swasta dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang masih belum ada. Padahal sebenarnya peran swasta ini mestinya akan mampu mendukung penyediaan prasarana dan pengelolaannya di masing-masing obyek wisata yang ada. Pihak swasta juga bisa berperan dalam pengembangan atraksi, penyediaan akomodasi, fasilitas. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan ekowisata pantai Ngliep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang, khususnya dalam hal penyediaan prasarana dan pengelolaannya di masing-masing obyek wisata yang ada. Pihak swasta berperan dalam pengembangan atraksi, penyediaan akomodasi, fasilitas, dan sebagainya.

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Atas dasar penjelasan-penjelasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut ini.

1. Status pengembangan ekowisata berkelanjutan multidimensi menunjukkan bahwa Pantai Ngliyep memiliki status kurang berkelanjutan, sedangkan Pantai Balaikambang dan Pantai Ungapan masing-masing memiliki status cukup berkelanjutan. Sementara itu, status pengembangan ekowisata berkelanjutan untuk masing-masing dimensi pada masing-masing objek adalah sebagai berikut:
 - a. Dimensi lingkungan menunjukkan bahwa Pantai Ngliyep dan Pantai Ungapan cukup berkelanjutan, sedangkan Pantai Balaikambang berkelanjutan.
 - b. Dimensi ekonomi menunjukkan bahwa Pantai Ngliyep dan Pantai Ungapan memiliki status kurang berkelanjutan, sedangkan Pantai Balaikambang cukup berkelanjutan.
 - c. Dimensi sosial dan budaya, menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketiga lokasi baik Pantai Ngliyep, Pantai Balaikambang, dan Pantai Ungapan cukup berkelanjutan.
 - d. Dimensi aksesibilitas dan utilitas, menunjukkan bahwa Pantai Ngliyep memiliki status kurang berkelanjutan, sedangkan Pantai Balaikambang dan Pantai Ungapan cukup berkelanjutan.

e. Dimensi kelembagaan, menunjukkan bahwa Pantai Ngliyep memiliki status kurang berkelanjutan, sedangkan Pantai Balaikambang dan Pantai Ungapan cukup berkelanjutan.

2. Atribut-atribut sensitif sebagai faktor penguangkit dalam pengembangan ekowisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

a. Atribut-atribut sensitif dimensi lingkungan secara berurutan yakni: kemiringan pantai, lebar pantai, biota berbahaya, dan kecepatan arus.

b. Atribut-atribut sensitif dimensi ekonomi yakni: pengembangan produk lokal, pengembangan jasa wisata lain, diversifikasi usaha, dan peluang pekerjaan.

c. Atribut-atribut sensitif dimensi sosial dan budaya, yakni: kebersihan lingkungan, muatan edukasi, dan penerapan sains dan teknologi.

d. Atribut-atribut sensitif dimensi aksesibilitas dan utilitas, yakni: air bersih, akses komunikasi, fasilitas kesehatan, akses informasi, pemasaran wisata, dan akses transportasi.

e. Atribut-atribut sensitif dimensi kelembagaan, yakni: PERDA Kabupaten, peran LITBANG, regulasi pemerintah pusat, PERDA Provinsi, peran institusi pemerintah, dan peran pihak swasta.

3. Strategi untuk meningkatkan status pengembangan ekowisata berkelanjutan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan terhadap atribut-atribut sensitif dari masing-masing dimensi, yakni; dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dimensi sosial dan budaya, dimensi aksesibilitas dan utilitas, serta dimensi kelembagaan.

Strategi pengembangan ekowisata berkelanjutan dimensi lingkungan kawasan pantai selatan di Kabupaten Malang dilakukan dengan memperbaiki aspek-aspek Kemiringan pantai, Lebar Pantai, Biota berbahaya, dan

Kecepatan arus. Perbaikan terhadap dimensi Ekonomi meliputi aspek Pengembangan produk lokal, Pengembangan jasa wisata lain, Diversifikasi usaha, dan Peluang pekerjaan. Perbaikan terhadap Dimensi Sosial dan Budaya, meliputi aspek Kebersihan lingkungan, Muatan edukasi, dan Penerapan sains dan teknologi. Sementara itu, perbaikan Dimensi Aksesibilitas dan Utilitas dapat dilakukan pada aspek Air bersih, Akses komunikasi, Fasilitas kesehatan, Akses informasi, Pemasaran wisata, dan Akses transportasi. Selanjutnya untuk Dimensi Kelembagaan perbaikan dapat dilakukan pada Perda Kabupaten, Peran LITBANG, Regulasi Pemerintah Pusat, Perda Provinsi, Peran Institusi Pemerintah, dan Peran pihak swasta.

7.2 Saran

Atas dasar kesimpulan tersebut diatas maka dapat disarankan hal-hal berikut ini.

1. Pemerintah Kabupaten Malang hendaknya menerbitkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur dan melindungi secara hukum pengembangan ekowisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang hendaknya mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan objek wisata wisata. Peran masyarakat lokal tidak terpisahkan dalam hal menjaga keberlangsungan program-program wisata, seperti *tour guide*, nelayan, persewaan alat, pengelolaan tempat makan, penginapan, dan sebagainya.
3. Para stakeholder melakukan penguatan konsep ecotourism bagi pengembangan ekowisata pantai Ngliyep, pantai Ungapan, dan pantai Balaikambang di Kabupaten Malang. Dalam konteks ini maka wisata pantai

ini diarahkan sedemikian rupa agar pengembangannya tidak mengganggu atau selaras dengan upaya konservasi lingkungan serta berdampak positif bagi pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal dilakukan selain untuk menopang keberlanjutan konservasi juga diperlukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

4. Para stakeholders hendaknya mendorong *linkage* dengan travel unit (agen perjalanan). Pengembangan suatu kawasan wisata tidak bisa dilepaskan dari keberadaan para pemandu wisata dan agen perjalanan. Karena pemandu wisata dan agen wisata merupakan ujung tombak terdepan yang langsung berhubungan dengan para wisatawan atau *stakeholder*, sehingga untuk lebih mudah dalam mendukung pengembangan ekowisata.



DAFTAR PUSTAKA

- Andronicus, Fredinan Yulianda, dan Achmad Fahrudin. 2016. Kajian Keberlanjutan Pengelolaan Ekowisata Berbasis Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Pesisir Desa Bahoi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. *Jemis* Vol. 4 No. 1 Tahun 2016. Hal. 1-10.
- Angelevska-Najdeska, K., Rakicevik, G. 2012. *Planning of Sustainable Tourism Development*. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 44 : 210-220.
- Arikunto, Suharsimi. 2015. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi VL Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arsyad, Azhar. 2010. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Atkinson, G., S. Dietz, E. Neumayer. 2007. *Handbook of Sustainable Development*. Edward Elgar. Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA.
- Bachrawi, Sanusi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Rineka Cipta; Jakarta.
- Bond, Richard & Curran, Johanna & Kirkpatrick, Colin & Lee, Norman & Francis, Paul, 2001. *Integrated Impact Assessment for Sustainable Development: A Case Study Approach*. *World Development*, Elsevier, vol. 29(6), pages 1011-1024, June.
- Bosshard, A. 2000. *A Methodology and Terminologi of Sustainability Assessment and Its Perpectines for Rural Planning*. Agriculture, Ecosystem and Environment, New York
- Bryman, A. 2001. *Social Research Methods*. Oxford, Oxford University Press
- Budimanta. 2005. *Memberlanjutkan Pembangunan di Perkotaan Melalui Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta
- Dirawan, Gurfan Darma. 2006. *Strategi Pengembangan Ekowisata (Studi Kasus Suaka Margasatwa Mampie Lampoko)*. *Jurnal Kepariwisata Indonesia* Jakarta.
- Direktorat Kebudayaan dan Pariwisata. 2009. *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan.
- Djajadiningrat, S.T, Famiola, M., 2004. *Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan*. Rekayasa Sains, Bandung.
- Dowling, R. K and D. A. Fennell. 2003. *The Context of Ecotourism Policy Planning*. CAB International.

Epplerwood, M. 2004. *A Triple Bottom Line Framework for Sustainable Tourism Development for International Donors*. Conference of Ecotourism and Conservation in America Stanford University May 2002.

Fandeli, Chafid dan Nurdin M. 2005. *Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi di Taman Nasional*. Fakultas Kehutanan UGM, Pusat Studi Pariwisata UGM, dan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup. Yogyakarta.

Fandeli, Chafid. 2000. *Pengusahaan Ekowisata*. Yogyakarta: Fakultas kehutanan. Universitas Gadjah Mada.

Fandeli, Chafid. 2009. *Prinsip-prinsip Dasar Mengkonservasi Lanskap*. Buku. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 180

Fauzi, A dan Anna, S. 2005. *Evaluasi Status Keberlanjutan Pembangunan Perikanan: Aplikasi Pendekatan Rappfish (Studi Kasus Perairan Pesisir DKI Jakarta)*. Jurnal Pesisir dan Lautan Volume 4, No.3.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hasibuan, Malayu S. P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Hettne, Bjorn. 2001. *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hidayat M. 2011. Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat). *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal* 1(1): 33–43.

Hidayat, M. 2011. Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat). *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal* 1(1): 33-43.

Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

IUCN [International Union for Conservation of Nature and Natural] Resources. 2005. *Benefits Beyond Boundaries: Proceeding of the Vth IUCN World Parks Congress*. Gland: IUCN.

J. Stephen, Page dan Ross K. Dowling. 2000. *Ecotourism*. London: Licensing Agency Ltd.

Kavanagh, P. 2001. Rapid Appraisal of Fisheries (Rappfish) Project. Rappfish Software Description (for Microsoft Excel). University of British Columbia. Fisheries Centre. Vancouver; Canada. 36p.

Kavanagh, P. and T.J. Pitcher. 2004. *Implementing Microsoft Excel Software For Rapfish: A Technique for The Rapid Appraisal of Fisheries Status*. University of British Columbia, Fisheries Centre Research Reports. 12 (2): 75 p.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup [KLH]. 2000. *Agenda 21, Sektor Agenda Pariwisata untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan*. Jakarta: Proyek Agenda 21 Sektor Kerjasama Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNDP.

Koestoro, B., dan Basrowi. 2006. *Strategi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Surabaya: Yayasan Kampusina.

Legendre, L., and P. Legendre. 2000. *Numerical Ecology*. Second English Edition. Elsevier Science B.V. Amsterdam.

Manullang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

McKercher, Bob and Hilary du Cros. 2003. *Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural heritage Management*. The Haworth Hospitality Press, New York

Meier, Gerald M and Baldwin, Robert E. 2012. *Pembangunan Ekonomi*. Alih bahasa oleh P. Sihotang. Jakarta: Bhratara.

Mitchell, R.K., B.R. Agle, and D.J. Wood. 2000. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Saliency: Defining The Principle of Who and What Really Counts. *Academy of Management Review*. Vol. 22, No. 4, p. 853-886.

Muhsoni, Firman Farid and Mahfud Efendy. 2017. Coral Reefs Ecotourism Sustainability Management in The Gili Labak Island Using Rapfish Method. *Jurnal Kelautan* Volume 10, No. 2, p. 192-204.

Murghab *EcoTourism Association [META]*. 2002. *Planning for Marine Ecotourism in the UE Atlantic Area*. Univ. of the West England, Bristol.

Nugroho, I. dan Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.

Nurisyah, S. 2001. *Rencana Pengembangan Fisik Kawasan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir Indonesia*. Buletin Taman dan Lanskap Indonesia. Perencanaan, Perancangan dan Pengelolaan Volume 3, Nomor 2, 2000. Bogor: 133 Studio Arsitektur Pertamanan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Pemerintah Kabupaten Malang. 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021. Malang.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Jakarta.

Pitcher, T.J. and D. Preikshot. 2000. RAPPISH: *A Rapid Appraisal Technique to Evaluate the Sustainability Status of Fisheries*. Fisheries Research 49(3): 1-27.

Quebec Declaration. 2002. *Quebec Declaration on Ecotourism*. World Ecotourism Summit. Quebec City, Canada.

Richardson, Harry W. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: FE UI

Sanam S.R dan Adikampana IM. 2014. *Pengembangan Potensi Wisata Pantai Lasiana sebagai Pariwisata Berkelanjutan di Kota Kupang*, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Destinasi Pariwisata 2(1): 11–23.

Sanam SR, Adikampana IM. 2014. Pengembangan Potensi Wisata Pantai Lasiana sebagai Pariwisata Berkelanjutan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Destinasi Pariwisata 2(1): 11–23.

Sharpley, R. 2009. *Tourism, Development and the Environment: Beyond Sustainability?*. London: Earthscan. p.181.

Siregar, D. D. 2004. *Manajemen Aset. Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Suddin, Simon. 2017. *Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.

Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim. 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Edisi Pertama, Cetakan ke-2. Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Susilo, BS. 2003. *Keberlanjutan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil: Studi Kasus Kepulauan Pulau Panggang dan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta*. Tesis. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Sutamihardja. 2004. *Perubahan Lingkungan Global*. Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB.

Terry, George R. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Penerjemah J-Smith D.F.M. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kesembilan, Jilid I. Jakarta: Erlangga.

Umar, H., 2012. *Metode Floating Object untuk Pengukuran Arus Menyusur Pantai*. Jurnal Riset dan Teknologi Kelautan 10(2), pp. 157-167.

UNCED [United Nation Conference on Environment and Development]. 1992. *Earth Summit. Convention on Biological Diversity*. Final Text. United Nation Conversnce on Environmental and Development. Rio de Janeiro Brazil 3-14 June 1992

UNEP. 2002. *Trade, Environment and Sustainable Development*. ESCWA/UNEP Workshop Muscat, Sultanate of Oman (March 25-27, 2006).

UNESCO. 2001. *Development of Information Literacy: Through School Libraries in South East Asia Countries*. Bangkok: UNESCO.

United Nation [UN]. 2001. *The United Nations Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Act*. December 2001. UN Publication.

UN-WTO [United Nation World Tourism Organization]. 2011. *Introduction To Sustainable Tourism*. Seoul : UN-WTO ST-EP Foundation

WCED [World Commission on Environment and Development]. 2002. *Our Common Future*. Oxford University Press, Oxford University Press. New York.

Weaver, D. 2001. *Ecotourism*. Buku. John Wiley and Sons Australia, Ltd. Australia. 386p.

Wiranatha, Agung Suryawan. 2006. *Pariwisata Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal*. Disampaikan dalam Pelatihan Ekowisata Nasional di Hotel Inna Sindhu, Denpasar (25-26 Agustus 2006).

WSSD [World Summit on Sustainable Development]. 2002. *Earth Observation for Sustainable Development*. Bali, Indonesia.

WTO [World Trade Organization]. 2002. *The WTO Agreements Series 3: Agriculture*. The WTO Secretariat, Geneva.

Yaman, A.R and Mohd, A. 2004. *Community-based Ecotourism New Proposition for Sustainable Development and Environment Conservation in Malaysia*. Journal of Applied Sciences IV (4):583-589.

Yoeti, Oka A. 2006. *Pemasaran Pariwisata*. Edisi Revisi. Bandung: Angkasa.

Yulianda F. 2007. *Ekowisata Bahari sebagai Alternatif Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Berbasis Konservasi*. Seminar Sains pada Departemen MSP, FPIK IPB. 21 Februari 2007; Bogor, Indonesia. Bogor (ID): Departemen MSP IPB.

Yulius, Rinny Rahmania, Utami R Kadarwati, Muhammad Ramdhan, Tria Khairunnisa, Dani Saepuloh, Joko Subandriyo, Armyanda Tussadiah. 2018. *Buku Panduan Kriteria Penetapan Zona Ekowisata Bahari*. Cetakan Pertama, Agustus 2018. Penerbit: PT Penerbit IPB Press Bogor.

Zalukhu, Sukawati and Meyers, Koen. 2009. *Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata*. Jakarta: Unesco Office.



DAFTAR PUSTAKA

- Andronicus, Fredinan Yulianda, dan Achmad Fahrudin. 2016. Kajian Keberlanjutan Pengelolaan Ekowisata Berbasis Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Pesisir Desa Bahoi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. *Jemis* Vol. 4 No. 1 Tahun 2016. Hal. 1-10.
- Angelevska-Najdeska, K., Rakicevik, G. 2012. *Planning of Sustainable Tourism Development*. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 44 : 210-220.
- Arikunto, Suharsimi. 2015. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi VL Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arsyad, Azhar. 2010. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Atkinson, G., S. Dietz, E. Neumayer. 2007. *Handbook of Sustainable Development*. Edward Elgar. Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA.
- Bachrawi, Sanusi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Rineka Cipta; Jakarta.
- Bond, Richard & Curran, Johanna & Kirkpatrick, Colin & Lee, Norman & Francis, Paul, 2001. *Integrated Impact Assessment for Sustainable Development: A Case Study Approach*. *World Development*, Elsevier, vol. 29(6), pages 1011-1024, June.
- Bosshard, A. 2000. *A Methodology and Terminologi of Sustainability Assessment and Its Perpectines for Rural Planning*. Agriculture, Ecosystem and Environment, New York
- Bryman, A. 2001. *Social Research Methods*. Oxford, Oxford University Press
- Budimanta. 2005. *Memberlanjutkan Pembangunan di Perkotaan Melalui Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta
- Dirawan, Gurfan Darma. 2006. *Strategi Pengembangan Ekowisata (Studi Kasus Suaka Margasatwa Mampie Lampoko)*. *Jurnal Kepariwisata Indonesia* Jakarta.
- Direktorat Kebudayaan dan Pariwisata. 2009. *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan.
- Djajadiningrat, S.T, Famiola, M., 2004. *Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan*. Rekayasa Sains, Bandung.
- Dowling, R. K and D. A. Fennell. 2003. *The Context of Ecotourism Policy Planning*. CAB International.

Epplerwood, M. 2004. *A Triple Bottom Line Framework for Sustainable Tourism Development for International Donors*. Conference of Ecotourism and Conservation in America Stanford University May 2002.

Fandeli, Chafid dan Nurdin M. 2005. *Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi di Taman Nasional*. Fakultas Kehutanan UGM, Pusat Studi Pariwisata UGM, dan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup. Yogyakarta.

Fandeli, Chafid. 2000. *Pengusahaan Ekowisata*. Yogyakarta: Fakultas kehutanan. Universitas Gadjah Mada.

Fandeli, Chafid. 2009. *Prinsip-prinsip Dasar Mengkonservasi Lanskap*. Buku. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 180

Fauzi, A dan Anna, S. 2005. *Evaluasi Status Keberlanjutan Pembangunan Perikanan: Aplikasi Pendekatan Rappfish (Studi Kasus Perairan Pesisir DKI Jakarta)*. Jurnal Pesisir dan Lautan Volume 4, No.3.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hasibuan, Malayu S. P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Hettne, Bjorn. 2001. *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hidayat M. 2011. Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat). *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal* 1(1): 33–43.

Hidayat, M. 2011. Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat). *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal* 1(1): 33-43.

Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

IUCN [International Union for Conservation of Nature and Natural] Resources. 2005. *Benefits Beyond Boundaries: Proceeding of the Vth IUCN World Parks Congress*. Gland: IUCN.

J. Stephen, Page dan Ross K. Dowling. 2000. *Ecotourism*. London: Licensing Agency Ltd.

Kavanagh, P. 2001. Rapid Appraisal of Fisheries (Rappfish) Project. Rappfish Software Description (for Microsoft Excel). University of British Columbia. Fisheries Centre. Vancouver; Canada. 36p.

Kavanagh, P. and T.J. Pitcher. 2004. *Implementing Microsoft Excel Software For Rappfish: A Technique for The Rapid Appraisal of Fisheries Status*. University of British Columbia, Fisheries Centre Research Reports. 12 (2): 75 p.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup [KLH]. 2000. *Agenda 21, Sektor Agenda Pariwisata untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan*. Jakarta: Proyek Agenda 21 Sektor Kerjasama Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNDP.

Koestoro, B., dan Basrowi. 2006. *Strategi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Surabaya: Yayasan Kampusina.

Legendre, L., and P. Legendre. 2000. *Numerical Ecology*. Second English Edition. Elsevier Science B.V. Amsterdam.

Manullang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

McKercher, Bob and Hilary du Cros. 2003. *Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural heritage Management*. The Haworth Hospitality Press, New York

Meier, Gerald M and Baldwin, Robert E. 2012. *Pembangunan Ekonomi*. Alih bahasa oleh P. Sihotang. Jakarta: Bhratara.

Mitchell, R.K., B.R. Agle, and D.J. Wood. 2000. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Saliency: Defining The Principle of Who and What Really Counts. *Academy of Management Review*. Vol. 22, No. 4, p. 853-886.

Muhsoni, Firman Farid and Mahfud Efendy. 2017. Coral Reefs Ecotourism Sustainability Management in The Gili Labak Island Using Rappfish Method. *Jurnal Kelautan* Volume 10, No. 2, p. 192-204.

Murghab *EcoTourism Association [META]*. 2002. *Planning for Marine Ecotourism in the UE Atlantic Area*. Univ. of the West England, Bristol.

Nugroho, I. dan Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.

Nurisyah, S. 2001. *Rencana Pengembangan Fisik Kawasan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir Indonesia*. Buletin Taman dan Lanskap Indonesia. Perencanaan, Perancangan dan Pengelolaan Volume 3, Nomor 2, 2000. Bogor: 133 Studio Arsitektur Pertamanan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Pemerintah Kabupaten Malang. 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021. Malang.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Jakarta.

Pitcher, T.J. and D. Preikshot. 2000. RAPPISH: *A Rapid Appraisal Technique to Evaluate the Sustainability Status of Fisheries*. Fisheries Research 49(3): 1-27.

Quebec Declaration. 2002. *Quebec Declaration on Ecotourism*. World Ecotourism Summit. Quebec City, Canada.

Richardson, Harry W. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: FE UI

Sanam S.R dan Adikampana IM. 2014. *Pengembangan Potensi Wisata Pantai Lasiana sebagai Pariwisata Berkelanjutan di Kota Kupang*, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Destinasi Pariwisata 2(1): 11–23.

Sanam SR, Adikampana IM. 2014. Pengembangan Potensi Wisata Pantai Lasiana sebagai Pariwisata Berkelanjutan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Destinasi Pariwisata 2(1): 11–23.

Sharpley, R. 2009. *Tourism, Development and the Environment: Beyond Sustainability?*. London: Earthscan. p.181.

Siregar, D. D. 2004. *Manajemen Aset. Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Suddin, Simon. 2017. *Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.

Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim. 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Edisi Pertama, Cetakan ke-2. Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Susilo, BS. 2003. *Keberlanjutan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil: Studi Kasus Kepulauan Pulau Panggang dan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta*. Tesis. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Sutamihardja. 2004. *Perubahan Lingkungan Global*. Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB.

Terry, George R. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Penerjemah J-Smith D.F.M. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kesembilan, Jilid I. Jakarta: Erlangga.

Umar, H., 2012. *Metode Floating Object untuk Pengukuran Arus Menyusur Pantai*. Jurnal Riset dan Teknologi Kelautan 10(2), pp. 157-167.

UNCED [United Nation Conference on Environment and Development]. 1992. *Earth Summit. Convention on Biological Diversity*. Final Text. United Nation Conversnce on Environmental and Development. Rio de Janeiro Brazil 3-14 June 1992

UNEP. 2002. *Trade, Environment and Sustainable Development*. ESCWA/UNEP Workshop Muscat, Sultanate of Oman (March 25-27, 2006).

UNESCO. 2001. *Development of Information Literacy: Through School Libraries in South East Asia Countries*. Bangkok: UNESCO.

United Nation [UN]. 2001. *The United Nations Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Act*. December 2001. UN Publication.

UN-WTO [United Nation World Tourism Organization]. 2011. *Introduction To Sustainable Tourism*. Seoul : UN-WTO ST-EP Foundation

WCED [World Commission on Environment and Development]. 2002. *Our Common Future*. Oxford University Press, Oxford University Press. New York.

Weaver, D. 2001. *Ecotourism*. Buku. John Wiley and Sons Australia, Ltd. Australia. 386p.

Wiranatha, Agung Suryawan. 2006. *Pariwisata Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal*. Disampaikan dalam Pelatihan Ekowisata Nasional di Hotel Inna Sindhu, Denpasar (25-26 Agustus 2006).

WSSD [World Summit on Sustainable Development]. 2002. *Earth Observation for Sustainable Development*. Bali, Indonesia.

WTO [World Trade Organization]. 2002. *The WTO Agreements Series 3: Agriculture*. The WTO Secretariat, Geneva.

Yaman, A.R and Mohd, A. 2004. *Community-based Ecotourism New Proposition for Sustainable Development and Environment Conservation in Malaysia*. Journal of Applied Sciences IV (4):583-589.

Yoeti, Oka A. 2006. *Pemasaran Pariwisata*. Edisi Revisi. Bandung: Angkasa.

Yulianda F. 2007. *Ekowisata Bahari sebagai Alternatif Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Berbasis Konservasi*. Seminar Sains pada Departemen MSP, FPIK IPB. 21 Februari 2007; Bogor, Indonesia. Bogor (ID): Departemen MSP IPB.

Yulius, Rinny Rahmania, Utami R Kadarwati, Muhammad Ramdhan, Tria Khairunnisa, Dani Saepuloh, Joko Subandriyo, Armyanda Tussadiah. 2018. *Buku Panduan Kriteria Penetapan Zona Ekowisata Bahari*. Cetakan Pertama, Agustus 2018. Penerbit: PT Penerbit IPB Press Bogor.

Zalukhu, Sukawati and Meyers, Koen. 2009. *Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata*. Jakarta: Unesco Office.

